BALAIRUNG

EDISI NO. 22/TH. IX/1995

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA Rp. 2.500,00

KISAH POLITIKUS DI LUAR JALUR :

DARI TUDUHAN EKSTREM KIRI SAMPAI KANAN

WAWANCARA KHUSUS

Mohammed Arkoun

"Saya harap Islam tidak dipolitisir"

ISSN : 0215 - 076 X

Supersin®

Lapisan anti refleksi dari RODENSTOCK

1. Pantulannya **4 X** lebih sedikit dari Multicoating biasa, sehingga keindahan mata anda terlihat lebih alami.





2. **Supersin® Menghilangkan** bayangan hantu/semu disaat mengemudi kendaraan dimalam hari.

3. Bahan material dasar **RODENSTOCK** menahan sinar U.V. lebih baik dari lensa biasa, sehingga mata tidak cepat Katarak (mengeruh pada usia lanjut).

4. **Supersin®**
bergaransi
1 tahun
terhadap
kerusakan
coating.



Supersin® adalah merek dagang dari RODENSTOCK, terdaftar pada Dinas Patent Departemen Kehakiman No : 131574. Merek lain dilarang menggunakan istilah Supersin.

■ Mintalah Kartu Garansi Rodenstock Supersin bila anda membeli Lensa orisinil Supersin dengan logo R yang terdapat pada lensa.

RODENSTOCK

MASS ASRIMITRA AD.

WARTAWAN mencari narasumber adalah hal yang biasa dalam reportase jurnalistik. Yang agak ganjil adalah bila seorang wartawan menjadi narasumber. Itulah yang terjadi pada diri Peter Arnett, wartawan televisi senior sekaligus pemilik CNN. Tiga reporter **BALAIRUNG**; Bimo, Hatta dan Frans atas jasa baik panitia ICCT, berhasil menjebak Arnett di ruang VIP Bandar Udara Adisucipto, Yogyakarta. Ia bercerita banyak hal. Dari perihal keberadaannya di Indonesia, penilaian Arnett tentang perkembangan ekonomi politik Indonesia hingga peliputan CNN atas berbagai peristiwa penting dunia. Pebincangan dengan reporter televisi yang terkenal karena liputan langsungnya atas Perang Teluk tahun 1991 ini kami sajikan dalam Wawancara Khusus.

Reporter kami yang lain, Aship Agus Hasani punya cerita sendiri selama ICCT (International Conference on Cultural Tourism) di Yogyakarta. Aship yang ditugasi meliput kenferensi tersebut sempat gontok-gontokan dengan petugas keamanan yang mengawal John Naisbitt ketika bersikeras untuk mewawancarainya secara khusus. Namun kesempatan untuk wawancara dengan Naisbitt, Futurolog yang merumuskan *Megatrends* dan *Global Paradox* itu, amat mahal, semahal jam bicaranya. Apa boleh buat, reporter kami akhirnya harus cukup puas bisa mewawancarai Mohammed Arkoun, sejarawan dari Universitas Sorbonne, Perancis. Perbincangan dengan Arkoun ini kami sajikan dalam Wawancara Khusus.

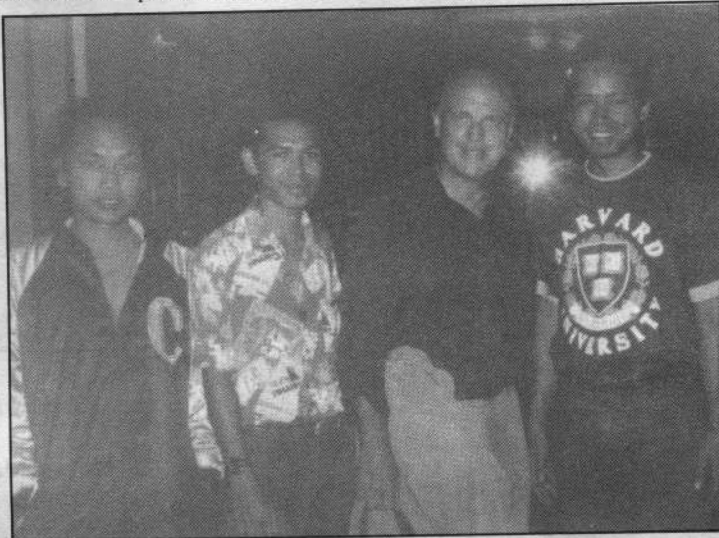
Reporter lain pun disebar. Amalinda menemui Mulyana W Kusuma dan Ichlasul Amal. H.C.J. Princen dan Oe Tjoe Tat pun tak luput dari kejaran Hary Prabowo. Dan untuk melengkapinya Agus Riyanto dan Khoirul Rosyadi harus ikut pengajian di Magelang untuk menemui Masdar F Mas'udi. Hasil wawancara dimaksudkan untuk melengkapi bahan-bahan penulisan Laporan Utama yang mengambil tema persoalan Tahanan dan Narapidana Politik dalam panggung politik Orde Baru.

Selain informasi di atas, dalam edisi ini Anda juga bisa menelusuri Tari Bedoyo Semang, sebuah tradisi tari keraton Yogyakarta yang kehilangan jejak. Tidak mudah memang merangkai cerita tentang sebuah tradisi yang hampir hilang. Tetapi kita lebih tidak rela lagi bila kehilangan itu benar-benar terjadi. Itulah semangat yang melandasi reportase Kusbiantoro, reporter berambut gondrong , yang harus keluar masuk keraton.

Itulah sedikit, dari sekian banyak kesibukan awak kami dalam menyiapkan edisi ini, tentunya semua itu demi kepuasan Anda.

Pembaca yang budiman, hingga edisi 22 ini tanpa terasa **BALAIRUNG** telah memasuki tahun kesepuluh. Dalam usia yang relatif muda ini, kami sadar bahwa masih banyak kekurangan yang kami lakukan. Namun, tak kalah banyak ide-ide yang belum sempat kami wujudkan. Untuk itu tak henti-hentinya kami meminta dukungan, kritik serta masukan dari pembaca yang budiman, supaya **BALAIRUNG** bisa hadir dengan informasi alternatif di seputar mahasiswa dengan segala perkembangan pemikirannya.

Penjaga Dapur



Hatta/PPC

Awak BALAIRUNG bersama Peter Arnett

Wartawan memburu wartawan

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

□ **Diterbitkan oleh Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM)** □ **Ijin Terbit** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/UM/01/37 □ International Standard Serial Number (ISSN): 0215-076X □ **Pelindung**: Prof Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com (Rektor UGM) □ **Penasehat**: Ir. Bambang Kartika(Purek III UGM), Prof. Koesnadi Hardjosumantri,S.H., Ir. Abdul Hamid Dipopramono □ **Pemimpin Umum**: Sunarto Cipto Harjono □ **Sekretaris Umum**: Lais Abid □ **Pemimpin Redaksi**:Frans Surdiasis □ **Sekretaris Redaksi**:Amalinda S □ **Ka. Litbang**: Eriyanto □ **Staf Litbang**: Bimo Nugroho Sekundatmo,Anthoni D Martin, Indriaswati D.S. □ **Pemimpin Perusahaan**:Timbul Sunoto □ □ **Distribusi/Sirkulasi**: Agus Riyanto □ **Staf Perusahaan**: Mohammad Sri Sadono, Risdianto, Kun Anggoro, Amalinda S, Among Kurnia Ebo □ **Redaktur Pelaksana**: Hary Prabowo □ **Dewan Redaksi** : Sunarto, Eriyanto, Frans Surdiasis, Timbul Sunoto, Lais Abid, Harry Prabowo, Amalinda S, □ **Penanggungjawab Rubrik**: Aship Agus Hasani, Kusbiantoro E, Dirmawan Hatta, Rinda Runi Anitasari, Suluh Pratitasari □ **Redaktur Artistik**: Agung Arif Budiman □ **Staf Artistik**: Pedy Artsanti , Ratih Loe-loe Pratiwi . **Redaktur Foto**: Tri wasono Sunu □ **Fotografer**: Aship Agus Hasani, Dirmawan Hatta □ **Reporter**: Dwi Soufnita, Aris Purnomo, Poppy SW, Agus Riyanto, Fransiska Indirasari, Nining Sunartiningsih, Khoirul Rosyadi, Agung Widiatmoko, Moh. Mustajab , Rudy Isbowo, □ **Pimpinan Produksi**: Lais Abid □ **Alamat redaksi**: Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, Telp (0274) 901703, Fax. (0274) 566171 □ **Rekening**: Tabungan MITRA BAPINDO cab. UGM No. Rek. 22.1.5027.66.1 □ **Percetakan**: Liberty Offset, JL. Jayengprawiran 21 Yogyakarta, Telp. (0274) 512908. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Redaksi menerima tulisan dan foto terutama tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Yang tidak dimuat akan dikembalikan bila disertai perangko secukupnya.

BALAIRUNG

ISI



REPRO HORIZON



TRI WASONO



ISTIMEWA

LAPORAN UTAMA

Sistem politik yang kaku ternyata banyak menghasilkan politisi di luar jalur. Berbagai tuduhan dari ekstrim kanan sampai kiri dikenakan pada mereka. Bahkan beberapa tokohnya dijebloskan ke dalam penjara. Masih adakah tempat bagi mereka?

11



LAPORAN DAERAH

Industrialisasi Pariwisata, telah menjadikan budaya Bali tercabik-cabik. Tokoh-tokoh Bali membeberkannya. Mereka bicara tentang Proyek Nusa Dua, BDC, juga tentang tarik ulur kebijakan pariwisata di Bali.

52



REPRO AKADEMIKA

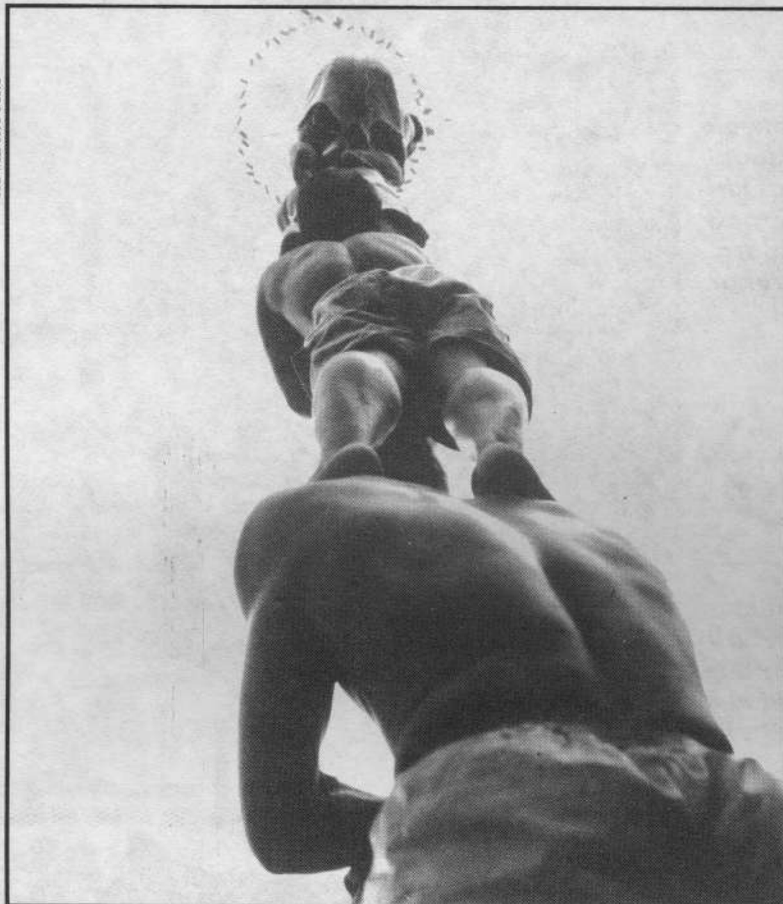


TRI WASONO SUNU

JERAT

Satrio Aris Munandar, harus rela melepaskan profesinya sebagai wartawan. Menurut dia hal itu karena adanya tekanan dari pihak luar, berkaitan dengan keterlibatannya di Aliansi Jurnalis Independen.

76



Babu-membabu, bau-membau atau saling memanfaatkan babu

TENTANG SUPREMASI MILITER

Tertarik pada **BALAIRUNG** No. 20/1994 "KALAU SERDADU RINDU TOGA" maka kami ingin sedikit urun rembug, menyampaikan sedikit bahan renungan bagi para mahasiswa Gadjah Mada khususnya dan kaum muda pada umumnya yaitu dengan menyampaikan buku "MASALAH SOSPOL DALAM PEMBANGUNAN" (terlampir-red). Menurut saya kekhawatiran akan supremasi militer (hal. 18) maupun Dwifungsi (hal 21) akan hilang dengan sendirinya bila jumlah ABRI bisa diciutkan misalnya menjadi 50.000-an saja dan mereka disibukkan dengan mengurusi pusat-pusat pendidikan dan latihan Wajib Militer yang jumlahnya ratusan dan tersebar di seluruh Nusantara (buku "MASALAH SOSPOL DALAM PEMBANGUNAN " halaman 383). Jadi harus ada usaha untuk memperjuangkan supaya Dwifungsi Sipil segera dilaksanakan.

Disamping itu kami juga ingin mengajak jajaran mahasiswa untuk ikut memperjuangkan nasib para pekerja bebas (petani, pedagang, nelayan, seniman dll) supaya disediakan sistem pensiun yaitu dalam bentuk Tabungan Hari Tua (THT), untuk ini kami sampaikan buku "MENABUNG, DARI GELANDANGAN MENJADI AGEN KORAN DENGAN PENGHASILAN Rp 14 Juta/bulan. tentang THT hal 61. Dengan buku ini kami juga mengajak jajaran mahasiswa untuk memperjuangkan hak-hak pegawai negri dan ABRI supaya dipulihkan (hal. 98)(?-red).

Wasana kata atas perhatian dan bantuan redaksi Majalah **BALAIRUNG** sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga dengan **BALAIRUNG** tiga sasaran perjuangan itu bisa terlaksana.

M.J. Kasiyanto
Yayasan Tri Mawar
Jl. L.Arafuru 13
Jakarta 13440

DARI MEDAN MINTA INFORMASI

Salam Perkenalan,

Dalam kesempatan ini saya jelaskan bahwa saya ingin mendapatkan Majalah Mahasiswa Universitas Gadjah Mada **BALAIRUNG** Vol.I (edisi 1-8) dan Vol.II(edisi 9-15). Untuk maksud itu saya minta informasi prosedur pengiriman sekaligus pembayarannya.

Untuk edisi 16 sampai sekarang juga saya perlukan, untuk itu dalam kesempatan ini saya juga minta informasi cara berlangganan majalah tersebut.

Hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk pertama ini. Atas perhatian teman-teman saya ucapkan terima kasih.

SAFARUDDIN SIREGAR
Jl. Utama, Gang Haji Syukur, No. 97
M E D A N 20215

BALAIRUNG KAMI TUNGGU KABARNYA DI MAKASSAR

Kami ingin menjalin rasa solidaritas aktivis pers mahasiswa, terutama kami dari Indonesia Timur. Perlu kami sampaikan bahwa informasi yang aktual di seputar akademik dan sosial terutama dari Jawa sangat kami butuhkan. Oleh karena itu rekan-rekan yang berada di Jawa dapat memberi bantuan untuk memenuhi kebutuhan kami dengan saling tukar informasi melalui media kita; produk pers mahasiswa. Kami menunjuk **BALAIRUNG** untuk memulainya. Salam kami.

Aboe Hazan
Aktivis Pers Mahasiswa Makassar
UPPM "Cakrawala Ide"
Universitas Muslimin Indonesia

Ruang ini disediakan bagi pembaca untuk mengungkapkan permasalahannya, terutama menyangkut kampus UGM. Silahkan kirim surat-surat Anda ke redaksi Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281, telp. (0274) 901703

SAYA BELUM TERIMA BALAIRUNG

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saya telah mengirim uang Rp 10.000,00 untuk langganan, melalui pos wesel no. resi 06/0047113, akan tetapi sampai sekarang saya belum dikirimi majalah **BALAIRUNG**. Uang tersebut saya kirim kira-kira bulan Agustus 1995. Saya mengharapkan redaksi segera memperhatikannya.

Cukup sekian, semoga dengan ini permintaan saya segera dipenuhi. Dan semoga **BALAIRUNG** tetap eksis. Terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Iwan Hidayat
Jl. P. Roon 14-A
Compl. AL Waru
Sidoarjo, Jawa Timur

Telah kau gapai gelar Sarjana!
di Kampus Biru...

Umulukita Lusyana, S.H.
Mantan Sekretaris Perusahaan SKM BULAKSUMUR

Jajang Hernandar, S.IP.
Mantan PU SKM BULAKSUMUR

Bimo Nugroho Sekundatmo, S.E.
Manatn Ketua Departemen P & P/Staf Lithang Majalah BALAIRUNG

Raditya Jati, S.Si.
Manatn Fotografer Majalah BALAIRUNG

Mardiyah, S.Si.
Mantan Sekretaris Umum Majalah BALAIRUNG

Dewi Ratnawulan, A.Md.
Mantan Pemimpin Perusahaan Majalah BALAIRUNG

Agus Salim, S.IP.
Manatn Reporter Majalah BALAIRUNG

Suseno, S.H.
Mantan Staf Redaksi Majalah BALAIRUNG

KELUARGA BESAR BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Selamat mengarungi hidup baru:

Burhan Bariton, S.IP.
Mantan Anggota Dewan Redaksi Majalah BALAIRUNG
mempersunting
Wiwin

Abdul Rahman Ma'mun, S.Ag.
Mantan Ketua Umum BPPM UGM/PU BALAIRUNG
mempersunting
Dyah Istiarini

Drs. Haryanto Setiawan
Mantan Staf Artistik Majalah BALAIRUNG
mempersunting
Dra. Dwi Wiharyanti

KELUARGA BESAR BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA
UNIVERSITAS GADJAH MADA



BADAN PENERBIT PERS MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA **Ketua Umum** : Timbul Sunoto **Sekretaris Umum** : Rommy Fibri Herdianto **Bendahara Umum** : Andy Marhaendra Setiawan Ketua departemen Pemberdayaan Penerbitan Fakultas : Margiyono **Ketua Departemen Penerbitan Surat Kabar** : Wahyuana **Ketua Departemen Penerbitan Majalah** : Sunarto Cipto Harjono

Kampus di Jaman Modal

Jika selama ini kampus diidealkan sebagai tempat ilmu pengetahuan dan teknologi, tempat terjadinya perdebatan-perdebatan ilmiah atau tempat dilahirkannya gagasan-gagasan baru, maka ungkapan tersebut kian hari kian menjadi ilusi.

Pendidikan tinggi barangkali merupakan salah satu jenjang pendidikan yang banyak diminati saat ini hingga sekian tahun ke depan. Apa yang dikatakan sebagai penurunan jumlah, pada dasarnya hanya fluktuasi wajar. Karena toh, yang namanya sarjana sebagai sebuah "produk" pendidikan tinggi ia tetap laku.

Sarjana sebagai sebuah "produk" kampus memang mempunyai kualifikasi tersendiri. Dunia kerja bagi keluaran perguruan tinggi sudah sangat jelas, sehingga mereka tidak perlu bersusah payah menjaring pembeli. Ini berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah yang sering mengalami kekacauan dalam menejemennya. Entah karena kekurangan murid, kelangkaan guru ataupun kurangnya fasilitas fisik.

Apa yang membuat keluaran perguruan tinggi begitu besar diminati masyarakat? Pertama, telah menjadi mitos bahwa ijazah perguruan tinggi mempermudah memasuki banyak pintu dunia kerja. Sertifikat dari SMU, dianggap tidak cukup. Meskipun sertifikat sebenarnya juga tidak memberikan jaminan pada kualitas, tetapi dalam situasi terburuk, sertifikat dianggap sebagai indikator yang paling mudah untuk mengukur kualitas.

Kedua, kampus dianggap sebagai simbol status sosial bagi kelas menengah.

Hal ini bisa dikatakan sebagai faktor yang paling dominan diantara banyak faktor lain, tanpa memungkiri ada pula yang masuk kampus dengan motivasi bukan sekedar menjadi sarjana pada umumnya.

Oleh faktor yang pertama, kampus menjadi semacam tujuan strategis. Karena itulah kita bisa menyaksikan bagaimana persaingan masuk pendidikan tinggi begitu ketat, yang disertai biaya kuliah yang kian hari kian mahal saja. Sedangkan oleh faktor kedua, kampus sebenarnya merupakan wilayah bermain dari kelas menengah atau mereka yang dikategorikan "the have". Inilah yang membuat lulusan perguruan tinggi menjadi bak komoditi yang laku keras.

Dalam situasi yang demikian ini, memang menjadi sangat sulit untuk berharap banyak dari lulusan perguruan tinggi. Kampus dewasa ini terus terseret dalam kebudayaan baru yang dibentuk oleh modal, ia berwatak komersial.

Komersialisasi atas pendidikan atau khususnya kampus, tentu saja merupakan masalah bagi masa depan bangsa. Sebab ini bukan saja akan membuahkan stagnasi dalam ilmu, tetapi kampus juga hanya akan melahirkan alumni yang hanya siap mengisi dunia kerja, namun tidak pernah perduli kepada kemanusiaan dan masa depan bangsa sendiri. Hal ini terjadi karena hal-hal berikut ini.

Pertama, Kurikulum yang dibuat lebih merupakan jawaban atas kebutuhan dunia industri, bukan menjawab tantangan kemanusiaan secara luas. Inilah yang bisa menjelaskan, mengapa pembangunan fakultas-fakultas di UGM (dan perguruan-perguruan tinggi lain-red) terasa lebih diutamakan untuk yang erat kaitannya dengan dunia industri. Fakultas sastra atau ilmu dasar umumnya, merupakan contoh kongkrit bagaimana diskriminasi terjadi.

Kedua, degradasi kualitas, baik dalam materi maupun dalam metode pengajaran ilmu pengetahuan. Rendahnya upah dosen dan aparat kampus lainnya, membuat mereka lebih suka mengejar proyek atau mengajar di tempat-tempat lain. Sehingga perhatian kepada mahasiswa menjadi sangat lemah. Perkembangan intelektualitas mahasiswa telah berada di luar kepentingan dosen, sebab tugas utama dosen adalah memenuhi target birokrasi, kendati kualitas mahasiswa masih jauh dari harapan.

Ketiga, fasilitas pengajaran yang serba pas-pasan. Tidak bisa dipungkiri bahwa fasilitas pengajaran yang ada sangat jauh dari memadai. Fasilitas sangat minim, mulai dari perpustakaan, laboratorium, ruang kuliah dan ruang belajar.

Di atas kondisi yang demikian inilah, kampus memproduksi sarjana. Akibat kongkritnya kita menyaksikan bagaimana pendidikan menjadi makin elitis. Sebab dalam kondisi yang serba minim tersebut, hanya mereka yang memang mampu membayar yang akan bisa meraih kualitas pendidikan yang lebih baik. Sementara mereka yang berasal dari desa atau yang berasal dari keluarga tidak mampu menjadi sulit untuk bersaing. Inilah tantangan paling besar bagi dunia pendidikan tinggi.

Bagi para mahasiswa, persoalannya menjadi lebih sederhana. Apakah ia akan memilih duduk manis menjadi bagian dari proses komersialisasi dan elitisme dunia pendidikan ini, ataukah menghimpun diri untuk mengupayakan perubahan bagi kampus dan dunia pendidikan pada umumnya. □

Rinda Desianti

Alumnus Jurusan Antropologi FS UGM

Antara PETUALANGAN DAN EKSPLORASI

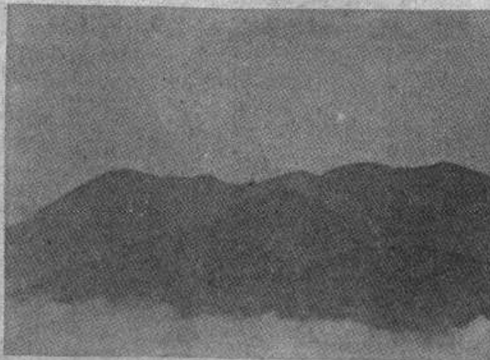
Ketika Pieter Boardman seorang pendaki gunung yang telah menjejakkan kakinya dipuncak tertinggi dunia Everest ditanya mengapa ia melakukan kegiatan mendaki gunung, maka ia menjawab dengan ringan "karena gunung ada di sana".

Alangkah mudahnya ia memberikan jawaban mengapa ia melakukan kegiatan mendaki gunung. Apakah rekan-rekan yang tergabung dalam kegiatan mahasiswa pecinta alam akan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban sesingkat itu? Atau ada jawaban maupun alasan lain yang menunjukkan bahwa ada nilai-nilai lain dari kegiatan alam bebas.

Sebagai sebuah kegiatan yang ideal di tingkat mahasiswa kegiatan kepecintaalaman universitas haruslah mempunyai aspek yang mencirikan ataupun yang membedakan kegiatannya dengan masyarakat awam.

Beberapa aspek harus ditinjau ketika seorang mahasiswa melakukan kegiatan kepecintaalaman. Aspek pertama adalah aspek olah raga. Hampir semua aktifitas kepecintaalaman merupakan rangkaian gerakan olah raga, seperti hiking, panjat tebing maupun arung jeram. Aspek kedua adalah aspek hiburan. Bermain di alam seperti mendengar kicau burung atau menghirup udara yang belum terpolusi dapat memberikan hiburan dan kenikmatan tersendiri. Aspek ketiga adalah aspek ilmiah. Kegiatan kepecintaalaman berhubungan langsung dengan alam. Sehingga kegiatan kepecintaalaman dapat membantu telaah-telaah bidang ilmiah, eksplorasi ilmiah, seperti seorang mahasiswa biologi akan dapat menjumpai tumbuhan yang belum ditemui orang lain dengan berjalan-jalan di alam terbuka, ataupun seorang mahasiswa geologi akan melihat secara langsung gejala-gejala vulkanik ketika mendaki gunung berapi. Bisa juga terjadi seseorang melakukan kegiatan ilmiah dengan topik yang sangat berbeda dengan fakultas atau disiplin ilmu yang ia tekuni di universitas, seperti mahasiswa bidang eksak dapat melakukan pendataan *foklor* di suatu daerah.

Perbedaan mendasar yang terjadi antara mahasiswa pecinta alam (MAPA) dengan pecinta alam biasa adalah aspek ilmiahnya. Ketika MAPA melakukan ekspedisi ke tempat-tempat terpencil maka selain aktivitas petualangan yang dibarengi aspek olah raga dan hiburan maka aspek ilmiah haruslah menjadi aspek tambahannya, seperti melalui penelitian- penelitian yang dapat dilakukan di lokasi ekspedisi. Penulis sendiri tidak mengklaim bahwa jika sebuah organisasi MAPA tidak melakukan kegiatan ilmiah maka ia tidak layak menjadi organisasi MAPA. Walaupun itu banyak terjadi !!

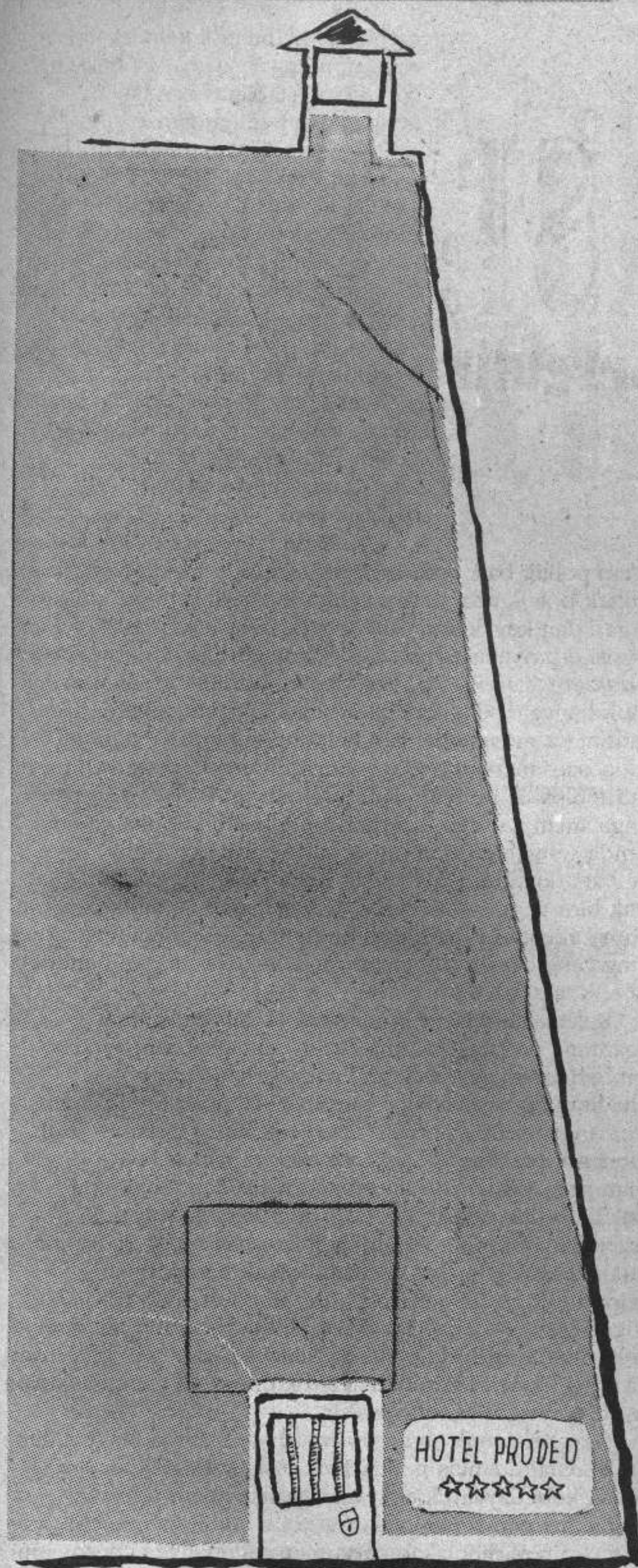


Sebenarnya apa yang menarik dari kegiatan kepecintalaman ini? Bagi seorang pemula jenis kegiatan ini sebagai tempat untuk bermain dan untuk lebih mengenal alam terbuka. Sampai tahap ini biasanya para pemula hanya berfikir bagaimana bisa bermain di alam terbuka. Dan setelah beberapa lama bermain, barulah timbul kesadaran bagaimana untuk menjaga dan melestarikan tempat bermain tersebut. Maka kegiatan selanjutnya bukanlah sekedar untuk bermain, melainkan juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk pelestarian alam, seperti penghijauan dan lain-lain.

Hikmah atau pelajaran apa yang diperoleh dari kegiatan kepecintalaman ini? Seorang Soe Hok Gie pernah menulis *"Seorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya. Dan mencintai tanah air Indonesia dapat ditumbuhkan dengan mengenal Indonesia bersama rakyatnya dari dekat, karena itulah kami naik gunung."* Atau Norman Edwin, salah satu pendaki kawakan Indonesia yang tewas di Gunung Acouncagua Amerika Selatan, mengatakan bahwa *"Dahulunya saya adalah orang yang sangat minder dan kurang percaya diri, kepercayaan diri saya tumbuh setelah saya mengikuti petualangan-petualangan yang menegangkan. Sekarang saya tidak pernah merasa rendah diri."* Teman MAPA lainnya berkomentar *"Saya berkegiatan alam bebas karena saya dapat bertemu dengan banyak orang dan mendapat banyak teman, saya hanya ingin menyalurkan kesenangan saya jalan-jalan"*. Apakah jawaban itu syah? Rasanya tidak ada suatu jawaban yang pas dan memuaskan semua orang ketika ditanya apa yang ia peroleh ketika ia berkegiatan alam terbuka.

Sekarang terpulang pada diri kita sendiri untuk melakukan aspek yang akan dikerjakan dan hikmah yang akan diperoleh dari kegiatan kepecintalaman ini. □

Ferri Iskandar
Staf Litbang MAPAGAMA periode 1994/1996


HOTEL PRODEO
☆☆☆☆☆
LOE FOE
NOV 95


MEREKA CUKUP BAIK HATI, KOQ. MEMBERI KAMI KENANG-KENANGAN INI...
MANTAN TAPOL-NAPOL



DEMOKRASI:
Kekuasaan yang Dibiarkan Bergulir



DELAPAN *puluh sembilan tahun yang lalu, Lord Acton dalam bukunya* **Essays on Freedom and Power** *mengingatkan kita akan satu watak kekuasaan yang hakiki. Menurutnya setiap kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk korup : Power tends to corupt, kekuasaan itu serakah dan cenderung menyeleweng. Sejarah kekuasaan memang tidak pernah merangkai sejumlah kisah tentang kebajikan. Yang ada adalah sejumlah drama tentang ketamakan, cerita tentang berbagai usaha mempertahankan diri. Kecenderungan pada status quo sudah menjadi hukum besi setiap kekuasaan.*

Persoalannya kemudian adalah bagaimana kekuasaan diperoleh dan mempertahankan dirinya. Dalam sejarah, kekuasaan pernah melahirkan para diktator, raja-raja absolut dan para tiran. Akar penyebabnya adalah tiadanya kontrol atas kekuasaan ketika ia digenggam erat dalam katupan tangan. Tidak seorang pun dibiarkan meliriknya apalagi menyentuhnya.

Dihadapan lukisan kekuasaan seperti ini bergulir sebuah pertanyaan sederhana namun teramat urgen : Bagaimana membuat kekuasaan bisa dikontrol dan dimiliki banyak orang?

Demokrasi adalah jawaban yang disodorkan terhadap pertanyaan itu. Demokrasi, seperti muatan makna etimologisnya, mensyaratkan bahwa rakyatlah yang berdaulat, yang empunya kekuasaan. Pemerintah, seperti lazim ditulis dalam banyak buku teks ilmu politik, adalah institusi yang dipercayakan untuk memanajemen kekuasaan yang dimiliki rakyat untuk kemaslahtan banyak orang. Kekuasaan harus dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat. Tidak ada demokrasi tanpa berlangsungnnya suatu mekanisme pertanggungjawaban (*accountability*) para pemimpin yang dipilih kepada para pemilihnya. Maka, secara teoritis, bila kekuasaan itu disalahgunakan dalam percaturan politik yang tak terkendali, rakyat mempunyai hak sekaligus kewajiban untuk mengambilnya kembali.

Identitas demokrasi yang ideal, tulis Charles F. Andrain, bertumpu pada *kesatuan dalam keanekaragaman.* Pluralitas dan penghargaan terhadapnya, dengan demikian, adalah sebuah prasyarat bagi keberlangsungan bangunan demokrasi. Dalam artian yang lebih luas, pluralitas menjadi syarat bagi kontinuitas sebuah sistem politik. Hakikat sebuah sistem pemerintahan yang mengibarkan panji demokrasi adalah pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan baik kultural, politik maupun ideologis yang dimiliki segenap anggotanya. Tanpa pengakuan akan hal ini, juridis formal maupun secara praktek politik, demokrasi hanyalah sebuah nama mati. Tanpa keanekaragaman dan penghargaan atasnya, kekuasaan akan menjadi tirani, dalam mana para pemimpin akan menindas kelompok-kelompok lain dengan mengatasnamakan hukum, ketertiban, stabilitas dan tak ketinggalan pembangunan.

Sebuah sistem politik yang menutup diri bagi perbedaan sikap politik, termasuk oposisi politik sekali pun, akan kehilangan relevansinya. Sistem politik akan mengalami krisis legitimasi, kehilangan daya otoritasnya yang substantif dan dalam situasi seperti ini, pemerintah tak lebih dari kumpulan para bandit yang menyebalkan. Rakyat banyak menjadi apatis, cenderung membelakangi kehidupan politik dan kadang menertawakannya sambil berbisik-bisik.

Kehadiran oposisi dalam sebuah sistem politik baik secara juridis-formal maupun pada dataran praktek politik adalah prasyarat mendasar sebagai artikulasi pikiran dan keyakinan politik yang berbeda-beda. Kehadiran oposisi diproyeksikan sebagai kekuatan pengontrol, *check and balance of power*. Masa depan Indonesia terlalu mahal untuk hanya diserahkan pada segelintir orang, yang pada suatu masa mengendalikan kehidupan negara. "Republik Indonesia," mengutip Gunawan Muhamad, "bukanlah meja putih polos. Ia punya sejarah. Ia punya 180 juta endapan pengalaman, taruma, harapan yang batal. Ia bukan cuma agenda sebuah lapisan orang yang berkuasa. Dan pembangunan bukanlah jalan lurus yang tinggal mengikuti cetak biru yang sudah serba di atas meja." Untuk itulah kita butuh kekuatan yang bisa mengontrol pemerintah. Kita butuh orang yang berdiri di pinggir meja kekuasaan dan berteriak: Awas! Kita salah arah!

Kekuasaan bukan perkara kemauan baik, yang tergantung pada aktor. Kita butuh sebuah sistem yang memberi topangan struktural pada kehadiran oposisi. Kehadiran oposisi sebagai satu institusi politik menandai kematangan sebuah praktek berdemokrasi. Dalam sejarah Indonesia, praktek oposisi bisa dilacak *genesis*nya pada jaman pergerakan. Ide ini sebetulnya sudah tercermin dari gerakan politik non-kooperasi yang dilakukan kaum pergerakan. Dijaman Jepang gerakan bawah tanah Sjahrir adalah bentuk lain dari oposisi, baik terhadap Jepang maupun terhadap Soekarno, yang dituduh berkolaborasi dengan "Saudara Tua" itu. Dalam masa revolusi fisik, seperti ditulis oleh Syamsuddin Haris, kelangsungan Republik Justru bisa dijaga karena perubahan struktur politik yang dilakukan atas desakan golongan oposisi.

Dengan demikian argumentasi yang menolak kehadiran oposisi dalam pentas politik Indonesia karena tidak sesuai dengan kebudayaan kita layak dipertanyakan referensi historis maupun sosiopolitisnya. Jelas ada kepentingan yang tersimpan rapi dibelakang argumentasi relativitas budaya ini.

Persoalan oposisi, yang berujung pada kisah tapol/napol, bukan gagasan baru. Beberapa waktu yang lalu ia sempat menjadi topik utama perbincangan politik kita. Namun seperti biasanya perdebatan seperti ini lebih berbau politis dan berakhir tanpa kejelasan. Bila **BALAIRUNG** kembali mengangkatnya sebagai laporan dengan pintu masuk Tapol/Napol itu dilandasi sebuah pertimbangan bahwa relevansinya semakin signifikan dan mendesak dalam sistem politik kita, bagi masa depan kehidupan politik yang lebih baik.

Fransiskus Soerdiasis

Tahanan Politik Orde Baru

DARI TUDUHAN EKSTRIM KIRI SAMPAI KANAN

Diseputar tahun 1960-an ketika usia sudah mencapai kepala 6, konon Presiden Soekarno dihinggapi perasaan cemas. Ia merasa revolusi Indonesia stagnan. Padahal revolusi yang mulai berkobar pada 17 Agustus 1945 belumlah selesai. Revolusi harus berjalan terus selama tujuannya belum tercapai



NAMUN apa lacur, Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 1959 untuk mengakhiri ketidakberesan politisi sipil dalam mempraktekkan demokrasi liberal juga tidak menolong. Bahkan dekrit menimbulkan kevakuman politik. Saat itulah, pada 22 Juli 1959 untuk pertama kalinya, Indonesia mempunyai peraturan hukum bernama Penetapan Presiden (Penpres) yang mengatur segara dibentuknya DPR sebagai pengganti konstituante.

Penpres dianggap sebagai salah satu hukum revolusi. Tidak lama kemudian setelah muncul konsep demokrasi dan ekonomi terpimpin. Keluarlah PNPS No. 11/1063 yang terkenal sebagai UU subversi. Produk hukum ini sengaja diciptakan sebagai "alat" untuk " menghalalkan segala cara" mencapai tujuan revolusi dan sebagai cara menggebug lawan-lawan politiknya. Maksudnya, setiap orang yang tidak menghendaki susunan masyarakat "Sosialisme Indonesia" berdasar ajaran Manipol dengan demokrasi terpimpinnya maka menurut Penpres ini, mereka digolongkan pada anasir-anasir subversi yang dapat dikenakan "tindak pidana subversi".

Uniknya, penpres produk orde lama itu akhirnya dioper dan dipakai oleh pemerintah orde baru. Padahal berdasar TAP MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif diluar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945, produk berbentuk penpres itu harus ditinjau kembali. Penpres itu tidak dicabut, karena bagi orde baru ternyata penpres itu berguna sebagai alat untuk menggebug sisa-sisa pelaku G30S/PKI. Sejarah membuktikan bahwa penpres itu akhirnya juga memangsa korban yang banyak, bukan hanya PKI, tetapi juga dari kalangan Islam atau gerakan sparatis. Dan pada masa orde baru, tahanan politik atau narapidana politik menjadi istilah yang sering dipakai untuk menggebug lawan-lawan politiknya.

Menurut **Prof. Dr. Ichlasul Amal**, istilah Tapol-Napol itu khas orde baru. "Di masa orde lama, Mochtar Lubis atau Natsir pernah ditahan Soekarno, tetapi mereka tidak disebut Tapol-Napol", Staf pengajar Fisipol UGM ini lebih lanjut melihat kontradiksi dari batasan Tapol- Napol. Tidak ada batasan yang jelas dan kriteria yang pasti seseorang disebut Tapol-Napol. "Pengadilan pidana politik itu sebenarnya tidak ada. Pengadilan

REPRO-TIARA



H.C.J. Princen

hanyalah mengadili perkara kriminal. Keyakinan politik itu sendiri tidak dapat diadili. Tetapi kalau keyakinan itu diwujudkan dalam suatu tindakan yang merusak, maka tuduhan itu yang harus diadili",tambahnya.

H.J.C. Princen bahkan menilai konstitusi kita sebenarnya bukan hanya melindungi keyakinan politik, tetapi juga tindakan politik sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. "Jika seseorang ditahan atau dihukum karena tindakan politiknya, itu lebih karena sifat tindakan itu, misalnya ia menggunakan kekerasan, hendak membunuh presiden, dan bukan karena hakekat keyakinan politiknya",ujar Princen. Maka bagi direktur Lembaga Pembela Hak-hak Asasi ini, istilah Tapol-Napol sebenarnya tidak dikenal dalam sistem politik dan hukum Indonesia. Setiap negara, lanjut Princen, memang berhak untuk menjaga dirinya dari usaha-usaha yang bermaksud untuk meruntuhkan negara serta menjajah negara dan bangsa. Karenanya adalah wajar apabila negara membuat seperangkat aturan yang bersifat preventif dan represif mengenai bahaya yang mengancam kelangsungan hidupnya. Tetapi persoalannya apakah auran-aturan itu tidak mengekang demokrasi dan hak asasi manusia. "Nyatanya di Indonesia kekuasaan negara sedemikian besarnya, dan dapat memaksakan kehendaknya sehingga menghambat demokrasi", tambahnya.

Sistem Politik Orde Baru

Fenomena kemunculan Tapol-Napol sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem politik orde baru secara keseluruhan. Meskipun PKI dan para pendukungnya berhasil disingkirkan setelah kegagalan perebutan kekuasaan oleh G30S/PKI, namun kekhawatiran akan terjadinya konflik politik yang tajam masih tetap saja ada. Yang paling dikhawatirkan oleh pemimpin orde baru adalah munculnya konflik-konflik "ideologis" seperti masa sebelumnya, terutama yang berasal dari ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Setiap orang atau golongan yang tidak mematuhi aturan yang telah digariskan dapat dikenakan sebagai tahanan/narapidana politik.



Oei Tjoe Tat

Sampai tahun 1970-an, isu yang paling menonjol adalah mengenai PKI. Menurut catatan Amnesti Internasional, sebanyak 1.014 orang yang sempat ditahan berkenaan dengan G30S/PKI. Dari jumlah itu hampir 50% telah dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Dan dari sekitar 400 perkara yang telah diputuskan di pengadilan, kira-kira 150 orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Data terakhir menunjukkan bahwa jumlah terhukum mati sebanyak 67 orang. Dari jumlah itu yang sudah dieksekusi sebanyak 18 orang, yang telah diubah --menjadi seumur hidup, 20 tahun atau dibebaskan-- sebanyak 3 orang. Sehingga yang tersisa dan menunggu perkembangan ada 46 orang.

Menjelang tahun 1980-an muncul tapol dari kalangan Islam. Kemunculan tapol ini tidak dapat dilepaskan dari kekhawatiran pemimpin orde baru akan kemunculan kelompok-kelompok Islam radikal. Kelompok ini dicurigai akan menggunakan sentimen agama sebagai daya tarik dalam menuntut berbagai hal yang akan menonjolkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengganggu pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Masa-masa ini adalah masa rekayasa besar-besaran terhadap organisasi masa dan kelompok Islam yang menyebabkan letupan-letupan dalam masyarakat. Buktinya, muncul penentangan yang kemudian disertai dengan penangkapan dan penahanan. Menurut catatan Panjimas, secara acak sejak 1985 sampai 1987, tercatat 180 narapidana politik Islam terpuruk di dalam ruang sempit sel penjara. Berbagai kasus muncul dari sini.



Brigjend. Roekmini Koesoemo Astoeti

Mulai dari usroh, Darul Islam, Tanjung Priok, Komando Jihad, Penyebaran selebaran gelap, LP3K, kuthbah, mencuri bahan peledak, peledakan gedung BCA, Talang Sari Lampung, dan berbagai kasus lain. Selain yang telah dibebaskan, kini sekitar 30 orang masih meringkuk di lembaga pemasyarakatan dengan masa tahanan --sebagian-- seumur hidup untuk mereka yang berunsur komando jihad dan sebagian lagi antara 18 tahun hingga 20 tahun bagi mereka yang gerakannya dikenal dengan komando jihad, Lampung, GPK Aceh, dan aksi bom bis Pemuda di Malang.

Selain Tapol dari G30S/PKI dan Islam, yang juga banyak adalah tapol dari gerakan sparatis. Dari catatan Amnesti Internasional, ada 80-an orang yang ditahan. Mulai dari Gerakan Aceh Merdeka sebanyak 24 orang yang rata-rata dipenjara seumur hidup, 20 tahun sampai 6 tahun, Gerakan Papua Merdeka sebanyak 16 orang yang kebanyakan seumur hidup dan penjara 6 hingga 12 tahun. Sedang lainnya dari Gerakan Timor-Timur Fretilin. Akhir-akhir ini kita justeru melihat munculnya Tapol dari jenis baru. Yakni mereka yang berasal dari mahasiswa, aktivis hak asasi manusia, gerakan pro demokrasi ataupun dari gerakan buruh.

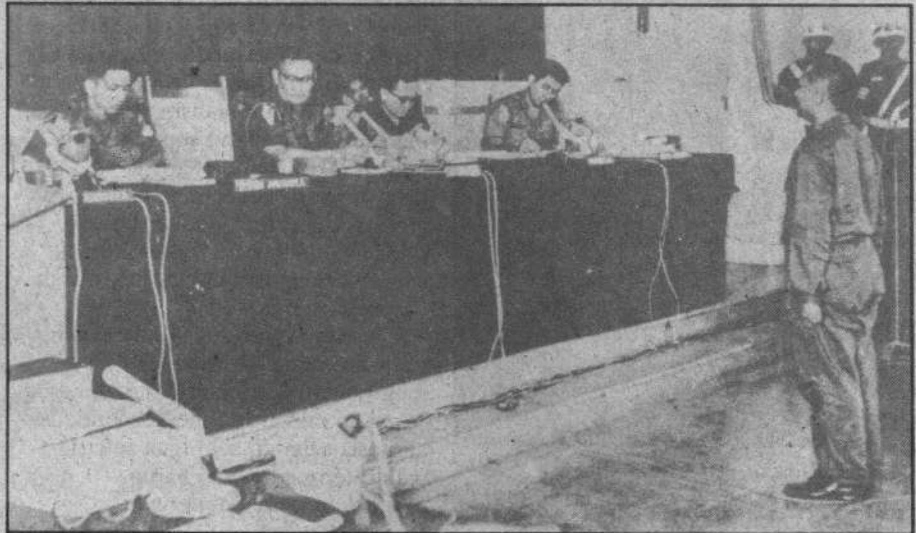
Secara keseluruhan, menurut data yang diperoleh **BALAIRUNG** dari Yayasan Penghayat Keadilan, ada 263 tahanan politik di seluruh Indonesia. Angka ini belum termasuk yang ditahan diberbagai rumah tahanan militer di Irian Jaya, Timor Timur, Aceh dan Lampung. Dari jumlah itu sebagian diantaranya telah berusia lanjut dan sakit-sakitan.

HEGEMONI NEGARA

Tapol-Napol berbeda dengan tahanan/narapidana perkara kriminal biasa. Karena kasusnya adalah politik, maka dasar yang membuat mereka ditahan atau dipidana tidak dapat dilepaskan dari alasan-alasan politis tertentu. Selama ini yang dituduhkan kepada mereka adalah bahwa mereka hendak menggulingkan pemerintahan yang syah atau mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Dari mantan tapol-napol yang berhasil dihubungi **BALAIRUNG** yakni Oei Tjo Tat, Pramudya Ananta Toer, HCJ Princen, Oemar Dhani, A.M. Fatwa, H.M. Sanusi --kesemuanya menolak tuduhan itu.

A.M. Fatwa misalnya mengingatkan agar dalam menilai Tapol Islam harus dikaitkan dengan peristiwa politik yang melingkupinya waktu itu. Peristiwa politik masa itu, menurut Fatwa, memang menyudutkan kepentingan muslim. Dan hal-hal itu yang melahirkan keberanian menentang(*lihat: Seputar Tapol Islam*).

Pramoedya bahkan lebih pedas, menilai bahwa para tapol itu dijebloskan ke penjara kebanyakan tanpa melalui suatu proses pengadilan. "Saya sendiri mengalaminya. Ditahan selama 14 tahun. Sampai sekarang tidak ada tuduhan dan pengadilan apa-apa bagi saya. Salah saya apa. Tahu-tahu saya diambil lalu dipenjara", ujarnya. Bagi Pram, keadaan waktu itu memang diwarnai oleh pertentangan ideologi yang tajam dan saling berhadap-hadapan. "Saya dituduh LEKRA, padahal di LEKRA saya hanya anggota kehormatan. Saya bukan orang organisasi. Terus mengenai realisme sosialis dapat saya jelaskan begini. Saya sebetulnya tidak tahu banyak. Waktu itu saya disuruh berbicara di Universitas Indonesia tentang realisme sosialis. Dari literatur di perpustakaan saya, saya susun makalah mengenai hal itu. Saya hanya menulis paper, karena memang diminta berbicara mengenai hal itu. Lantas orang lalu menuding saya menyebarkan ajaran realisme sosialis. Itu bukan garis LEKRA", tambahnya.


REPRO: 30 TAHUN INDONESIA MERDEKA

Pengadilan terhadap diri pelaku G30S/PKI
Kiri dan kanan sama saja


REPRO: TIRAS

Subandrio

Oei Tjoe Tat, bekas menteri dalam pemeritahan Soekarno, yang ditahan karena dituduh melakukan coup terhadap Soekarno, bahkan balik bertanya. "Siapa pun tahu bahwa saya dikenal sebagai salah satu pengikutnya, sebagai *fellow travellernya* yang setia. Lantas sungguh aneh kalau kemudian saya dituduh melakukan subversif terhadap pemerintah Soekarno dimana saya termasuk salah seorang anggota kabinetnya. Apakah dengan ini yang mau dicapai adalah mendiskreditkan Soekarno, dimana saya termasuk pengikutnya? Rasanya terlalu janggal pula". Bagi Oei Tjoe Tat, yang justru lebih menggelisahkan adalah nasib ribuan orang yang ditahan, dibuang ke Pulau Buru, padahal mereka tidak tahu menahu tentang politik masa itu.

Selama ini negara yang menafsirkan sejauh mana seseorang terlibat dalam tindakan subversi. Dalam kasus Tapol- Napol sparatis, selama ini yang dituduhkan adalah gerakan makar yang hendak lepas dari wilayah Indonesia. Sama sekali tidak disinggung kesalahan pemerintah yang menyebabkan timbulnya gerakan atau tindakan semacam itu. Colin Mc Andreas, lewat bukunya **Central Goverment and Local Development in Indonesia**(1986) misalnya, melihat kemunculan gerakan sparatis itu sebagai letupan perasaan tidak puas terhadap pemerintah pusat "Janji-janji kemakmuran tidak juga muncul. Apalagi adanya jurang yang lebar antara daerah dan pusat atau kebijakan yang merugikan daerah. Hal ini menyebabkan kekecewaan yang berpuncak pada gerakan radikalisasi. Maka penanganan gerakan ini jangan hanya melihat kebijakan-kebijakan yang selama ini turut menciptakan ketegangan", tulis Mc. Andreas.

TRAUMA NASIONAL

Tragedi politik 1965, demikian juga peristiwa Lampung, Tanjung Priok, GPK Aceh, Timor Timur telah menoreh "luka" yang mendalam bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Garis persaudaraan, kekerabatan, pertetanggaan, pertemanan acapkali renggang karena perbedaan politik. Bahkan dampaknya terus membekas hingga kini, bukan hanya pada mantan tapol/napol saja, tetapi juga pada keturunan mereka. Bahkan isu ini terus-menerus diperkuat oleh penguasa. Lihat saja kebijakan litsus(Penelitian Khusus) dan "keterpengaruhan" yang digunakan untuk meneliti sejauh mana seorang warga negara terutama keturunan



Ismail Hasan Metaerum

mantan tapol/napol "bersih secara ideologis" apabila hendak menjadi pegawai negeri, tentara dan anggota perlemen. Kebijakan semacam ini secara eksplisit menerapkan bentuk "sanksi kolektif", karena seseorang dicurigai atau dipersalahakan hanya kebetulan lingkungan atau kerabatnya pernah terlibat kegiatan politik yang berlawanan dengan pemerintah. Sedangkan hukum yang berlaku secara jelas dan tegas menyatakan pidana hanya bisa dikenakan pada si pelaku.

Oemar Dhani yang pernah ditahan karena terlibat G30S/PKI kepada **BALAIRUNG** mengungkapakan efek penahanannya pada kehidupan keluarganya. "Anak saya mau masuk pegawai negeri susah. Bahkan untk pacaran saja susah. Anak saya (sembari menunjuk anak laki-lakinya) putus pacaran gara-gara mertuanya malu, bapaknya pernah terlibat PKI. Ya sepertinya kita ini kok harus selalu dikasihani ", ujarnya. Oemar Dhani tidak sendirian. Banyak kasus dapat disebut. Seperti surat pembaca DeTIK (No. 30/5 Oktober 1993) tentang pernikahan dengan calon suami seorang ABRI yang gagal. Setelah pihak suami mengetahui calon isterinya anak seorang eks tapol kemudian membatalkan pernikahan tersebut.

Pengalaman traumatik kita dengan Peristiwa tanjung Priok, Madiun, DI/TII, PRRI/Permesta, Peristiwa Dilli dan sebagainya, terus menerus dihidupkan lewat memori. Para pejabat selalu melontarkan "bahaya komunisme" atau "bahaya fundamentalisme Islam" dalam retorika politiknya. Bahwa komunisme atau fundamentalisme itu masih tetap kuat dan karena itu harus tetap diwaspadai sebagai bahaya laten. Dan kekejaman komunis PKI, radikalisme Islam selalu diulang-ulang supaya orang jangan lupa. Namun sangat disayangkan "kekejaman jenis baru" terus berlangsung, seolah bukan peristiwa yang patut diperhatikan seperti penggusuran hak-hak buruh dan sebagainya.

Tentang reproduksi bahaya yang terus menerus ini Princen mempunyai komentar yang menarik. "Apakah rakyat Indonesia menderita amnesia sejarah, sehingga setiap waktu terus-menerus harus diingatkan? Padahal dengan terus-menerus mengulang memupuk dendam dan membuat sebagian anggota masyarakat larut dihimpit rasa bersalah, rendah diri dan akhirnya tidak dapat mengembangkan diri secara wajar," ungkap Princen.

REKONSILIASI NASIONAL?

Pertanyaan kemudian, mungkinkah dilakukan rekonsiliasi nasional, dengan memberi hadiah amnesti kepada para tahanan politik? Princen, secara tegas menghendaki terjadinya rekonsiliasi, dimana sudah waktunya pemimpin sekarang memaafkan "dosa-dosa politik" para lawan politiknya.

Sebagai bangsa yang berprikemanusiaan sudah seharusnya memberi hukuman yang tidak melewati batas ketahanan seseorang. Berikanlah kesempatan kepada mereka untuk meninggal secara tenang dirumahnya sendiri. Dan dikelilingi oleh orang-orang yang mereka cintai", tuturnya.

Tetapi bagi **Ismail Hasan** Mataerum, isu rekonsiliasi terhadap para tapol napol itu dinilai sebagai salah alamat. Menurut wakil ketua DPR dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini, tidak perlu ada rekonsiliasi, sebab tidak ada perpecahan."Rekonsiliasi antara siapa dengan siapa. Yang benar adalah sikap maaf-memaafkan. Namanya silaturahmi. Jangan samakan dengan tapol. Ujungnya silaturahmi antara individu dengan individu", tambahnya.

Brigjend. Roekmini Koesoema Astuti punya pandangan lain. Bagi anggota komisi Komnas HAM ini, rekonsiliasi terhadap para tapol/napol tidak penting, yang justru lebih mendesak adalah pembenahan terhadap sistem politik. "Adanya tapol/napol itu karena mereka mau mengubah sistem Pancasila. Pancasila yang kita anut itu sudah sempurna. Kalau sekarang ada penyimpangan bukan sistemnya yang salah tetapi mekanisme dan orang-orangnya yang salah" katannya. Karenanya, lanjut Roekmini mekanisme itu harus dibetulkan, bukan dengan mengganti sistemnya.

Dari sudut politik, pembebasan tapol-napol, jelas merujuk kepada pemberian amnesti. Disini ada pengampunan dari presiden untuk meniadakan penuntutan hukum terhadap sekelompok atau beberapa orang yang terlibat dalam satu peristiwa yang menurut hukum negara bersifat pidana. Jadi segala tuntutan terhadap kelompok orang itu dihapuskan, yang didasarkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau presiden sebagai pemilik hak prerogatif. Dalam seminar mengenai tapol yang diselenggarakan oleh MIK (Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan), **Marzuki Darusman**, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengungkapkan kesulitan pemberian amnesti ini. Menurutnya pemberian amnesti bertalian erat dengan suatu tujuan untuk menciptakan kondisi politik baru. Undang- undang tentang amnesti dan abolisi tahun 1954 juga menegaskan bahwa hal ini dapat dilakukan presiden atas dasar kepentingan negara. Pertanyaannya, atas dasar kepentingan negara yang bagaimana pada saat ini sehingga anjuran amnesti dianggap perlu diberikan? Dengan demikian pemberian amnesti sukar dilakukan karena menandung konsekuensi pertanggungjawaban politik oleh presiden.

Marzuki Darusman mengusulkan amnesti dapat diberikan kepada napol yang tidak secara langsung bertanggungjawab atas timbulnya perbuatan tindak pidana keji yang berlatar belakang situasi dan kondisi politik tertentu. Pembebasan dengan cara lain adalah atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Secara hukum, cara ini tidak dilakukan melalui amnesti tetapi grasi dan perlakuan secara khusus. Hal ini yang telah diperjuangkan oleh banyak kalangan.

Eriyanto

Narto, Prabowo, Agus, Rosyadi, Abid, Frans,Aris

TAHANAN POLITIK ISLAM :

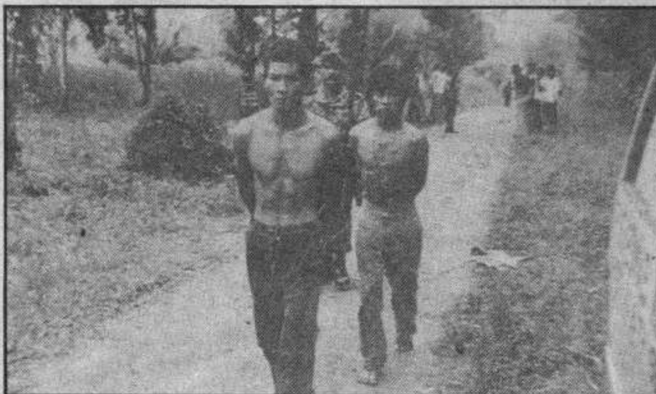
Ketika Pendulum Politik Tidak Condong ke Kanan

Dalam diskursus Tahanan-Narapidana Politik, Tahanan Politik Islam menempati posisi yang unik. Selama ini, pemerintah selalu menghembuskan isu fundamentalisme Islam atau Islam Radikal sebagai sebuah gerakan untuk mendirikan negara Islam atau mengganti ideologi Pancasila dengan Islam.



MAKA tidak mengherankan jika tapol-napol dari kalangan Islam, mewarnai sejarah perpolitikan Indonesia mulai dari jaman Daud Beureueh di Aceh, DI/TII di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi, terus berlanjut ke GPK di berbagai daerah. Kemudian berbagai aksi berupa pemboman, pengrusakan, pembajakan yang semuanya berintikan sama--mendirikan negara Islam. Yang menjadi pertanyaan, betulkah mereka memang hendak mendirikan negara Islam ataukah itu semua hanya rekayasa pemerintah yang ditujukan untuk memojokkan Islam?

Secara acak sejak 1985 sampai 1987, tercatat 180 napol Islam terpuruk di dalam sel penjara. Berbagai kasus muncul dari sini. Mulai dari usroh, Darul Islam, Tanjung Priok, Komando Jihad, penyebaran selebaran gelap, LP3K, Kuthbah, mencari bahan peledak, Peledakan gedung Bank Central Asia (Jakarta), Pengeboman di Jawa Tengah (Candi Borobudur), Kelompok Imron dan Talang Sari Lampung (selengkapnya lihat tabel). Sejauh ini, dari data yang berhasil dikumpulkan **BALAIRUNG** tercatat, hukuman paling tinggi ada 18 orang. Abdullah Umar dan Bambang Siswoyo --keduanya terlibat kasus Komando jihad di Sleman, Yogya dikenai hukuman mati--; Abdul K Ali Al Habsyi di Malang, Simpong Abdul Malik di Surabaya, Akhmad M di Jawa Tengah, Salim K Binti Sulaeman di Jakarta sama-sama dikenai hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan Timsar Zubil di Medan, M Sudiarta di Sleman, M. Achwan dan Akhmad M di Malang harus menerima ganjaran pidana seumur hidup. Termasuk 8 kasus Lampung yang dihukum seumur hidup di Nusakambangan dan beberapa di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta.



GPK Way Jepara Lampung(Warsidi)
Pasang surut hubungan Islam dan negara

Tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada mereka, bahwa mereka hendak mengganti ideologi Pancasila dan bermaksud mendirikan negara Islam. Tetapi Masdar F Mas'udi, intelektual Islam asal "pesantren" ini cepat-cepat menangkis tuduhan itu. Tuduhan semacam itu menurut Masdar harus *clear* lebih dahulu. "Kalaupun memang ada gagasan atau ide untuk mengganti Pancasila dengan islam, maka cara yang dilakukan pemerintah bukanlah dengan jalan kekerasan apalagi dengan penahanan militer. Itu hanya warna sebuah pemikiran yang harus dilawan dengan wacana pula", ujarnya. Suatu negara, lanjut Masdar, tidak mempunyai hak untuk memberangus pikiran pribadi, asal tidak melecehkan yang lain. Keyakinan itu hak individu, dan kalau ada tindakan haruslah terhadap manifestasi sosialnya, bukan dengan menindas keyakinannya.

Lebih lanjut Masdar berpendapat, bahwa bahaya "fundamentalisme" atau Islam radikal selama ini terlalu dibesar-besarkan. A.M Fatwa, salah seorang yang terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok, menilai bahwa pada hakekatnya kelompok radikal Islam seperti DI/TII, kelompok Imron, pada awalnya mempunyai tujuan mulia. Namun mereka terpancing oleh *move-move* politik dengan melakukan tindakan politik. "Karena mereka tidak punya pengalaman politik, merekalah yang menjadi korban. Meskipun mereka membawa-bawa Islam, namun justru tindakannya merugikan Islam",ujar Fatwa.

Lebih jauh, Fatwa menilai peristiwa-peristiwa politik Islam itu harus dilihat secara kontekstual dengan mengkaitkannya dengan kondisi sosio-politik yang ada saat itu. Kebanyakan tapol Islam itu lahir pada masa 1984-1989, suatu masa

KASUS TAHANAN POLITIK/NARAPIDANA POLITIK ISLAM

No.	PERKARA	JUML.TERHUKUM	HUKUMAN YANG DIJATUHKAN
1.	GPK Lampung (Warsidi)	19	Mati, Seumur Hidup, Penjara 6-12 tahun penjara, Bebas
2.	DI/TII	11	Penjara 1 - 14 tahun
3.	Komando Perang Wilayah Sumut	1	Penjara 10 tahun
4.	Negara Islam Indonesia	21	Seumur hidup, Penjara 3 - 20 tahun
5.	Pembajakan Woyla, Kelompok Imron dan Cicendo	10	Mati, Penjara 3 - 20 tahun
6.	Kasus Sawito	1	Penjara 8 tahun
7.	Tanjung Priok	35	Penjara 1 - 20 tahun
8.	Pemboman BCA	8	Penjara 1 - 10 tahun
9.	Pemboman Borobudur dan Bus Pemuda di Jawa Timur	5	Penjara 8 - 20 tahun
10.	Komando Jihad	21	Mati, Seumur hidup, Penjara 4-18 tahun
11.	Kutbah SARA, Rencana peledakan dan pembunuhan	6	Penjara 2 - 7 tahun
12.	Mendirikan Jama'ah terlarang	23	Penjara 1-14 tahun
13.	Usroh	2	Penjara 9-12 tahun
14.	Peledakan Masjid Nurul Iman	3	Penjara 15-20 tahun
15.	Pengerusakan dan pembakaran di Sumbawa	5	Penjara 3,5-6 tahun

** data diolah dari berbagai sumber di bagian litbang Majalah* BALAIRUNG

LAIS ABID

dimana hubungan antara Islam dan pemerintah mengalami ketegangan hebat. "Tapol Islam itu kan hanya bersifat riak- riak kecil dan ada juga yang mengatakan bahwa persitiwa itu merupakan suatu peristiwa politik bernuansa Islam atau peristiwa agama yang bernuansa politik", jelas Fatwa. Banyak dari kasus yang terjadi disebabkan terpancing karena memang dipancing. Peristiwa politik yang bernuansa agama dan kadang diekspresikan lewat kekerasan dimaksudkan untuk mendiskreditkan Islam.

Fatwa bahkan menuduh kelahiran kelompok tersebut sebagai bagian dari strategi Ali Murtopo (menteri penerangan kabinet pembangunan III). Ia memberi contoh kelahiran Komando Jihad, menyusul munculnya kelompok H. Ismail Pranoto (Hispran) yang terang-terangan menamakan dirinya Komando Jihad. Bersama kelompoknya, Hispram melancarkan teror dan aksi peledakan di berbagai tempat, seperti Padang, Bukittinggi, dan Medan. Dalam pengadilan di Surabaya, H Ismail Pranoto --yang sudah meninggal dan terkena hukuman seumur hidup-- mengatakan bahwa apa yang dia lakukan atas suruhan Ali Murtopo. Untuk membuktikannya majelis hakim meminta Ali Murtopo hadir sebagai saksi, tetapi ia menghindar dan tidak mau tampil di sidang pengadilan subversif itu sehingga jatuhlah hukuman seumur hidup Pranoto (Panjimas, Agustus 1995). Di luar itu, ada kelompok Imron yang melakukan pemberontakan Cicendo dan pembajakan pesawat terbang milik perusahaan Garuda Indonesia, Woyla. Saat disidangkan, Imron mengakui perintah perampasan dan perampokan senjata itu dilakukan karena menurut dokumen *Center of Strategic International Studies* (CSIS), orang Islam akan dilindas setelah Pemilu 1982. Dari pengakuan seorang pengikut Jamaah Imron didapat keterangan bahwa Ali Murtopo telah menyusupkan seorang intel bernama Nazamuddin dalam kelompok Imron (TIRAS, 12 Oktober 1995).

A.RIYANTO



Masdar F Mas'udi

Kelompok Islam, secara obyektif harus diakui, seringkali menjadi sasaran tembak para elit politik yang saling berebut kepentingan. Itulah karenanya sejarah politik Islam sejak tahun 1966 hingga 1980-an sering digambarkan berwajah runyam. Seorang peneliti LIPI (lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Heru Cahyono, dalam bukunya **Peranan Ulama Dalam Golongan Karya 1971-1980**, menggambarkan, saat itu para elit politik Orde Baru sangat tidak menginginkan Islam menjadi kekuatan politik. Dan salah satu kelompok yang menonjol melakukan upaya "pengebirian" peran politik umat Islam, menurut Heru adalah Lembaga Operasi Khusus (Opsus) bikinan mendiang Ali Murtopo --saat ia menjabat *Spri* (Sekretaris Pribadi) Presiden Suharto.

Ada dua sasaran yang digarap Opsus ketika itu. Pertama, kelompok Islam modernis yang diwakili oleh para simpatisan Masyumi. Sasaran kedua adalah kekuatan politik Islam tradisional (Nahdlatul Ulama, Perti dan lain-lainnya). Asumsinya jelas, Islam masih dianggap mempunyai orientasi ideologis lama yang diwarisi dari masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Akhir dari sasaran itu adalah penggembosan kekuatan politik Islam dan fusi partai politik Islam ke dalam satu wadah bernama PPP (Partai Persatuan Pembangunan). "Apa yang dilakukan itu, lebih ditujukan pada keseragaman ideologis, hingga memudahkan pemantauan terhadap stabilitas nasional", tulis Heru.

Bersamaan dengan itu, muncul kemudian kelompok "Islam radikal" dari Komando Jihad, Gerakan Aceh Merdeka, sampai kelompok Imron.

ISTIMEWA



A.M. Fatwa

Di kisaran tahun-tahun itu pula heboh gerakan Islam Jamaah dari pesantren Darul Hadits Kediri, Jawa Timur. Munculnya gerakan pimpinan Nurhasan Ubaidah itu memancing perhatian umat. Bagaimana tidak. Jamaah mereka ini dikenal sangat eksklusif dan menganggap orang Islam selain mereka sebagai orang kafir. Islam di Indonesia terus bergumul dengan sejarah. Hari-hari selanjutnya mencatat munculnya peristiwa Priok, yang menelan sekitar 100 orang korban. Pengeboman Gedung Bank Central Asia, pengeboman candi Borobudur , dan beberapa peristiwa lain. Dalam bahasa AM Fatwa , kelahiran peristiwa-peristiwa ternyata bersamaan dengan rekayasa besar-besaran terhadap kekuatan politik Islam.

Jadi Napol Islam memang sulit didefinisikan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa ada orang Islam yang mempunyai kasus dan motrivasi agama yang bernama politik . Ada yang sifatnya murni dari gerakannya sendiri, ada juga akibat dari sebuah rekayasa. Seperti peristiwa Priok yang direkayasa atas kasus DI (Darul Islam) yang murni. Dekade 70 sampai 80 an luar biasa rekayasa politik terhadap Islam yang kesemuanya menimbulkan letupan-letupan peristiwa keagamaan bernuansa politik.



Repro Amnesti Internasional

Laskar Aceh

Pemerintah mem-*backing* demostrasi massa untuk menentang Aceh merdeka

Penekanan yang dilakukan Napol Islam berskala temporer dan tidak menasional. HM Sanusi --mantan menteri perindustrian yang pernah dihukum karena dituduh terlibat kasus pengeboman BCA-- secara tegas menyatakan bahwa kelahiran Napol Islam lebih dikarenakan oleh sistem politik. Kasus BCA misalnya, bagi Sanusi lebih merupakan reaksi terhadap perekonomian dan konglomerasi, dimana hampir 90% dikuasai oleh golongan Cina. "BCA waktu itu merupakan simbol ketidakadilan ekonomi dan juga konglomerasi yang menyebabkan sektor usaha kecil tergencet. Pada akhirnya, hal ini yang menyulut pembakaran BCA yang dibalut isu agama" lanjut Sanusi.

Kasus lain misalnya kelompok Imran. Bermula ketika Nasution dan Ishak tiasa yang menyatakan adanya orang-orang Islam yang tidak dapat "dipegang" akan disingkirkan pemerintah. Isu itu memang tidak jelas benar. Sehingga kelompok Imran membawa isu itu sebagai suntikan pada umat Islam agar mempunyai keberanian moral untuk membela Islam. Tetapi itu terjadi pada 1984 dimana Islam hilang dari semua asas ormas maupun orsospol. Dalam situasi politik semacam itu, agama kemudian diterjemahkan secara lain oleh kalangan muda. terhadap Islam , menyulut terjadinya perbuatan sporadis itu. Sebagai catatan, lanjut Sanusi, semua yang terlibat dalam peristiwa kekerasan, tidak satupun yang menginginkannya. "Saya sampai sekarang tidak akan pernah mengakui terlibat dalam kasus BCA. Saya tidak merasa membiayai seperti yang dituduhkan. Tetapi secara keseluruhan, orang Islam itu akan selalu tampil bila mereka merasa dihambat. Akan ada salah satu kelompok umat yang akan berteriak dengan caranya. Bila secara budaya tidak bisa, tentu dengan sedikit ngotot", papar Sanusi.

Dan kini; setelah pendulum politik berubah ke arah kanan, isu mengenai tapol Islam pun reda. Orang-orang bisa berbicara tanpa khawatir dimasukkan sebagai Tapol Islam. ☐

Eriyanto

Agus, Rosyadi, Prabowo,Linda



SUNU/REPRO : TEMPO

Peledakan gedung Bank Central Asia Jakarta 1984

Karena ketidakadilan ekonomi atau isu agama?

Pantomim Hukum-hukum Politik Kita

Sejak kerajaan komunisme dunia ambruk dan patung Lenin sebagai simbol Bapak Komunisme ramai-ramai dicincang dan dirubuhkan oleh anak-cucunya, dunia seolah menyaksikan kemenangannya. Bahwa komunisme memang telah tamat.

DI CINA, Mao sudah dulu-dulu membocorkan gentong revolusinya, membukakan jalan kapitalis yang diperlebar oleh Deng sendiri. Namun ini tak berarti tamat pula ingatan dan catatan-catatan sejarah komunisme sewaktu mendedahkan ide dan tabiatnya yang revolusioner itu. Hal ini setidaknya berlaku di Indonesia.

"Kitab doktrin Indonesia" yang dipakai untuk penataran P4 keluaran terbaru (1994) yang diterbitkan BP7 Pusat, menempatkan bahaya komunisme pada urutan pertama pada tabel AGHT (ancaman, gangguan, halangan, dan tantangan). Rumusan ini berbeda dengan bahan penataran P4 sebelumnya yang menempatkan bahaya komunisme pada urutan ke dua setelah liberalisme. Kewaspadaan nasional ini juga tercermin ketika terjadi silang pendapat berkaitan dengan diusulkannya pengampunan terhadap tiga tahanan politik penting yang terkena kasus G 30 S/PKI, Soebandrio, Oemar Dhani, dan A. Latief. Suatu tanda betapa upaya coup yang gagal dan pembunuhan terhadap perwira-perwira ABRI yang dilakukan orang-orang Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965, telah membikin semacam trauma bangsa yang tak mudah dihapuskan.

Meskipun komunisme dunia telah ambruk, namun agaknya tidak membuat ABRI dan BP7 mengendorkan kewaspadaannya. ABRI masih menilai, komunisme tetaplah ancaman, bahkan prioritasnya dinaikkan menjadi urutan pertama. Pemikirannya terus hidup, meskipun sejarah telah membuktikan kegagalannya. Asisten Sosial Politik Kassospol ABRI, Mayjen Syarwan Hamid sebagai jubirnya ABRI dalam suatu wawancaranya bulan Juli kemarin, masih bersikukuh akan bahaya ancaman komunisme. "Siapa yang bisa menjamin komunisme tidak akan muncul? Kalau ada kesempatan mereka pasti akan bangkit. Mungkin saja sekarang memakai tameng keterbukaan atau HAM. Itu bisa jadi peluang mereka masuk",ujarnya.

Berbicara tentang problem tahanan politik dan Narapidana politik di Indonesia, rasanya sangat berkait erat dengan sederetan nama tahanan politik yang terkena imbas peristiwa Gestok. Selain, tentu saja, tahanan politik lainnya seperti Gerakan Aceh Merdeka, Peristiwa Priok, Lampung, Irian Jaya, Timor-Timur, maupun tahanan politik yang berkaitan dengan gerakan mahasisawa pro-demokrasi dan tuduhan penghinaan terhadap kepala negara.

Negara kita ini memang mempunyai koleksi tapol/napol yang banyak dan aneka warna kasus dan karakternya. Mereka, "kaum terhukum" itu, ada yang dihukum karena terlibat gerakan separatis, mengganti ideologi negara yang syah (subversi), kriminal politik, ataupun hanya karena perbedaan keyakinan politik. Bila diletakkan pada tataran problem kemanusiaan, hal ini menjadi masalah pelik dari manifestasi hak-hak kemanusiaan di Indonesia. Sedang pada tataran hukum, merupakan tantangan bagi sistem peradilan pidana dan pelaksanaan kemandirian peradilan hukum di Indonesia. Asas-asas hukum standar internasional sebagaimana yang tercantum dalam ICCPR (*International Convenant on Civil and Political Right*) seperti *Equality before the Law, Presumption of Innocence, Independent Judiciary*, dan lainnya, pada prakteknya belum terejawantahkan.

Jumlah tahanan politik di negeri ini agaknya selalu bertambah dari tahun ke tahun. Melihat data dari Statistik kriminal Sumber Data Lembaga Pemasyarakatan dari tahun 1985 sampai 1992 grafik statistik tahanan politik meliuk-liuk naik turun. Tahun 1985 tercatat 143, 1986 turun 132, bahkan tahun 1990 grafik menurun sampai pada jumlah terkecil sebanyak 45. Namun dua tahun berikutnya meliuk naik lagi menjadi 85 dan mencapai 96 di tahun 1992. Memasuki tahun 1994 dan 1995 perkara-perkara persidangan politik kembali merunyak. Yang tercatat adalah kasus pasca-pembreidelan dan penghinaan kepala negara. Sampai saat ini kasus-kasus politik malahan sudah antri menunggu persidangan di meja hijau. Dan grafik tahanan politik pun kembali meliuk naik.

Pergeseran Hukum Tanpa Substansial.

Dari kacamata yuridis, menyoal pelaksanaan hukum pidana dari masalah ini Mulyanana W. Kusuma melihat adanya pergeseran-pergeseran, terutama yang berkaitan dengan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat para tahanan politik baru. "Sampai kira-kira lima tahun lalu yang dominan adalah Undang-undang pidana subversi dan delik-delik terhadap keamanan negara. UU


Prof. Dr. Bambang Purnomo, S.H.

subversi memang bisa dikatakan tidak digunakan lagi. Dari kasus-kasus yang ada sekarang ini digunakan instrumen hukum yang lain, misalnya pasal 510. Walau pun pasal ini ringan, cuma denda Rp. 2000, tapi sejak pertengahan 1994 sampai sekarang sudah makan kurban 74 orang, mulai dari Rendra dan kawan-kawan yang protes pembreidelan sampai kasus mahasiswa Bandung. Tetapi yang penting nampaknya, bagaimana mengkomunikasikan pada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Rendra atau mahasiswa itu adalah sikap dan perilaku politik yang tidak sah. Bukan berat ringannya hukuman, tapi delegitimasi dari sikap dan perbuatan mereka. Juga digunakannya instrumen- instrumen politik yang lain, seperti *Haatzai Artikelen*, yang ternyata dikenakan pada cukup banyak kasus tindak pidana penghinaan terhadap kepala negara (pasal 134 KUHP). Jadi frekwensi penggunaan pasal-pasal pidana yang non-subversib makin banyak dalam lima tahun terakhir. "Rupanya yang dikejar bukan berat ringannya hukum, tapi bagaimana mengkomunikasikan pada masyarakat sikap dan perilaku politik yang ditampilkan oleh aktor-aktor politik tertentu sebagai sikap yang salah."

Terhitung sejak terjadi tindakan keras terhadap orang-orang yang terkena imbas peristiwa G 30 S PKI sampai tahun 1992, dari sebuah data yang dikumpulkan majalah **Jakarta Jakarta**, tercatat ada 295 kasus subversi yang dimejahijaukan. Sejak kelahirannya di tahun 1963, pasal nomor 11/PNPS (undang-undang subversi) ini memang merajalela dan minta banyak tumbal di era Orde Baru. Di masa kejayaannya pasal yang satu ini dikenal sebagai "pasal karet" atau "keranjang sampah". Pasalnya, peraturan ini mempunyai fleksibilitas yang luar biasa dan rupa-rupa kasus bisa dimasukkan dalam pasal satu ini tanpa ada limitasi. Kasus pemalsuan pestisida, penyelundupan, korupsi, bandar judi, sampai kasus seberat Papua Merdeka dan Tim-Tim, semua bisa disikat habis mengunakan pasal karet ini. Namun toh demikian, sampai sekarang 11/PNPS/1963 ini masih dipertahankan, meskipun malu digunakan.

Pergeseran pemakaian dari pasal Subversi ke pasal-pasal pidana biasa ini, bisa dikatakan mirip dengan adegan pentas pantomime. Seribu wajah kekuasaan berkedok hukum bisa dimainkan dalam rupa-rupa bentuk demi kemenangannya. Menurut Mulyana W. Kusuma bukanlah sinyalemen ke arah penegakan hukum yang secara substansial lebih baik. Format pergeseran yang ada semata-mata hanya mempergilirkan secara arif instrumen-instrumen represi dari yang dianggap menakutkan menjadi nampak lebih halus. Namun toh tujuannya tetap sama, yakni agar upaya mendelegalisasikan sikap dan perilaku politik bisa tercapai. Jadi perubahan hanyalah mengganti perwajahan pasal pidana, sementara hakikat hukum yang digunakan tetap saja karet.

Hukum sebagai Duplikasi Kekuasaan

Menurut Prof. Dr. Bambang Purnomo, guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pelaksanaan dan penerapan hukum ini mengindikasikan salah satu perangai hukum yang kontradiktif. Di mana hukum bisa menjelma menjadi kebenaran di satu tempat, akan tetapi di tempat lain pada kasus yang sama bisa berlaku salah. Dicontohkan olehnya, bila seseorang berdemonstrasi untuk demokrasi yang berdasarkan UUD 1945 dilindungi oleh pasal 28, namun di undang-undang lain dalam hukum pidana ada yang mengatur tidak boleh. Inilah kontradiksinya hukum.

Selain itu, salah satu kelemahan hukum adalah sebagai duplikasi kekuasaan. Dalam Hal ini bukan bermakna hukum kekuasaan atau Machtsstaat, namun hukum itu diselubungi kekuasaan. Pada dasarnya hukum tidak akan pernah cocok dengan dengan kekuasaan, tapi bisa diselubungi kekuasaan. Ditunjukkan oleh Prof. Dr. Bambang Purnomo, inilah kelemahan hukum, menjadi duplikasi kekuasaan. Hukum tidak waspada dengan ini. Sebab, bila hukum waspada maka ia akan menjadi *wisdom*.

Pada konteks duplikasi ini, ada suatu gambaran yang riil bahwa kadangkala yang terjadi bagaimana hukum dibuat menjadi instrumen kekuasaan demi tujuan-tujuan politis yang digapai. Sri Bintang Pamungkas, yang masih diperkarakan dan dikenai pasal 104 karena dituduh upaya makar presiden, dalam konteks ini mengungkapkan, "untuk melanggengkan kekuasaan politik dan kemenangan politiknya, pemerintah tak segan-segan melanggar konstitusi. Dengan demikian sebenarnya kita bukan lagi negara konstitusi. Sebagai contoh soal Recall yang sudah dikritik bung Hatta pada tahun 1973, bahwa recall itu hanya terjadi pada negara komunis dan fasis, namun ini masih diterapkan sampai sekarang dan menimpa diri saya. Pada intinya ini menunjukkan bahwa sebenarnya kedaulatan rakyat itu sudah tidak ada. Karena kedaulatan konstitusi, kedaulatan rakyat, sudah diinjak-injak."

Sementara itu berkaitan dengan bentuk-bentuk kegiatan politik, dari studi berbagai kasus pidana politik ada indikasi kuat suatu kekuasaan cenderung mengadakan kriminalisasi politik (*policy of bajinganisation*). Hal ini diberlakukan terutama bila pemerintah berhadapan dengan sejumlah kekuatan-kekuatan oposisi


ISTIMEWA

Mulyana W Kusuma

atau sejumlah orang-orang yang mempunyai perbedaan dalam keyakinan politiknya.

Lebih lanjut Prof. Dr. Bambang Purnomo berpendapat. "Dalam melihat kegiatan politik, kita harus memprediksikan bahwa ada kegiatan yang potensial kriminal dan aktual kriminal sebagai bentuk kejahatan politik. Ini bisa dipisahkan meskipun batasnya susah. Yang biasa terjadi adalah potensial kriminal yang langsung ditabrak dengan aktual kriminal. Akibat dari kerancuan ini terjadi apa yang di Indonesia selama ini."

Bentuk-bentuk penanganan terhadap apa yang dituduhkan sebagai kriminalisasi politik, yang biasanya menjebloskan seseorang dalam tahanan politik, ini pun dinilai tidak mengandung kearifan. Masih menurut pakar hukum dari UGM ini, "bahwa penyelesaian terhadap kasus potensial politik semacam ini tidak bisa sepenuhnya dengan hukum atau perundang-undangan. Tapi dengan politik, dengan kaedah-kaedah politik, sangsi-sangsi politik. Pemerintah Hindia Belanda dulu terhadap pemberontak-pemberontak dulu ditangkap, diselkan. Di sini pengadilan tidak dilecehkan. Imam Bonjol, Diponegoro yang dibuang, contohnya. Ini namanya penyelesaian politik. Atau disuruh menandatangani seperti perjanjian Gianti. Tapi kenapa sekarang tidak begitu, tapi langsung ke pengadilan?" paparnya.

Sebagai bentuk penyelesaian alternatif terhadap orang yang keyakinan politiknya berbeda, ia juga menawarkan jalan tengah. Orang itu tidak didenda, tidak dipenjara, atau tidak ditapol/napolkan, tapi dihukum pidana tutupan. Hukuman seperti ini sebenarnya ada, tapi jarang orang tahu. Suatu hukuman yang membatasi kebebasannya, tapi tidak dalam LP atau rumah. Tapi pada tempat tertentu yang dijaga dengan baik. Kelihatannya memang baik-baik, tapi sebenarnya dihukum secara politik. Ini juga yang dinamakan ditindak secara politik. Tidak ditindak pengadilan.

Menanggapi masalah penyelesaian ini, Mulyana W. Kusuma menawarkan penyelesaian secara hukum dan politik. Menurutnya, saat ini masalah seperti soal stigmatisasi tanda ET. Pada kasus ini yang terjai adalah penyelesaian politik bukan penyelesaian secara hukum. Karena soal ET ini susunan undang-undangnya ada pada peraturan Mendagri No. 13/1980. Isinya mengenai pembinaan dan pengawasan orang-orang dalam "ET labelling" tidak boleh kerja di instansi-instansi tertentu. Kemudian soal peraturan administrasi. Di peraturan administrasi ada hal-hal yang harus dikerjakan gubernur, bupati, camat, lurah. Di tingkat lurah tugasnya memberi kode ET pada KTP. Jadi yang dihilangkan cuma sub-sub pasal dari keseluruhan UU No. 32/1981. Sementara instrumen lainnya tetap jalan. Misalnya kalau mereka ingin jadi pegawai negeri harus minta surat kelakuan baik. Kemudian ada kepres No. 1990 mengenai litsus bagi mereka yang ingin menjadi anggota parpol. Bagi mereka yang wartawan ada UU no. 21/1982. Menjadi anggota DPR ada lagi aturannya. Maka dari itu musti ada penyelesaian hukum dan politik. Apalagi masih banyak tahanan politik yang lain, dari komando jihad, GPK Aceh, OPM, Timor-Timur. "Penyelesaian politik menurut saya misalnya dalam bentuk amnesti nasional yang pernah terjadi pada tahun 1991. Jadi yang dituntut adalah pelaksanaan total dari UUD 1945 pasal 14, termasuk rehabilitasinya juga," lanjut Mulyanah.



REPRO: TEMPO

Kasus Tanjung Priok berdarah 1984

Mereka punya keyakinan politik berbeda, oposisi orde baru?

Bila membuka catatan sejarah penanganan tapol/napol pada masa Orde Lama, presiden Soekarno sendiri pernah mengadakan penyelesaian nasional terhadap masalah ini melalui kepres No. 449/1961 yang diteken pada tanggal 17 Agustus 1961. Yakni pemberian amnesti dan abolisi terhadap orang-orang yang terlibat dalam 7 pemberontakan. Antara lain pemberontakan Kahar Muzakar, Daud Beureuh dengan Aceh merdeka, PRRI/Permesta, RMS, DI/TII Kartosuwiryo. Lantas dua bulan kemudian menyusul dikeluarkannya kepres No. 568/1961, peraturan baru yang mengurus mereka yang tidak terkena kepres sebelumnya. Mereka diberi grasi otomatis dan tanpa harus repot menambah pekerjaan mengecap KTP mereka satu persatu dengan tanda ET sebagaimana politik diskriminatif khas Orde Baru.

Padahal sebagaimana kita ketahui, pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1961 itu baru berusia 5 tahunan. Jadi penyelesaian masalah tapol/napol melalaui penyelesaian nasional itu sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam perkembangan sejarah hukum di Indonesia. Namun agaknya memang berbeda betul karakter Orde Baru ini. Sebab sepanjang 30-an tahun ini hanya sedikit grasi yang keluar sebagai pelaksanaan pasal 14 UUD 1945, dan belum pernah ada penyelesaian nasional mengenai masalah tapol/napol. "Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi." Demikian bunyi pasal 14 UUD 1945. Satu tambahan penting lagi, pada penjelasan kitab Undang-Undang Dasar 1945 tertulis, "negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Hary Prabowo
Narto, Frans, Linda, Agus

Kereta kekuasaan dalam kurun waktu travelnya, tak akan lepas dari belitan perkara di seputar politik kekuasaannya. Di berbagai negara, terutama negera-negara berkembang, yang biasa diindikasikan dengan legalisme ideologi yang tidak "ramah" pada demokrasi dan HAM, menyimpan sekam politik kekuasaan yang cukup potensial panas.

Menjaring Lawan Politik



DI INDONESIA, terutama dalam sejarah kekuasaan pasca-kemerdekaan, telah lahir sekian puluh kelompok oposisi dan bila ditindaklanjuti lagi menjadikan mereka tahanan-tahanan politik milik penguasa. Era Orde Lama, diwarnai beberapa kali pembrontakan. DI-TII, RMS, PRRI Permesta, tercatat menghasilkan banyak tahanan politik. Kemudian di bawah sistem politik demokrasi terpimpin, mereka yang dianggap kontra-revolusioner menjadi tahanan politik.

Memasuki Orde Baru, yang diawali aksi G 30/S-PKI, grafik tahanan politik menanjak drastis. Ratusan orang yang tersangkut G 30/S- PKI.menjadi tahanan politik. Dalam perjalanan Orde Baru selanjutnya, penguasa mempunyai puluhan koleksi kasus politik yang pekat dan melahirkan banyak kelompok oposisi serta tahanan politik. Sampai detik ini sekalipun, beragam pengadilan dalam kasus politik tengah digelar. Kredibilitas penguasa negara seolah lagi dipertaruhkan. Keadilan dan netralitas hukum diuji.

Menelusuri fenomena tahanan politik, pengadilan politik, serta kelompok oposisi di Indonesia, barangkali perlu pengkajian dan analisa dalam diskursus akademik.

Di hadapan bingkai politik Indonesia realitas apakah yang melatari (konteks ruang dan waktu) kelahiran tahanan politik dan pengadilan politik? Bagaimana penilaian dan analisa perkembangan politik selama ini yang menyangkut sikap pemangku kekuasaan terhadap tahanan politik dan kekuatan-kekuatan potensial yang melawannya? Pada dimensi hukum, apakah dasar yang mencukupi bagi landasan keberadaan tahanan politik dan pengadilan politik? Bagaimanakah kontekstualitas undang-undang subversi, kriminalisasi kegiatan politik, dan kebijakan yang diskriminatif terhadap eks-tahanan politik. Adakah kerapuhan sisi hukum kita? Bagaimanakah tantangan hukum Indonesia yang berkaitan dengan tahanan politik dan pengadilan politik di hadapan perkembangan masa depan? Bagaimanakah penilaian tentang keberadaan oposisi dalam sebuah sistem politik yang berlangsung dalam kurun orde baru? Bagaimana prospek keberlangsungan kelompok-kelompok oposisi di Indonesia di hadapan kekuasaan?

Temu wicara kali ini secara khusus ingin menemukan titik- titik persoalan tentang pertanyaan-pertanyaan di atas. Untuk itu **BALAIRUNG** menghadirkan **Drs. Ipong S Azhar, M.S**, staf pengajar Universitas Sumatera Utara, **Markus Suryogunarto, S.H.**, Staf Pengajar Fakultas Hukum UGM, **Ricardo Simarmata**, Mahasiswa Fakultas Hukum UGM dan **Bambang Isti Nugroho** mantan aktivis Kelompok Studi Sosial Palagan Yogyakarta. Temu Wicara dipandu oleh **Hary Prabowo** dan ditulis kembali oleh **Lais Abid** dan **Mohammad Sri Sadono**.

Mencari Pasal Penjaring

Merumuskan kejahatan politik bukanlah perkara yang gampang.Dalam pandangan Markus Suryogunarto kejahatan politik adalah relatif dan kontemporer. Dikatakan relatif karena banyak perbuatan yang oleh suatu negara diatur sementara untuk perbuatan serupa di negara lain tidak demikian. Misalnya kasus yang menimpa George Junus Aditjondro yang dipermasalahkan menghina pemerintah dalam diskusi panel di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, ketika lari ke Australia ia tidak dipermasalahkan. Sementara dikatakan temporer karena pada suatu saat suatu perbuatan dikatakan kejahatan sedang pada saat yang lain tidak dipermasalahkan, karena ada perubahan kepentingan yang berkait dengan permasalahan perbuatan tersebut. "Contoh dari pengertian ini adalah soal Manipol Usdek pada jaman Orde Lama", tegasnya.

Kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan politik sering dirumuskan oleh negara untuk mempertahankan status quo-nya. Sehingga hukum pidana banyak dikatakan sebagai instrumen penguasa untuk menjerat seseorang, sehingga perbuatan tersebut dianggap inkonstitusional. "Inilah ciri khas delik politik", kata peraih master hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ini.

Jika kita merujuk pada perundangan hukum pidana, yang dinamakan tindak pidana politik tidak akan ditemukan. Ia akan ditemukan dalam kejahatan terhadap keamanan negara, padahal dalam peraturan perundangan dalam hal ini adalah Undang-undang nomer 1 tahun 1979 yang mengaturnya, seorang pelaku kejahatan politik tidak dapat diekstradisi.

Undang-undang nomer 11 PNPS/63 adalah instrumen tepat untuk menjerat para pelaku

kejahatan politik. Undang-undang ini merupakan ketetapan presiden berbentuk perundangan yang jika ditinjau dari UUD 1945 UU tersebut tidak sah. Tetapi oleh Presiden Soekarno waktu itu dikeluarkan dengan alasan untuk mengamankan Dekrit Presiden. Tentu saja ia bersifat temporer. "Jadi sekarang kita patut mempertanyakan mengapa sekarang undang-undang itu tidak diperbaiki?", ujar Markus. Maka sebaiknya agar tidak ada "cela" sifat temporer itu harus dihilangkan dengan membentuknya sebagai undang-undang. Mengenai substansinya, dalam berbagai persidangan sering terjadi tarik-menarik perihal keabsahan undang-undang ini. Undang-undang ini mempunyai cakupan yang sangat luas. Oleh karena itulah Prof. Umar Seno Adji menyebutnya bersifat multi purpose dan *all imbasing act*. Sehingga semua perbuatan bisa dijerat masuk.

Undang-undang delik subversi sering dikatakan memiliki rumusan *propolte bulus-properte kulpa*, artinya unsur kesengajaan dan unsur kealpaan menjadi satu. Rumusan demikian sangat memudahkan jaksa untuk membuktikannya. Jika unsur kesengajaan tidak terbukti maka unsur kealpaannya yang yang dituduhkan.

Dalam beberapa putusan, pengalaman membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak konsisten menerapkan undang-undang ini. Memang tidak ada syarat dalam rumusan delik ini bahwa untuk delik subversi harus ada unsur politik. Hanya saja di dalam penjelasan undang-undang subversi ini ditemukan subversi selalu berhubungan dengan politik, dan merupakan alat untuk mencapai tujuan politik oleh golongan yang berkepentingan. "Saya menangkap pengertian politik adalah politik dalam pengertian ketatanegaraan. Artinya kejahatan itu ditujukan kepada pemerintah", kata dosen muda Fakultas Hukum UGM ini. Akan tetapi menurutnya jika dikaitkan dengan pencurian listrik, pestisida, jual beli nomer buntut (judi-red) kemudian dikenai tuduhan subversi ini ada pergeseran makna. Akhir-akhir ini politik tidak diartikan politik ketatanegaraan tetapi berarti policy atau kebijakan pemerintah. Jadi hal ini dianggap membahayakan kebijakan pemerintah, lagi-lagi ini merupakan pergeseran makna.



Markus Suryogunarto

Mengacu pada pendapat pakar hukum pidana Prof.Dr. Loebby Loeqman,S.H., Ricardo Simarmata, yang juga Pemimpin Redaksi Tabloid **BULAKSUMUR** UGM ini, mengungkapkan bahwa UU 11/PNPS/1963 ini telah melakukan penyimpangan azas dalam hukum pidana materiil.Dalam azas umum yang dikenal dalam hukum pidana kumulasi tidak boleh dilakukan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Tetapi di dalam undang-undang subversi pidana pokok pun bisa dikumulasikan. Undang-undang subversi ini bisa bersifat brutal misalnya melakukan penahanan kepada tertuduh selama tujuh tahun tanpa surat penahanan. Juga diintrodusirnya pengadilan *in-absentia*. Tahanan politik tidak diperbolehkan mendapatkan bahan bacaan, .

Gebrakan Politik sebagai Shock terapi

Bambang Isti Nugroho, mempunyai argumentasi lain. Menurutnya setiap periode kekuasaan, penguasa selalu memberikan gebrakan. Baik politik maupun ekonomi. Dalam sisi politik, sepertinya ada keharusan penguasa memberikan shock terapi bagi mahasiswa yang melakukan aktivitas gerakan di luar kampus."Saya melihat, apa sebab saya dikenai undang-undang subversi sementara teman-teman yang terlibat kasus di ITB Bandung, teman-teman yang tergabung di Aliansi Jurnalis Independen, Tri Agus, Nuku Sulaiman(Yayasan PIJAR Jakarta) dan Bonar Tigor serta yang lain tidak. Saya kira negara memang sedang memberikan refleksi terhadap undang-undang ini", ujar mantan



Bambang Isti Nugroho

pendiri Kelompok Studi Sosial Palagan tahun 1985 ini. Undang-undang ini barangkali teramat besar. Seandainya undang-undang ini dengan mudah dikenakan pada setiap orang, tentu ini akan merugikan negara sendiri, sebab akan disorot negatif oleh dunia internasional. Boleh disebut bahwa undang-undang ini merupakan jaring besar tetapi sasaran yang akan didapat sangat kecil. "Saya melihat orang-orang yang dikenai undang-undang ini adalah orang yang mencoba menyerang jantung persoalan negara, yaitu ideologi. Sedang teman-teman yang diadili belakangan ini hanya sebatas menggoyang atau menyerang policy pemerintah saja", tambah Bambang yang pernah mendekam 6 tahun di balik jeruji besi, terjaring UU No. 11/PNS/1963 itu.

Mendefinisikan musuh Poltik

Pendefinisian musuh politik yang berkaitan dengan ideologi negara juga terjadi dalam sejarah Eropa.Seperti diungkapkan Ricardo Simarmata, di Eropa Barat gelombang pertama mengenai musuh-musuh politik negara diarahkan pada kelompok komunis yang mencoba merubah ideologi liberal. Masih menurut Ricardo, pada masa-masa awal kemerdekaan sampai pelaksanaan demokrasi liberal diskusi dan kritik mengenai Pancasila atau kritik mengenai konsep negara dan ideologi negara tidak digolongkan sebagai *political crime*. Di jaman demokrasi terpimpin definisi musuh negara ialah kelompok yang menolak konsepsi NASAKOM Soekarno. Kemudian di masa Orde Baru definisi tersangka politik menjadi sangat luas. Mulai dari persoalan politik, ekonomi dan budaya. Pelaku peristiwa Malari Januari 1974, Pelaku kerusuhan Tanjung Priok, Gerakan Sparatis di



Ipong S Azhar



Ricardo Simarmata

Aceh Organisasi Papua Merdeka dan Timor-Timur adalah asal tersangka politik yang mewakili beraneka ragam latar belakang permasalahan. Namun bagi Bambang kenyataan bahwa selalu ada orang dipenjara tidaklah mengejutkan, karena politik ada di setiap jengkal tanah negara di bumi ini. Maka istilah tahanan politik pun ditanyakan, darimana ia berasal? Dan barangkali inilah yang selalu terkait ketika semacam undang-undang subversi ini mesti ditetapkan. Bambang pun bercerita,"Dalam replika saya terhadap jaksa yang menuntut saya, selalu saya katakan bahwa justru jaksalah yang mengamalkan ajaran Aidit, karena konseptor undang-undang itu adalah Aidit, ketua PKI".

Tahanan Politik dalam konteks demokratisasi

Menanggapi masalah ini Ipong S Azhar mengatakan bahwa fenomena Tapol-Napol memang cukup rumit. Hal ini karena tidak ada dasar yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena ini. Maka dasar yang digunakan adalah dasar teoritis. Tetapi bukankah teori tidak bisa digunakan untuk membela diri?. Ketika otoritas tidak sah di mata masyarakat maka negara akan menggunakan paksa fisik di dalam menegakkan otoritas, salah satunya melalui hukum yang berlaku. Menurut catatan Ipong terlihat bahwa dalam negara yang semakin demokratis, jumlah tahanan politik dan narapidana politik akan semakin kecil. Adanya Napol dan Tapol yang cukup banyak di Indonesia menandakan negara ini belum demokratis.

Keberadaan oposisi sebenarnya dikembalikan lagi pada kultur masyarakatnya. Di negeri ini, kita tidak mengenal adanya oposisi. Menurut Juan Lance dalam tulisannya **An Autoritarian Regim**, yang mendasari seluruh analisi otoritarisme seperti Smither, Odonel dan lain sebagainya, ia menulis mengenai kepemimpinan Franco. Ia menyebut beberapa ciri yang menurutnya otoriter, yaitu jika: Rejim menolak pargamatisme, menolak mobilisasi politik massa baik eksklusif maupun inklusif, lebih banyak menggunakan instrumen yang bersifat legal formal seperti dalam hal ini adalah undang-undang anti subversi di Indonesia dan tidak dikenal adanya lawan oposisi.

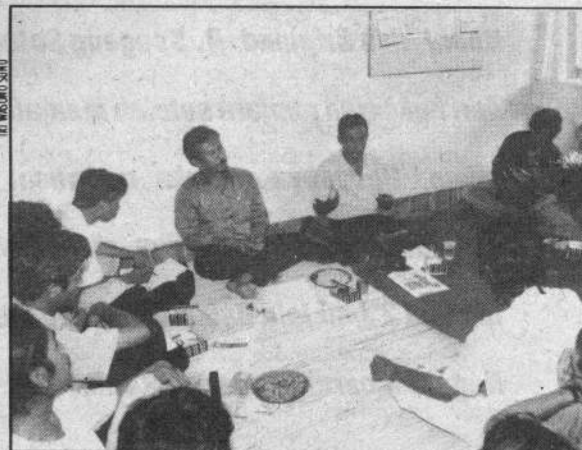
Berdasarkan itu, Ipong yang kandidat doktor politik UGM ini menjelaskan bahwa pemaknaan oposisi sangat berkait dengan karakteristik rejim yang ada. "Ketika rejim itu belum demokratis maka oposisi tidak ada", tambahnya. Rejim yang berkuasa mengendalikan seluruh aspek kehidupan melalui berbagai cara. Dalam ilmu politik ada 4 macam cara yang bisa ditempuh:melalui penggunaan ideologi, *material resources* (imbalan ekonomi), melalui hukum dan dengan tindakan kekerasan.

Menguburkan Oposisi dalam sebuah sistem politik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dalam sejarah politik Indonesia oposisi berkembang terus dari waktu ke waktu, diakui ataupun tidak. Hal ini membawa keyakinan bahwa tindakan terhadap oposisi mesti dilakukam dengan kekerasan. Namun begitu menurut Charles Tilly otoritas yang dilakukan dengan paksa fisik hanya bersifat sementara karena masyarakat dalam jangka waktu tidak lama akan melakukan tindak perlawanan mulai dari tingkat ringan sampai kepada kekerasan pula. Negara, dengan demikian, harus melakukan pengendoran. Jika tidak maka akan mengalami krisis seperti sorotan dari dunia internasional. Masyarakat kita sudah semakin menunjukkan gejala perlawanan. Lihat saja contohnya, mulai dari mahasiswa hingga tukang becak.

Hukum dalam perspektif politik

Namun demikian semua negara akan berproses menuju hukum yang diidealkan. Menurut Mc. Iver, hukum sebagai suatu produk baru dianggap absah apabila telah melalui proses konversi yang melibatkan semakin banyak anggota masyarakat. Dalam perspektif politik suatu produk hukum belum tentu terlegitimasi bagi masyarakat ketika produk itu dilahirkan oleh sekelompok kecil orang tertentu. Ketika otoritas negara jatuh di mata masyarakat maka suka atau tidak ia akan menggunakan tindak kekerasan. Menurut Webber kekerasan yang berpusat pada seseorang dapat bertahan lama pada bentuk negara yang tidak mempunyai pluralitas yang kompleks. Persepsi mengenai oposisi akan lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademik jika kita dapat menarik pola umum dari rejim- rejim yang ada. Suatu rejim disebut konstitusionalis jika rejim menggunakan peraturan perundangan untuk melanggengkan kekuasaannya seperti jaman orde baru ini atau jika memakai peraturan perundangan untuk mengatur pemerintahan.

Meskipun UU No. 11/PNPS/1963 dihapus masih tetap saja ada fenomena tapol/napol karena dimanapun konflik kepentingan itu pasti ada. jika demikian maka seperti kata Markus Suryogunarto,"Jika kita ingin memperjuangkan kepentingan kita, pada tahap legislasi atau formulasilah saat yang tepat". □



Amnesti dan Perujukan Nasional



Hendardi
Direktur Program Khusus dan Komunikasi YLBHI, Jakarta

Tanggal 16 Agustus 1995 tiga mantan pejabat rezim Soekarno --Soebandrio, Laksamana Madya Oemar Dhani, dan Brigjend. R. Soegeng Sutarto-- dibebaskan dari hukuman penjara setelah menjalaninya hampir 30 tahun. Bebasnya mereka menyusul dikeluarkannya keputusan grasi ketiganya oleh Presiden Soeharto tanggal 2 Juni lalu dan diumumkan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono pada 28 Juli 1995.



Pemerintah juga mengumumkan akan menghapuskan kode ET (eks tapol) yang tercantum dalam identitas --Kartu Tanda Penduduk (KTP) warisan Jepang--bagi mantan tapol yang dituduh dan divonis terlibat Gerakan 30 September/PKI.

Serangkaian kegiatan tersebut yang dikaitkan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tampaknya ingin dijadikan simbol suasana damai dan sejuk untuk mengakhiri pertentangan lama yang terus terpelihara antara Orde Baru versus Orde Demokrasi Terpimpin.

Baharuddin Lopa lewat artikelnya mengulas, pemberian grasi yang diharapkan diikuti dengan amnesti dan penghapusan ET dalam identitas mantan tapol dianggapnya sebagai awal dimulainya kegiatan rekonsiliasi (perujukan) nasional (Kompas, 5 Agustus 1995).

Amnesti

Berbeda dengan grasi yang bersifat pribadi, maka amnesti bersifat politis. Pemberian amnesti adalah keputusan politik Presiden untuk mengampuni para tahanan yang bertalian dengan hak-hak sipil dan politik. Dan memang, dimana-mana amnesti itu berkaitan dengan masalah politik.

Mungkin kita dapat merujuk ke beberapa negeri lain. Pembebasan Nelson Mandela dan aktivis ANC (*African National Congress*) oleh rezim *apartheid*, Kim Young-Sam dan Kim dae-Jung oleh rezim militer Korea Selatan, Andrei Sakharov di Uni Soviet, dan Vaclav Havel di Cekoslovakia, atau Aung San Suu Kyi oleh rezim militer Myanmar, adalah pembebasan atas pertimbangan politik.

Mandela adalah pemberontak dan terlibat pemberontakan bersenjata melawan rezim apartheid Afrika Selatan. Dia dipenjara selama 27 tahun. Tetapi tahun 1990 dibebaskan bersama sejumlah aktivis ANC oleh rezim F.W. de Klerk. Inilah salah satu contoh pemberian amnesti yang senantiasa bertali-temali dengan pertimbangan politik.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 perihal amnesti tercantum di dalam pasal 14. Pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Dalam Undang-Undang Darurat No. 11/1954 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 1/1961 menjelaskan bagaimana mendiang Presiden Soekarno mengatur tentang pemberian amnesti dan abolisi. Lewat Keputusan Presiden No. 449/1961, Presiden Soekarno juga mengeluarkan amnesti dan abolisi bagi mereka yang tersangkut pemberontakan PRRI/Permesta, DI/TII dan RMS.

Sejak Orde Baru memimpin negara dan masyarakat, tahanan politik memenuhi penjara menyusul percobaan kudeta G-30-S. Diperkirakan sekitar 1,4 juta orang tapol baik yang berkaitan dengan G-30-S maupun PKI dan organisasi yang berafiliasi pada PKI. Selajn itu, secara sporadis adalah tapol aktivis gerakan Islam, Mahasiswa, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Anti Integrasi Timor- Timur, dan beberapa tokoh oposisi.

Adanya tapol memang bertalian dengan masalah politik, khususnya hak-hak sipil. Perbedaan pandangan politik diselesaikan melalui pemenjaraan dan pengadilan sebagai reaksi politik penguasa. Sebaliknya tidak diselesaikan melalui referendum dan fungsi parlemen sebagai sarana penyaluran pandangan dan kepentingan politik secara publik.

Karena itu, pemberian amnesti seyogyanya sekaligus menyelesaikan persoalan hak-hak sipil dan politik. Artinya, pelepasan narapidana politik haruslah disertai pemulihan hak sipil dan politik warga masyarakat. Pemberian amnesti memang mengesankan adanya keterbukaan --ketulusan politik-- untuk mengakhiri permusuhan atau pertikaianyang tidak adil.

Bagaimanpun, jika pemerintah mengeluarkan amnesti politik bagi para tapol, maka hal ini bisa dikatakan sebuah langkah maju dalam merealisasi hak-hak sipil dan politik.

Perujukan Nasional

Sebagai pakar hukum dan orang yang peduli atas persoalan hak asasi manusia (HAM), Baharuddin Lopa mengharapkan timbulnya perujukan nasional dalam percaturan politik. Dengan merujuk Al Qur'an, terkandung anjuran untuk saling memaafkan, dalam pandangan Lopa, dendam politik adalah emosi negatif yang menyimpang dari anjuran tersebut.

Kepedulian Baharuddin Lopa akan hak asasi sambil mengharapkan perujukan nasional, memang kepedulian yang positif dan konstruktif. Melalui pendekatan Islami, adalah rantai saling menghargai antar sesama manusia. Begitulah kepedulian Lopa dan harapannya yang luhur.

Lebih jauh lagi, jika amnesti politik dihasilkan dalam kerangka perujukan nasional, maka pemulihan-pemulihan politik dapat semakin terbuka. Amnesti hanya menjadi penyelesaian persoalan yang bersifat pribadi jika tanpa disertai perujukan nasional.

Perujukan nasional adalah keputusan politik untuk menghapuskan diskriminasi yang sebelumnya mewarnai kehidupan sosial politik. Keputusan politik ini bertujuan memulihkan mekanisme demokrasi dan lembaga politik.

Dalam mekanisme demokrasai keputusan penting diselesaikan melalui proses referendum dan parlementer. Sementara lembaga poltik bertalian dengan sitem kepartaian, organisasi massa dan reformasi perundang- undangan. Jika ini yang dipulihakn maka rekonsiliasi nasional menjadi terbuka.

Perujukan antara rezim Apartheid dengan ANC dan oposisi di Afrika Selatan, antara rezim Chu Doo-hwan dengan oposisi di Korea Selatan, antara rezim Pinochet dengan pendukung Allende di Chile, dan antara rezim militer komunis dengan oposisi pro demokrasi di Myanmar--melalui pemberian amnesti-- telah mengantarkan pemulihan mekanisme demokrasi dan kelembagaan politik.

Mandela kembali bergabung dengan ANC dan akhirnya terpilih menjadi presiden Afrika Selatan. Kim Joung-sam kembali ke pentas politik dan berhasil terpilih menjadi presiden Korea Selatan. Begitu juga para pendukung politik Allende di Chile, maupun Aung San Suu Kyi di Myanmar, mereka kembali ke gelanggang politik.

Dengan menyimak tali-temali antara amnesti politik dan perujukan nasional di beberapa negeri menunjukkan pertautan dengan pemulihan lembaga-lembaga politik, sehingga pemimpin yang pernah menjadi tapol mempunyai kesempatan kembali ke pentas politik.

Amnesti dan rekonsiliasi dalam hubungannya dengan pemulihan kelembagaan politik-- pastilah punya makna politis bukan saja bagi mantan tapol yang telah dibebaskan, tetapi juga bagi warga masyarakat yang ingin merealisasi cita-cita politik yang mengambil jalan demokrasi.

Jelaslah, pada dasarnya rekonsiliasi memerlukan pemulihan atau reformasi kelembagaan politik yang kelak digunakan untuk menegakkan mekanisme demokrasi. Pertama-tama melalui pemberian amnesti yang diikuti dengan rehabilitasi politik dan selanjutnya reformasi kelembagaan. □

Sejak Orde Baru memimpin negara dan masyarakat, tahanan politik memenuhi penjara menyusul percobaan kudeta G-30-S. Diperkirakan sekitar 1,4 juta orang tapol baik yang berkaitan dengan G-30-S maupun PKI dan organisasi yang berafiliasi pada PKI. Selain itu, secara sporadis adalah tapol aktivis gerakan Islam, Mahasiswa, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Kelompok Anti Integrasi Timor- Timur, dan beberapa tokoh oposisi.

PEDOMAN ETIK MAHASISWA :

Upaya Meregulasi Kehidupan Kampus

Mahasiswa tidak diijinkan/tidak dibenarkan : berpartisipasi dalam suatu demonstrasi, atau aksi kegiatan, atau kegiatan yang sangat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Institut Teknologi Bandung, secara substansial menginjak-injak hak orang lain, atau mengambil tempat dan/ atau dalam hal mana mahasiswa tidak diijinkan berada. Dalam hal ini tidak ada prasyarat bahwa pimpinan Institut harus telah memperintahkan mahasiswa membatalkan demonstrasi/kegiatan tersebut (pasal 86 ayat 9).

K*utipan di atas merupakan salah satu isi pasal dari sebuah regulasi kehidupan mahasiswa yang dikemas dalam PERATURAN DAN KODE BAGI MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.* Dengan regulasi itu maka Rektor ITB mempunyai alasan legal untuk menjatuhkan sanksi kepada mahasiswanya yang terlibat demonstrasi. Universitas Gadjah Mada nampaknya juga akan menerapkan sebuah Peraturan dan Pedoman Etik bagi mahasiswa seperti halnya ITB dan UI yang telah merintisnya lebih dahulu, dan terakhir disusul UII dengan SK REKTOR-nya walaupun menimbulkan pro dan kontra di kalangan mahasiswanya. Jelas ini merupakan paket politik baru untuk mengekang aktivitas mahasiswa. Seperti dikemukakan MT. Arifin ada dua langkah yang ditempuh pemerintah dalam menghadapi mahasiswa. Pertama, dengan mengintervensi kebirokrasian kehidupan kampus, dan kedua, pembenahan dan penataan kembali tatanan politik yang sedikit banyak melibatkan unsur-unsur kampus. Akankah regulasi kemahasiswaan di Kampus Biru ini diberlakukan sebagai Undang-Undang Ketertiban Kampus yang dijadikan palu godam penguasa via birokrat kampus untuk merepresi aktivitas mahasiswa yang belakangan ini marak kembali dan merupakan upaya lain untuk mengintervensi kehidupan mahasiswa ?

UBI SOCIETAS IBI JUS begitu bunyi sebuah adagium yang singkat namun sulit untuk tidak dibenarkan. Bahwa manusia sebagai *zoon politicon*, meminjam istilah Aristoteles, sejak semula kehidupannya ditengah-tengah masyarakat tidak dapat melepaskan diri dari *rules* yang "membatasi" semua tindakannya sebagai konsekuensi logis dari kodrat manusia yang mempunyai keinginan "tidak terbatas". Adagium diatas nampaknya dijadikan alasan dasar *ration d'etre* perlunya sebuah peraturan dalam kehidupan mahasiswa oleh pihak universitas.



Demonstrasi mahasiswa melanggar etik mahasiswa?

Ir. Bambang Kartika, PR III UGM, ketika ditemui **BALAIRUNG** di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa lingkungan mahasiswa yang merupakan salah satu variabel dari masyarakat akademis perlu memiliki norma atau nilai sebagai suatu tatanan yang mengikat. "Lha iya, kita kan belum ada sekarang, misalnya kalau ada mahasiswa KKN lalu membuat tindak asusila , membuat onar, dan sebagainya terus sangsinya apa? apa ada sangsi akademis atau sangsi administrasi, nggak?" tandasnya.

Ide tentang perlunya pedoman etik mahasiswa sebenarnya sudah lama dipikirkan , yaitu pada masa Rektor UGM dijabat oleh Prof Dr Ir Moh Adnan, dalam suatu rapat Pembantu Rektor III se- Indonesia pada tahun 1985. Dalam perkembangannya, ITB-lah yang kemudian memberlakukan Peraturan dan Kode bagi Mahasiswa ITB pada tahun 1992. Langkah tersebut segera akan diikuti pula oleh UGM. "Saya tidak tahu apa nantinya disebut kode etik atau apa, sebab baru konsep. Di perguruan tinggi lain ada yang menyebutnya kode kehormatan" lanjut Bambang Kartika.

Drg. Haryono Mangunkusumo, staf PR III UGM, ketika dimintai keterangan oleh **BALAIRUNG** menuturkan bahwa dalam peraturan dan pedoman etik mahasiswa itu nantinya akan diatur tentang kode kehormatan, fungsi dan kedudukan mahasiswa dalam bidang akademis, partisipasi apa yang bisa dilakukan , prosedur kegiatan mahasiswa serta hak dan kewajiban mahasiswa. Selain itu akan diinformasikan bagaimana universitas manghargai seorang mahasiswa yang berprestasi, baik dalam bidang olahraga maupun bidang yang lain. Juga mengenai mekanisme dan tata aturan memperoleh beasiswa. Landasan hukum yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni PP No 30/ tahun 1990 serta Statuta Universitas Gadjah Mada. "Tentunya, dengan kata lain kita itu mencoba dari visi UGM agar semua mahasiswa itu dengan membaca buku itu bisa tahu bagaimana dia itu di sini. Tentunya kalau dia nggak cocok, nggak usah di UGM, ya to?" tegasnya. "Kita itu membuat suatu *rules of the games* saja, kamu bermain dimana. Jadi jangan sampai mahasiswa itu takut kalau ada Kode Etik Mahasiswa nanti tidak boleh berdemonstrasi".

Pedoman Etik Mahasiswa suatu kebutuhan Konkrit ?

Hembusan isu akan diberlakukannya suatu regulasi bagi mahasiswa yang dikemas dalam pedoman dan kode etik mahasiswa agaknya cukup mengejutkan dan menimbulkan berbagai tanda tanya di kalangan mahasiswa. Nezar Patria, mahasiswa Filsafat UGM,

berkomentar bahwa perlu dikritisi dulu datangnya darimana, apakah benar-benar semacam kebutuhan konkrit mahasiswa atau sebuah upaya lain dari penguasa untuk mencoba mengintervensi lebih jauh kehidupan mahasiswa. Menurutnya sangat lucu apabila suatu kode etik diberlakukan untuk komunitas mahasiswa tetapi tidak digodok oleh mahasiswa itu sendiri, melainkan dari komunitas diluar mahasiswa (birokrat atau penguasa). Hal ini jelas merupakan salah satu upaya penguasa yang mencoba mencari jalan lain ketika NKK/BKK diberlakukan ternyata protes-protes di kampus masih banyak bermunculan akhir-akhir ini. " Dan saya pikir sah-sah saja kalau kita menolak untuk membentuk Kode Etik Mahasiswa kalau itu bukan kebutuhan yang mendesak buat kita semua",tuturnya.

Hal senada diungkapkan pula oleh Velix V. Wanggai, mahasiswa Fisipol UGM, dengan melihat konteks hubungan *state-civil society*, dimana terjadi ketidakseimbangan posisi antara negara pada posisi sentralitis dengan rakyat yang berada pada posisi marginal, yang bermuara pada intervensi negara dalam semua sektor masyarakat. Hal tersebut menurut Velix yang juga anggota presidium DEMA, dialami pula dunia perguruan tinggi dimana posisi mahasiswa sangat marginal dan aktivitasnya senantiasa diintervensi oleh negara, melalui birokrat kampus. Sehingga perlu dipertanyakan apakah Kode Etik Mahasiswa itu dilandasi oleh niat baik negara untuk lebih menegakkan otonomi kampus, kebebasan akademik, dan melaksanakan pendidikan politik bagi mahasiswa ataukah sebuah regulasi politik negara yang dikemas dalam bahasa etik dan moral seperti halnya NKK/BKK,dan SK 0457/90 perihal SMPT. "Nampaknya watak dasar Kode Etik Mahasiswa cenderung untuk mengekang kreativitas sikap dan berpikir mahasiswa. Oleh karena itu jika landasan filosofinya seperti itu, maka harus kita tolak !",tegasnya. Kode Etik Mahasiswa justru sebagai "politik ketertiban " yang dijadikan alat legitimasi birokrasi kampus untuk menindak aksi-aksi mahasiswa sehingga akan menghilangkan peran mahasiswa untuk mengontrol perilaku dosen atau birokrasi kampus.

Lain halnya dengan Sri Wiyanti, menurutnya tergantung dari tujuannya apa, kalau hanya sekedar pemberian informasi itu sudah salah, sebab mengikat salah satu pihak . "Kalau saya lihat tidak begitu urgen. Mungkin kenapa Kode Etik itu perlu karena di UGM itu vocal dan salah satunya perlu pembatasan-pembatasan seperti itu", ujar mahasiswi Fakultas Hukum ini.Sebaliknya secara riil di UGM ini yang perlu dikritisi justru malah dosen- dosennya yang sangat feodal, birokratis, yang datangnya cuma dua jam, atau mereka yang tidak berani mengeluarkan pikiran dan tergantung pada tugas akademis. "Itu harus ada timbal balik tidak hanya satu pihak yang dirugikan. Sampai rektor sendiri pun mungkin perlu juga dikenai".

Sementara itu Almudi Kurniawan salah seorang tim pengkaji dari SMPT menyatakan bahwa idealnya suatu Kode Etik Mahasiswa itu mengatur etika dan moral yang berlandaskan pada kehidupan ilmiah di kampus sebagai suatu rujukan bersama dari pelaku masyarakat kampus itu sendiri. " Kalau itu sudah dipolitisi maka bukan suatu Kode Etik Mahasiswa tetapi sudah merupakan suatu aturan yang harus dijalankan . Kalau itu pun saya tidak akan sepakat", tegas mahasiswa Fakultas Pertanian ini.

Munculnya kekhawatiran di kalangan mahasiswa kiranya cukup beralasan. Lembaran sejarah di Indonesia telah membuktikan adanya berbagai macam intervensi dari rezim penguasa dengan setumpuk regulasi mulai dari NKK/BKK, penghapusan DEMA, serta SK 0457/90 tentang SMPT dirasakan telah mempersempit ruang gerak mahasiswa. Aksi-aksi mahasiswa selama ini dianggap sebagai kekuatan potensial yang dapat menganggu *status quo* penguasa sehingga perlu dijinakkan dengan serangkaian paket politik. Kasus yang serupa terjadi di Jepang. Pada tahun 1969 **Undang-Undang Pemulihan Ketertiban di Universitas** diberlakukan. Sehingga Rektor kemudian berkuasa untuk mengambil tindakan tegas terhadap konflik-konflik yang berlangsung. Dan bahkan Menteri Pendidikan pun berhak menutup kampus yang bikin rusuh. Jadi benarkah Pedoman Etik Mahasiswa merupakan suatu kebutuhan konkrit dan dilandasi niat baik untuk menegakkan otonomi kampus dan kebebasan akademis ?

Menanggapi hal tersebut Bambang Kartika meminta mahasiswa untuk tidak mengkaitkannya dengan hal-hal yang bersifat politis; bahwa adanya regulasi mahasiswa itu nantinya akan memagari aktivitas mahasiswa atau bahkan menjadi "penjara". Sedangkan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UGM, Isharyanto, berpendapat hendaknya mahasiswa melihat substansinya dahulu apa, dan menurutnya "kebebasan mahasiswa" tidak mungkin akan dikekang karena lingkungan di UGM berbeda dengan kampus lainnya. Sementara itu Drs. Achmad Charis Zubair, S.U mengutarakan bahwa Suatu Kode Etik atau perangkat normatif yang diterapkan pada mahasiswa harusnya memberikan otonomi kepada mahasiswa yakni mengangkat mahasiswa didalam martabatnya baik materiil maupun spirituil, yang mencakup dimensi kecendekiawanan, dimana kebenaranlah yang menjadi ukuran serta dimensi keadilan. " Apabila nanti betul akan dirumuskan tentunya adalah rumusan yang secara umum "membebaskan" mahasiswa itu sendiri sehingga mahasiswa sebagai fase penting dalam kehidupan ini tidak akan kehilangan sikap kecendekiawanan dan keterpelajaran mereka ", ungkap dosen Fakultas Filsafat UGM ini.

Agus Riyanto
Laporan : Aris, Agus, Rinda

Penjaringan Bibit Atlit Daerah:

Atlit Berotak, Atau Mahasiswa Berotot?

*U**NIVERSITAS** Gadjah Mada mulai tahun 1995 menjaring atlit-atlit olahraga untuk mengenyam pendidikan di kampus biru ini tanpa harus melalui tes UMPTN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri) dengan sebuah jala yang berbentuk PBAD (Penjaringan Bibit Alit Daerah). Suatu jalan pintas*

untuk mendongkrak prestasi UGM dalam bidang Olahraga ?

Prestasi olahraga menunjukkan prestasi sebuah bangsa, kebesaran suatu negara dipengaruhi oleh kebesaran prestasi olahraganya. Memang diakui atau tidak dunia olahraga mengandung nilai prestisius dengan hamparan prestasi yang tidak hanya menjanjikan untaian mutiara kebendaan tetapi juga kemashuran dan kepopuleran. Disamping akan mengangkat pula nama besar seseorang, kelompok, lembaga, dan bahkan sebuah bangsa. Nampaknya UGM terobsesi pula untuk mendongkrak prestasi olahraganya di pentas percaturan antar perguruan tinggi guna melengkapi kebesarannya. Maka mulai tahun 1995 dijaringlah bibit-bibit atlit yang potensial lewat program PBAD (Penjaringan Bibit Alit Daerah). Menurut Pembantu Rektor I UGM, Prof.Dr.Ir. Boma Wikantyoso, ketika ditemui **BALAIRUNG**, program ini dilaksanakan dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pembinaan olahraga. Sebelumnya telah dilaksanakan program PBAN (Penjaringan Bibit Atlit Nasional) akan tetapi mulai tahun ajaran 1996/1997 digantikan dengan PBAD untuk lebih memberikan kesempatan kepada atlit daerah yang berprestasi. Adapun tujuannya untuk memberikan kesempatan menuntut ilmu di UGM bagi para pelajar SLTA yang berhasil dalam bidang olahraga, meningkatkan kecintaan dan motivasi terhadap olahraga, kemudian juga dalam rangka meningkatkan kehidupan olahraga di kampus ini. Dalam realisasinya bekerja sama dengan KONI Pusat dan sebagai *follow-up* nya segera akan bertengger stadion olahraga yang sedang dibangun di kawasan Lembah UGM. "KONI Pusat tidak hanya memberikan konfirmasi ke daerah-daerah tetapi juga dalam rangka memberikan rekomendasi terhadap calon bahwa calon itu memang betul-betul berprestasi", jelasnya.

Sedangkan ketua Sekber Olahraga UGM Kusbiyantoro menanggapi rencana penjaringan bibit atlit tersebut mengajukan sebuah konsep yang diharapkan dijadikan rekomendasi pihak universitas. Bahwa pola seleksi hendaknya mengevaluasi prestasi siswa SMTA selama 5 semester serta mempertimbangkan nilai EBTA . Calon harus mempunyai prestasi olahraga yang menonjol dan rata-rata nilai EBTA tidak boleh rendah dari 6,50, sedangkan keputusan final berada pada Panitia PBAD Pusat di UGM. Selain itu juga diatur mengenai mekanisme penetuan skor prestasi olahraga yang ditentukan oleh peta kekuatan cabang olahraga, peringkat yang dicapai, jenis kejuaraan, dan frekuensi perolehan kejuaraan. Sedangkan jumlah yang diusulkan maksimum 5 % dari seluruh mahasiswa baru.

Memang kehidupan olahraga di kampus senantiasa mengalami fluktuasi prestasi dan fenomena belakangan ini mengindikasikan lesunya prestasi olahraga mahasiswa UGM. Nampaknya ini mengilhami rektorat untuk menelurkan program penjaringan atlit olahraga. Namun untuk menggapai sebuah prestasi bukanlah mudah. Di dalamnya diperlukan suatu manajemen pembinaan yang solid dan dana yang tidak sedikit. Lalu siapkah UGM mengantisipasinya? Mahasiswa Fakultas Ekonomi ini menuturkan bahwa sebenarnya UGM mempunyai Pusat Studi Olahraga namun dalam prakteknya belum kelihatan. Sehingga diharapkan ada *follow-up* setelah penerimaan atlit ini. " Maka untuk itu kiranya dari pihak universitas tentunya harus mempersiapkan dari segi fasilitas, kemudian pembinaannya."



Unit Selam, telah lama ada di UGM
Belum memberikan kontribusi prestasi olah raga?

Dengan merangkul atlit-atlit olahraga bisa diprediksikan prestasi olahraga UGM akan naik peringkat. Namun di balik itu semua ini nampak sebagai jalan pintas dalam mendongkrak prestasi, dengan tidak memperhitungkan kendala akademis. Seperti halnya pada program PBUD, setelah dievaluasi ternyata mahasiswa UGM yang DO (*drop out*) justru lebih banyak dari program PBUD dari pada yang reguler. Hal ini mungkin terjadi pula pada PBAD. Jadi untuk sebuah prestasi perlukah dikorbankan nilai-nilai akademis ?

A. Riyanto
K.Rosyadi, L. Abid

Modernisasi Perpustakaan di Kampus Tua

DI TENGAH maraknya pembangunan fasilitas fisik di lingkungan UGM, perpustakaan, saksi sejarah yang turut menghasilkan para cendekiawan, seakan makin surut popularitasnya di kalangan mahasiswa. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perpustakaan UGM Unit II di kawasan Jl. Kaliurang, misalnya, masih saja setia dengan buku-buku tuanya. Tak heran, lebih banyak pengunjung yang sekedar numpang belajar untuk ujian dibanding mereka yang bermaksud meminjam buku. Lain lagi dengan perpustakaan di beberapa fakultas yang mengaku tidak mempunyai satu rupiah pun untuk pengadaan buku. Kalaupun ada buku baru itu hanya sekedar hadiah saja.

Semenjak SK Rektor UGM No.UGM/004/471/UM/01/37 tentang Sentralisasi Perpustakaan digulirkan 17 Januari 1990, semua perpustakaan fakultas dan perpustakaan khusus di lingkup UGM seperti perpustakaan lembaga dan pusat-pusat studi otomatis berada di bawah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Perpustakaan UGM . Sistem ini, menurut Dra. Murianti, MLS, pimpinan UPT Perpustakaan UGM menimbulkan kesulitan dalam hal koordinasi. Soal manajemen dan dana bagi perpustakaan fakultas sampai saat ini masih diserahkan pada kebijaksaaan masing-masing fakultas. Untuk fakultas yang kaya dengan perhatian yang besar, otomatis perpustakaannya akan tumbuh pesat. Sedang fakultas yang kering, biasanya perpustakaannya pun akan kering.Koordinasi yang mampu dilakukan hanya sebatas mendapatkan kesamaan pelayanan dan kesamaan program. Di UGM, Perpustakaan fakultas tumbuh lebih dulu dari perpustakaan pusat tahun 1951, beberapa fakultas seperti kedokteran, sastra dan hukum tahun 1945 (sebelum menyatu menjadi UGM, red) sudah mempunyai perpustakaan. Dana dari universitas untuk fakultas diserahkan dalam bentuk DPP SPP maupun OPF untuk seluruh kegiatan fakultas, termasuk perpustakaan. "Jadi kalau ada fakultas yang tidak mempunyai dana, sebenarnya dana itu ada, tapi tidak diberikan, dipakai untuk yang lain, yang dianggap lebih *urgent*" ungkap Bu Mur.

Padahal idealnya suatu perpustakaan, sebagaimana diungkapkan Drs. Harowi, dosen program D3 Perpustakaan UGM, harus mampu memenuhi kebutuhan pemakai. Baik kebutuhan belajar-mengajar, penelitian, mencari peraturan, alamat-alamat tertentu dan sebagainya. Namun yang terjadi saat ini, perpustakaan umumnya baru pada tahap berkembang. Alasannya pemerintah sendiri belum lama memberikan penghargaan atau perhatian yang lebih serius terhadap perpustakaan. Di samping itu, dari sisi sumberdaya manusianya, banyak pustakawan tidak dididik di bidang perpustakaan. Bahkan menurut Trisnu, ketua SM Fakultas Sastra ada anggapan sementara orang bahwa perpustakaan adalah tempat buangan pegawai yang rendah kualitas kerjanya. Entah hal itu benar atau tidak. Namun menurut Muryanti, selain dana kesulitan memang terletak pada *man power* atau pustakawannya.

Sistem perpustakaan di UGM, di mana ada perpustakaan pusat kemudian perpustakaan fakultas, menurut Harowi masih sulit dirumuskan. Keberadaan perpustakaan fakultas tampaknya tidak lepas dari pandangan para dekan yang masih menghendaki perpustakaan ada di tiap fakultas. Dengan kondisi semacam itu sentralisasi perpustakaan hingga sekarang baru berhasil dari segi pustakawannya. Sementara dari segi fisik nampaknya belum ada kesiapan untuk membangun perpustakaan besar yang representatatif untuk memenuhi kebutuhan seluruh fakultas. Pengembangan perpustakaan pusat yang kuat, menurut Harowi, diawali dengan perkembangan fisik, seperti akan dibangunnya gedung lain sebagaimana yang dijanjikan rektor (menurut Bu Mur akan dibangun pula tempat khusus untuk seminar atau diskusi bagi mahasiswa). Kedua, pengembangan sumberdaya manusia, dengan cara mengirim pustakawan mengikuti pendidikan formal maupun non formal seperti diklat dan penataran. Ketiga, pengembangan sarana, perangkat keras dan perangkat lunak.

"Belum tentu orang tidak protes jika perpustakaan disentralisasi" tegas asisten Pembantu Rektor I, Dr.Ir.Toni Atyanto Dharoko M, Phil. ketika ditemui **BALAIRUNG**. "Kalau disentralisir kan pegawai bisa berkurang", lanjutnya. Dalam hal ini beliau lebih menekankan pada kemungkinan terjadinya multi akses antar perpustakaan fakultas. Dalam perkembangannya, suatu ilmu tentu membutuhkan bidang lain yang harus dipelajari. Karena itu, saat ini sedang digarap adanya satu keanggotaan yang bisa dipakai di seluruh perpustakaan di bawah UPT Perpustakaan. Berkaitan dengan ide sentralisasi tersebut Pak Harowi sempat melontarkan gagasannya untuk mengembangkan beberapa perpustakaan fakultas yang cukup maju saja. Seperti di Universitas Nasional Singapura, dimana tidak semua fakultas mempunyai perpustakaan tapi cukup dalam kelompok-kelompok.



Perpustakaan Pusat UGM
Masih dalam taraf berkembang

Lepas dari setuju tidaknya atau siap tidaknya menghadapi sentralisasi perpustakaan, peningkatan infra struktur seperti penambahan buku, majalah, jurnal secara rutin baik lewat pembelian atau bantuan harus terus diupayakan. Tentu saja hal ini berkaitan dengan dana. Dana rutin 35 juta rupiah per tahun khusus untuk pengadaan buku bagi perpustakaan pusat ternyata belum mampu mengejar penerbitan buku yang ada. Sementara dana universitas yang dialokasikan untuk perpustakaan oleh masing-masing fakultas sampai saat ini masih sulit untuk dipantau. Beberapa fakultas nampak cukup 'cerdik' dalam menggali dana, yaitu menggalang kerjasama dengan suatu BUMN. Namun fakultas lain nampaknya terpaksa menarik dana tersebut dari para mahasiswa. Seperti pernah terjadi di Fakultas Sastra, dimana mahasiswa harus membayar Rp. 10.000 untuk menjadi anggota perpustakaan. Hal lain dikeluhkan seorang mahasiswa program Extension Fakultas Teknik Arsitektur, yang keberatan membayar Rp. 100 setiap kali meminjam buku serta denda keterlambatan sebesar Rp.500 per hari.

Hal-hal semacam ini, ditambah pelayanan yang kurang baik, bisa jadi membuat mahasiswa makin enggan masuk perpustakaan. Untuk menjadikan perpustakaan sebagai "*second home*" , nampaknya masih perlu perjuangan panjang. Sekarang apakah ketidaktertarikan mahasiswa masuk perpustakaan karena minat baca yang rendah atau karena perpustakaan yang ada tidak mampu merangsang mahasiswa untuk aktif ke dalamnya ?.

Rinda Runi Anitasari
Agus R

Renik-renik kehidupan Wanita Lajang

Kini, fenomena wanita lajang makin dianggap wajar dan biasa-biasa saja. Sebuah gaya hidup barukah?"

ADALAH Ully Arta, wanita cantik yang belum kunjung menikah meskipun usianya telah jauh matang untuk mengarungi bahtera perkawinan. "Alasan saya melajang karena.....belum dapet (jodoh,red). Ha...ha...ha...Bagi saya perkawinan



Ully Artha
Apa boleh buat?

adalah sakral. Saya tetap mengharap itu terjadi pada saya," bintang film dan pemain sinetron itu mengungkapkan alasan kelajangannya kepada Linda dari **BALAIRUNG**. Jadi masih dalam kerangka mengharap? "Oh ya, jelas! Saya juga nggak mau terus-terusan begini." Kalau nggak dapat? "Ya apa boleh buat. Tapi saya masih bisa mengabdikan diri pada pekerjaan-pekerjaan lain, kok!" Ketika ditanya apakah ia kesepian, dengan tangkas ia menjawab bahwa dirinya tak pernah merasa sepi. "Waktu saya padat. Umur seperti saya pastinya sudah bisa mengantisipasi keadaan." Tambahnya lagi,"Saya banyak berbagi dengan sahabat-sahabat saya yang kebanyakan laki-laki. *Real friendship*!"

Ully Arta adalah salah satu contoh dari sekian banyak wanita lajang. Wanita lajang -tidak menikah meski usia telah mencukupi- menjadi fenomena menarik untuk disoroti, terutama di kalangan masyarakat yang memegang kuat nilai-nilai patriarki. Sebaliknya, pria yang melajang menjadi fenomena yang lumrah dan jarang ada orang yang terlalu mempermasalahkan.

Kalau dirunut dari latar budaya sebagian besar masyarakat kita, terlebih di kalangan priyayi Jawa, kelajangan seorang wanita merupakan hal yang melenceng dari jalur, tidak umum, tidak lazim! Dalam masyarakat Jawa tempo dulu misalnya, nilai-nilai yang dibebankan pada seorang wanita (pantas atau tidak pantas, baik atau buruk, manut-ngabdi pada suami) sebenarnya digunakan untuk membangun citra kekuasaan feodal aristokrasi waktu itu. Kedudukan wanita hanya sebagai pelengkap penyerta, kalau terlalu sarkatis untuk menyebut pelengkap penderita. Sehingga timbullah konsep 'kanca wingking' yang mempunyai makna bahwa peran wanita hanya di bagian belakang yang diartikan sebagai dapur. Ada pameo Jawa yang *'nylekit'* (menusuk hati,red)

menyentil kondisi tersebut, yang kurang lebih berbunyi:"*Gaweane wong wadon iku ora luwih saka kasur, pupur, lan dhapur.*" (Urusan wanita itu tidak lebih dari kasur, bedak, dan dapur, red). Betty Lyons, dalam bukunya '**Three Womens Alone**' yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul 'Wanita-Wanita Lajang' , mendukung fakta-fakta di atas. Ia menyatakan, dalam masyarakat tradisional ada semacam keyakinan bahwa perempuan menemukan identitasnya lewat suami. Jadi, tidaklah mengherankan apabila mereka (masyarakat) memandang negatif keberadaan wanita lajang.

Berbicara mengenai wanita lajang tidak akan lepas dari alasan mengapa mereka melajang. Secara umum ada dua alasan utama. Pertama, karena alasan situasional: ada yang tidak menikah karena belum ketemu jodoh sehingga masih mempunyai kemungkinan untuk menikah, ada yang disebabkan oleh patah hati dan pengalaman-pengalaman traumatis masa lalu. **Dr. Sartini Nuryoto**, psikolog sekaligus sekretaris pada Pusat Studi Wanita UGM mencontohkannya dengan seorang anak yang selalu melihat tindakan kasar yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Dari sini akan terbangun dendam yang menyebabkan ia mengambil keputusan untuk hidup sendiri.

Faktor beban hidup bisa juga menjadi 'alasan tak disengaja' bagi seseorang untuk tidak menikah. Menurutnya,seorang wanita yang sejak masa mudanya membiayai dan mengurus adik-adiknya menyebabkan ia larut dalam kondisi tersebut dan ketika ia sadar ternyata usianya sudah terlalu tua untuk memasuki dunia perkawinan sehingga ia menjadi 'malas' untuk menikah. Seperti yang dituturkan oleh Ully Arta, "Dari dulu saya nggak punya keinginan untuk menikah. Saya hanya punya keinginan untuk menyekolahkan adik-adik saya ketika Bapak meninggal dan saya anak paling tua. Saya mengabdi membesarkan kelima adik saya....." Bedanya, Ully Arta masih membuka kesempatan untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

Alasan kedua, melajang sudah menjadi pilihan hidup (*way of life*). Alasan ini banyak dipengaruhi oleh keinginan untuk bisa lebih berkarier. Di sini karier menjadi orientasi utama. Ada beberapa wanita (yang mungkin akan semakin banyak) yang memutuskan tidak menikah demi karier karena mereka dihinggapi semacam ketakutan bahwa dirinya tidak dapat menyeimbangkan perannya sebagai ibu rumah tangga dan wanita karier. Kalau mau dilihat dari keuntungan waktu jelas wanita karier yang melajang lebih bebas dalam melaksanakan karya dan tugasnya. Mereka tidak lagi dibebani oleh tugas-tugas ibu rumah tangga pada umumnya.

Alasan kedua ini senada dengan apa yang mendasari **Prof. Dr. Umi Nastiti** -dosen Fakultas Filsafat UGM- untuk tetap hidup sendiri. Wanita yang masih kelihatan gesit dan lincah walaupun usianya telah menginjak separoh abad lebih ini juga masih aktif duduk dalam jajaran pengurus KAGAMA (Keluarga Alumni Gadjah Mada). "Saya menjalani pilihan hidup saya seperti ini (melajang) supaya saya bisa total mengabdikan diri untuk UGM....", tuturnya kepada **Iin** dari **BALAIRUNG**. "Saya berusaha menjalani hidup ini apa adanya dan sebaik mungkin sehingga hidup ini menjadi tenang." lanjutnya

Keberadaan wanita lajang di masyarakat memang tidak begitu mengenakkan (meskipun ia tergolong wanita 'baik-baik'). Sebab, di satu sisi ia adalah bagian masyarakat yang masih terikat dengan adat dan budaya yang ada. Sebagai individu , ia dengan leluasa dapat mengekspresikan keinginan atau cita-citanya, tapi tidak sebagai anggota masyarakat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena wanita lajang ini menjadi bahan pertentangan antara beberapa kelompok dalam masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Kelompok yang pro mengatakan bahwa hidup melajang merupakan hak pribadi seseorang, sama halnya dengan hak seseorang untuk menikah. Mereka merasa tidak berhak 'mengutak-atik' kebebasan individu yang bersangkutan. Sebaliknya, kelompok yang kontra lebih bersikap 'menyayangkan' kondisi tersebut. Apalagi wanita yang melajang itu cantik, pintar, dan pandai bergaul. Kelompok ini juga tidak setuju bila hanya demi karier yang lebih tinggi seorang wanita memutuskan untuk tidak menikah.

. . . dalam masyarakat tradisional ada semacam keyakinan bahwa perempuan menemukan identitasnya lewat suami. Jadi, tidaklah mengherankan apabila mereka (masyarakat) memandang negatif keberadaan wanita lajang.

Ada pendapat bahwa antara karier dan keluarga bisa jalan berbarengan, tergantung pada individu yang menjalaninya. Banyak wanita yang sukses berkeluarga sekaligus sukses dalam kariernya. Pandangan ini juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh **Drs. Hasan Basri** -dosen Fakultas Psikologi UGM- Beliau mengatakan bahwa fitrah seorang wanita adalah menjadi ibu. "Seorang wanita boleh saja berkarier, akan tetapi harus tetap mengutamakan kebahagiaan dan keutuhan rumah tangganya,"ujarnya seraya menambahkan,"Seorang wanita yang melajang adalah seorang yang egois karena memikirkan kepuasan dirinya sendiri. Berarti ia menolak dan tidak mensyukuri rahmat Tuhan yang telah diberikan padanya." Psikolog ini juga menjelaskan bahwa wanita lajang



Dr. Sartini Nuryoto



Drs Hasan Basri

yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan harus segera disadarkan. Mereka harus diberi pengertian bahwa pengalaman pahit tersebut tidak selamanya akan menimpa dirinya.

Lain Drs. Hasan Basri, lain pula dengan Romo Priyono Marwan. Pastur yang juga ahli ilmu psikologi ini berpendapat bahwa manusia diberi kebebasan untuk menanggapi wahyu atau sapaan Allah. Ada yang melalui hidup berkeluarga, dan ada yang tidak, alias hidup selibat (tidak menikah karena keyakinan iman). Apakah seorang wanita mau menikah atau tidak itu menjadi hak orang yang bersangkutan.

"Ada isu yang beredar bahwa seorang wanita lajang biasa memenuhi kebutuhan seksnya di tempat-tempat 'jajanan' atau menjadi WIL (Wanita Idaman Lain) bagi para suami yang *doyan 'nyambi'*."

Bersamaan dengan sikap pro dan kontra yang ada dalam masyarakat, isu-isu miring dan bernada sumbang pun tak ketinggalan berperan mewarnai romantika kehidupan para wanita lajang. Dari isu yang 'ringan' sifatnya sampai ke isu yang *nyerempet-nyerempet* masalah perilaku seksual. Dan agaknya isu yang terakhir ini senantiasa menjadi bahan pergunjingan menarik di kalangan masyarakat.

Di lain sisi -di kalangan para wanita lajang itu sendiri- terjadi sikap cuek dan acuh tak acuh. "Dulu saya 'ge-eran', ada orang ngobrol saja sudah saya curigai. Tapi sekarang tidak lagi. Yang penting tindakan saya baik pada tetangga dan sampai saat ini saya tidak menemui masalah," papar Dr. Umi Nastiti ketika ditanya bagaimana dirinya menangkal gosip yang mungkin timbul sehubungan dengan status lajangnya. Berbeda dengan Dr. Umi Nastiti yang pengajar, Ully Arta yang notabene seorang artis jauh lebih banyak menghadapi gosip. "Semuanya tergantung kita. Menurut saya lali-laki itu selalu mencoba dan barang cobaannya adalah wanita. Saya nggak pernah memberikan kesempatanpun buat mereka. Dan tanggapan masyarakat sekitar terhadap diri saya positif."

"Ada isu yang beredar bahwa seorang wanita lajang biasa memenuhi kebutuhan seksnya di tempat-tempat 'jajanan' atau menjadi WIL (Wanita Idaman Lain) bagi para suami yang doyan 'nyambi'."

Benar tidaknya isu-isu negatif tersebut memang belum dibuktikan secara empiris. Tetapi bagaimanapun juga status lajang kurang tepat untuk dijadikan sebuah patokan penilaian. Dan pada kenyataannya, status lajang tidak selalu berkorelasi dengan isu negatif yang di'cap'kan pada mereka. Maka tidaklah bijak, jika kita tergesa mengambil kesimpulan. *Audite alteram partem*, kita juga hendaknya mendengarkan alasan dan buah pikiran orang lain.□

F. Indirasari

S. Pratithasari, Amalinda S, C. Widiyanto



HATTA (PPO)

Kaum Intelektual DI NEGERI MONSTER

Yussac F. Ananda

***GOERGE ORWELL**, seorang essais terkenal abad ini, di musim panas tahun 40-an, berkisah bahwa jenis dan macam negara yang memerintah kita, pasti tergantung sebagian dengan sikap kaum intelektual yang dominan. Ketergantungan itu bertumpu pada sikap dan tanggapan para penulis, seniman, kaum intelektual dengan semangat liberalnya agar tetap hidup. Jikalau kaum intelektual terus-menerus dalam keadaan membungkuk pada kekuasaan, demikian tutur Orwell, barangkali memang keadaan itu yang patut mereka terima dan alami, untuk tidak mengatakan: yang mereka dambakan.*

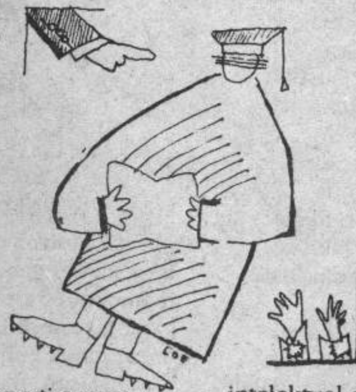
Kira-kira, maksud penulis yang bernama asli **Eric Arthur Blake** itu, persis dengan kalimat yang termaktub dari kitab suci, "Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau merubah nasibnya sendiri". Jika kaum intelektual puas dengan situasi demokratis hanya di ruang-ruang sekolah, di buku-buku teks, atau wilayah-wilayah imajiner belaka --dan acap dengan senang hati menerima otoritarianisme negara, berarti mereka telah menikam kebebasannya sendiri.

Di negri ini, kita tidak tahu, apa yang telah terjadi. Yang jelas, di kampus seperti UGM, seorang rektor mengundang pendekar bersepatu lars untuk "mengamankan" kampus. Seorang calon dekan di sebuah fakultas yang aktif dan suka sesumbar mengaku demokratis, hanya bisa tertawa getir ketika berkat peraturan yang mentransendir dukungan mahasiswa, --bahkan hasil rapat pemilihan dikalangan sivitas akademika sendiri-- dibatalkan. Lebih dari itu, tidak sedikit mahasiswa, termasuk para demonstran, yang santai dan tanpa kejelasan sikap, mengabaikan pasukan OTB (organisasi --pasukan-- tanpa bentuk) --bergaya wartawan tapi berambut cepak KGB-- lenggang kangkung di latar protes mahasiswa tak jarang pula di seminar-seminar.

Bahkan, seorang profesor besar perlu menggaris-bawahi "*off the record*" hanya untuk beberapa butir komentar yang menurut saya, tidak punya nuansa politis sama sekali. Ini juga terjadi, dan dengan mudah dijumpai, jika anda mengikuti diskusi-diskusi kecil dikalangan peneliti yang perlu "memohon maaf" jika prosentasenya menyinggung sara. Sindrom Permadisme dan Aditjondro-isme, merebak jauh lebih sistematik ketimbang virus AIDS. Illustrasi ini, mudah untuk diperpanjang daftarnya.

* * *

Adalah Thomas Hobbes, pakar politik yang memperkenalkan istilah "Negara Leviathan". Negara yang ibarat Tuhan, tapi bukan Tuhan --karena bisa mati, dan karenanya lebih tepat disebut hantu, atau sebutlah biar lebih keren, **Monster**. Negara semacam ini, dicontohkan dengan sangat baik oleh rezim Stalinis, kaum teokratis abad pertengahan, juga militerisme di mana saja --juga di negri ini, kita jujur saja-- berusaha terus-menerus mengontrol masyarakat yang dikuasainya, tidak saja dengan represi, tetapi juga hegemoni-hegemoni, yakni ketakutan-ketakutan totaliter yang menghantui warganya, termasuk warga ekslusif, seperti "kaum intelektual".



Dengan teknik seperti agama, yang mengontrol manusia dengan "dosa", tetapi tidak seperti agama --yang mengontrol untuk berbuat baik dan buruk menurut kehendak Tuhan--, melainkan baik-benar-bagus atau sebaliknya, menurut kekuasaan. Represi subtil semacam ini, anehnya tidak bisa kalau bukan tidak mau, dilawan para intelektual itu. Kaum intelektual itu serasa tidak memiliki apa-apa untuk membebaskan ketertindasannya --secara material atau spiritual --dari permainan Monster yang *menelikung* kebebasannya.

* * *

Tidak keliru, untuk dikatakan kekuasaan ternyata tidak saja bekerja dalam ketegaran jeruji-jeruji besi dengan --dan angkernya sepatu dan senapan tentara-- tetapi juga dengan kecanggihan yang subtil dan sistematis dalam pikiran-pikiran kaum intelaktual. Berbeda dengan Alexis de Toucqueville, penulis Perancis yang sangat kagum dengan demokrasi Amerika, yang melihat pikiran-pikiran kerap mengejek tirani-tirani, ternyata tirani-tirani juga pandai mengejek pikiran-pikiran. Bahkan, pikiran-pikiran itu sendiri, adalah tirani.

Tirani-tirani yang hidup dan bergerak ini, jelas terbaca dikalangan sastrawan kita --yang belakangan sibuk berpolemik-- merupakan contoh aktual. Dapat dipaparkan jika dulu Pramoedya dikenal sebagai seorang yang menindas kebebasan para sastrawan, kini sebagian para sastrawan yang pernah ditindasnya, berbalik melakukan hal yang sama. Para sastrawan yang disponsosri negara itu, tampak dari sekian eksemplar karya mereka yang diedarkan negara --bungkam saja ketika karya Pram dilarang beredar. Mereka adalah "Pram" di masa kini.

Musuh kebebasan kaum intelektual, kata Orwell lagi, masih ditahun- tahun yang sama di Perang Dunia II-- adalah para raja pers, tokoh film terkemuka, dan para birokrat. Tetapi bahwa dikalangan kaum intelektual, kian merosot hasrat kebebasannya, merupakan tantangan yang paling serius bagai kebebasan mereka. Di negara yang mirip sebuah Monster ini, para intelektual dengan sikap-sikap takzimnya pada kekuasaan adalah monster-monster yang jauh lebih dahsyat membungkam kebebasan ketimbang deraan pelor dan sepatu lars. ☐

ANARKISME

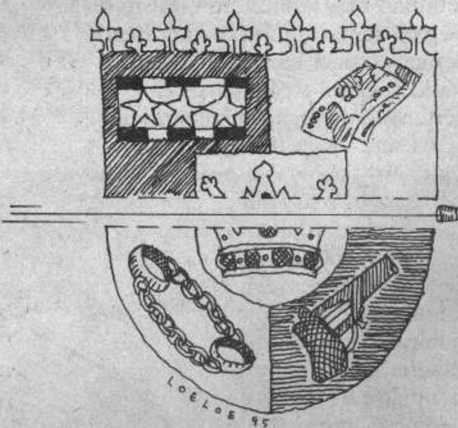
MUNGKINKAH negara bisa berlangsung tanpa memiliki wewenang? Jawabannya tentu saja tidak, karena wewenang itu *inheren* dalam diri negara. Dengan kewenangan itulah negara bisa mengatur warganya. Namun pertanyaan berikutnya adalah mungkinkah kewenangan negara itu digunakan tanpa unsur paksaan atau penindasan? Ini juga tidak mungkin, karena atas nama wewenang, paksaan atau penindasan menjadi syah.

Pertanyaan-pertanyaan itu sudah lama menggelisahkan kaum anarkis. Setidak-tidaknya bagi Josiah Warren, William Godwin,P.A. Kropotkin, Mikhael Bakunin, Piere Joseph Proudhon, Emma Goldman maupun Robert Paul Wolf.Ujungnya, penganut aliran ini sesuai dengan namanya, *an + archos* (tanpa penguasa), sampai pada kesimpulan bahwa negara tidak perlu ada, karena keberadaannya identik dengan penindasan. Bahkan gagasan demokrasi yang menghendaki pemerintahan oleh rakyat pun jauh-jauh hari dicampakkan oleh penganut aliran ini. Demokrasi dalam kacamata mereka adalah sebuah kemunduran. Musyawarah, sebulat apapun hasilnya, jika negara masih ada, hanyalah bentuk legitimasi dari penindasan.

Ungkapan yang sederhana yang barangkali mewakili kaum anarkis ini digambarkan secara menarik oleh Robert A. Dahl dalam dialog antara kaum anarkis dan demokrat.Seorang anarkis memberi argumen," Anda tidak dapat mengubah suatu negara menjadi sebuah negara yang baik, seperti halnya Anda tidak bisa mengubah seekor ikan yang busuk menjadi ikan yang segar dengan menuangkan kuah enak diatasnya." Dasar logika yang dipakai sebetulnya sangat sederhana.Karena semua negara sudah pasti memaksa, maka semua negara sudah pasti tidak baik. Karena semua negara pasti tidak baik, maka tidak ada orang yang berkewajiban untuk mematuhi atau mendukung negara manapun. Dan karena masyarakat tanpa negara adalah alternatif yang ada, maka semua negara harus dihapuskan.

Robert Paul Wolf, salah seorang pendukung aliran ini berpendapat, setiap manusia yang dewasa adalah manusia bebas secara metafisik. Artinya ia memiliki kebebasan kehendak dan memiliki kemampuan untuk menggunakan rasio. Karena itu dia bertanggungjawab atas tindakannya. Ia bertanggungjawab untuk mencapai keputusan moral yang diungkapkan lewat bentuk perintah. Ia membuat peraturan serta hukumnya sendiri. Pendek kata, ia adalah otonom. Sifat dasar manusia ini akan berbenturan dengan sifat negara. Ciri khas negara adalah wewenang atau hak untuk memerintah, sedangkan kewajiban manusia adalah otonomi atau menolak perintah. Konflik ini menurut Wolf tidak akan ada penyelesaian.

Satu-satunya jalan, kaum anarkis mengusulkan masyarakat tanpa negara,dimana masyarakat terdiri dari perkumpulan-perkumpulan suka rela. Seperti yang dipaparkan William Godwin, manusia secara naluri suka berkumpul, bekerja sama, berbuat baik, bersifat rasional. Maka apabila diberi



pilihan untuk bertindak merdeka, mereka dengan sifat itu akan membentuk group-group masyarakat yang secara sukarela bekerja demi tercapainya keharmonisan sosial.

Gagasan filosofis ini tentunya absurd. Karena membentuk group-group seperti itu nampaknya harus memutar mesin waktu, dimana masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sederhana seperti itu hanya ada dalam masyarakat primitif. Padahal masyarakat terus berkembang, menuju tatanan yang semakin kompleks. Unsur paksaan dan kekerasan akan tetap ada, pada masyarakat tanpa negara sekalipun.

* * *

Seabsurd apapun gagasan kaum anarkis, patut menjadi pelajaran bagi kita. Gagasan ini nampaknya muncul sebagai counter dari kediktatoran. Lihat saja Pyotr Alekseyevich Kropotkin (1842-1921). Penganut anarkis dari Rusia. Hidupnya pada masa *Tsar* Rusia, dipenuhi dengan penindasan.Kropotkin sendiri dikurung dalam penjara tahun 1874. Kemudian muncul gagasan, untuk menggulingkan suatu negara, buruh harus dilatih agar bertindak langsung (*direct action*) merebut kekuasaan. Akan tetapi, di tengah kemenangan kaum *Bolshevik*, ia dihadapkan pada kediktatoran baru. Walaupun Lenin mengatasnamakan diktator proletariat, penindasan dimana-mana tetap menyakitkan.

* * *

Karena menghilangkan negara adalah suatu hal yang mustahil, maka satu-satunya alternatif adalah mengontrol peran negara. Dalam hal ini, demokrasi barangkali adalah *minus malum*, pilihan terbaik diantara yang buruk. Di sinilah kekuasaan dapat dikontrol. Hal ini mengandaikan kekuatan masyarakat *vis a vis* negara, berada dalam posisi yang imbang. Dalam konteks negara berkembang, dimana negara sering berada pada pihak yang kuat, pemberdayaan masyarakat adalah prasarat bagi demokrasi itu sendiri. Sebab bagaimana mungkin si lemah mau mengkontrol si kuat.

Akhirnya, membiarkan negara dalam posisi yang kuat dan tidak terkontrol, menghadapkan kita pada dua pilihan. Pertama, munculnya sikap apatisme masyarakat pada negara. Sikap apatisme yang terus-menerus memunculkan delegitimasi rakyat pada penguasa yang bisa menjelma menjadi *civil disobedience* (pembangkangan sipil), ketidakpatuhan masyarakat pada negara.Kedua, munculnya ketidakpuasan massal, yang apabila diorganisir menyimpan potensi revolusi. Kedua-duanya mengembalikan kita pada situasi anarkis yang sama-sama tidak kita inginkan.

Sunarto Cipto Harjono

WANITA,

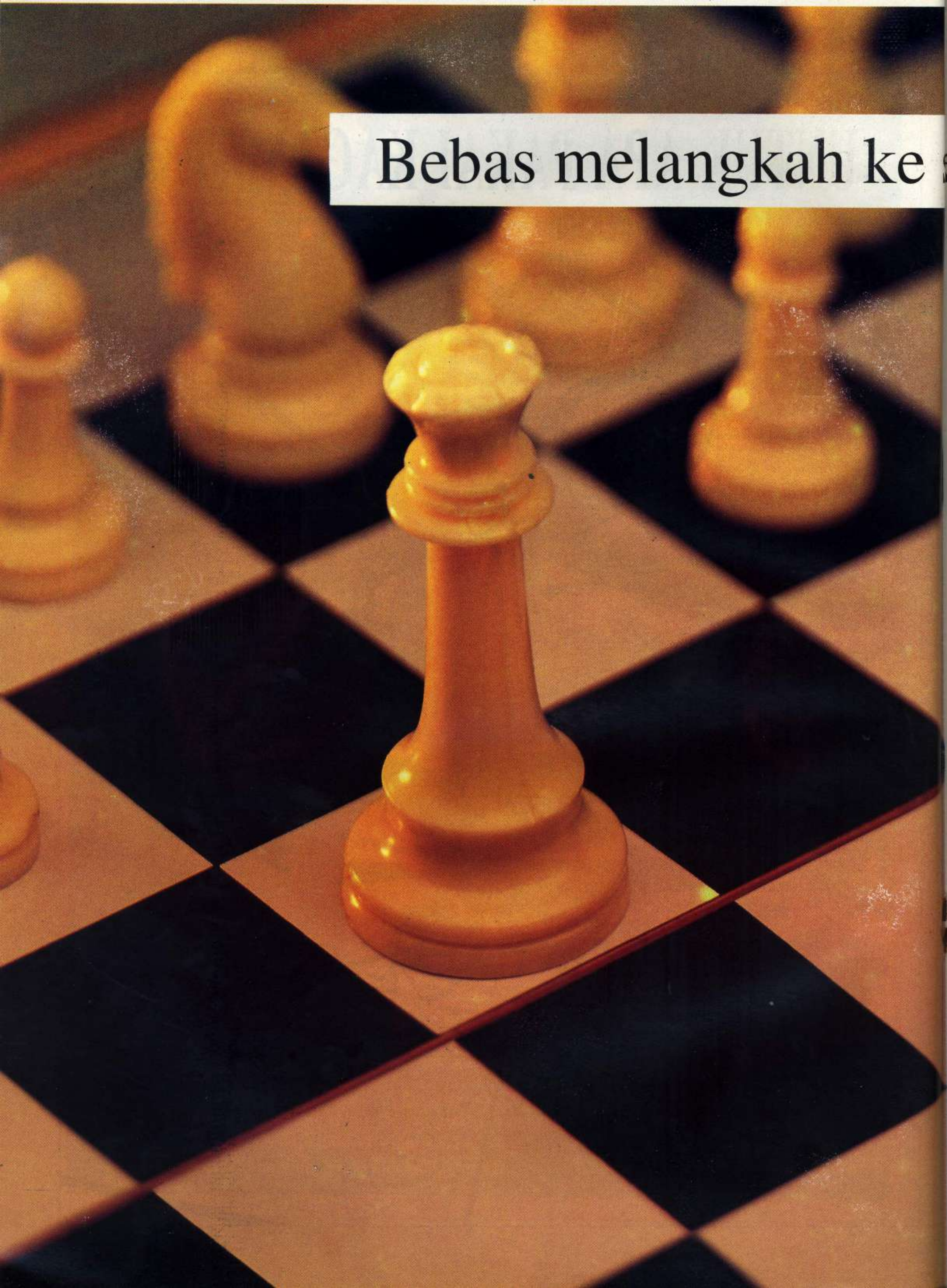
KERIKIL , PEMBANGUNAN



Wanita di bawah terik matahari itu bernama Mbah Karyo. Dulu di jaman Jepang berjualan gethuk. Lalu saat jaman berganti, ia jadi pemecah batu. Kapan tepatnya, Mbah Karyo tak bisa mengingatnya. Hanya saja saat geger PKI - begitu ia bilang - pekerjaan itu sudah dimulainya.

Mbah Karyo masih menekuni pekerjaan itu hingga saat ini. Selama pembangunan mesti jalan terus, kerikil senantiasa dibutuhkan. Dulu, waktu jaman Orla orang sibuk ngomong politik, kerikil senantiasa dibutuhkan. Apalagi sekarang, saat omong-omong melulu soal pembangunan, saat apa saja atas nama pembangunan. Lha, pembangunan apa lagi? Ya gedung-gedung, ya jalan raya, ya

Bebas melangkah ke



egala arah !



Apapun transaksi perbankan yang Anda perlukan datang saja ke Bank Rakyat Indonesia. Mulai dari pelayanan "Retail Banking" hingga "Corporate Banking", skala nasional maupun internasional, bidang pertanian sampai industri, semuanya tersedia di BRI. Kelengkapan produk layanan perbankan kami membuat Anda bebas untuk melangkah ke segala arah.

Pengalaman dan pengembangan usaha Bank Rakyat Indonesia sejak 100 tahun yang lalu, telah memberikan kemampuan untuk mengenal, memahami serta melayani para nasabah dengan berbagai tingkat skala usaha maupun kebutuhan pelayanan.

Nikmati kebebasan melangkah bersama BRI !



BANK RAKYAT INDONESIA

MELAYANI SELURUH LAPISAN MASYARAKAT

Maka, palu terus diayun. Kerakal dikerikilkan. Pagi sampai siang. Siang hingga sore. Bahkan malam hari kadang - kadang. Sekeranjang, *sekrayeng*,sekotak, sekubik..... Sebuah gedung menjulang, seruas jalan membujur.
Pembangunan jalan terus. Dan Mbah Karyo tetap tinggal dalam kesederhanaan penghidupan dengan bayaran dua ratus perak untuk sekeranjang kerikil yang dikerjakannya.

Mbah karyo toh tetap tersenyum. Bukan soal prospek atau soal optimis. Soalnya ia Jawa. Ia *kawula*. Dan ada *unen-unen nrima ing pandum*. Pasrah pada nasib.
Lalu ada yang kontradiktif di sini. Ada yang tetap merendah sementara tetap ada yang terus menjulang. Ada yang melaju sementara sebagian berhenti, atau dihentikan.
Pembangunan toh selalu butuh kerikil, atau sesuatu yang dikerikilkan.





Foto : Tri Wasono Sunu
Narasi : Dirmawan Hatta

anxietas: Kecemasan Menghadapi Perubahan

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pasti pernah merasa takut atau cemas terhadap sesuatu yang berkaitan dengan "yang akan datang". Anxietas adalah istilah kedokteran yang menggambarkan hal seperti itu; feeling of uneasyness, worry, extreemly unpleasant, and also fear to the feature.

ANXIETAS merupakan reaksi psiko-neurosis tubuh terhadap aksi yang mengenai seseorang, baik itu serangan fisik, perubahan atau tantangan lingkungan terhadap gaya hidup, ataupun masalah pribadi. Sangatlah menarik untuk membahas anxietas ini karena sering terjadi secara berlebihan terhadap seseorang yang belum stabil mental maupun pribadinya, namun sudah dituntut untuk bisa bersikap dewasa, karena secara fisik sudah besar seperti halnya mahasiswa.

Penyakit abad 20 tersebut normal menjangkiti setiap orang yang hidup di jaman ini, jaman yang penuh dengan segala macam perubahan sehingga menuntut adaptasi yang sangat tinggi dari masing-masing individu. Ia memang berkaitan erat dengan stress psikologi, namun lebih menjurus ke "ketakutan yang sangat terhadap masa depan". Menurut definisinya, stress adalah reaksi manusia secara fisik maupun mental terhadap stressor of live 'tekanan kehidupan', istilah Wasylenki dan Freeman dalam buku A Method of Psychiatry. Stress dapat timbul terus menerus, mendadak maupun kronis

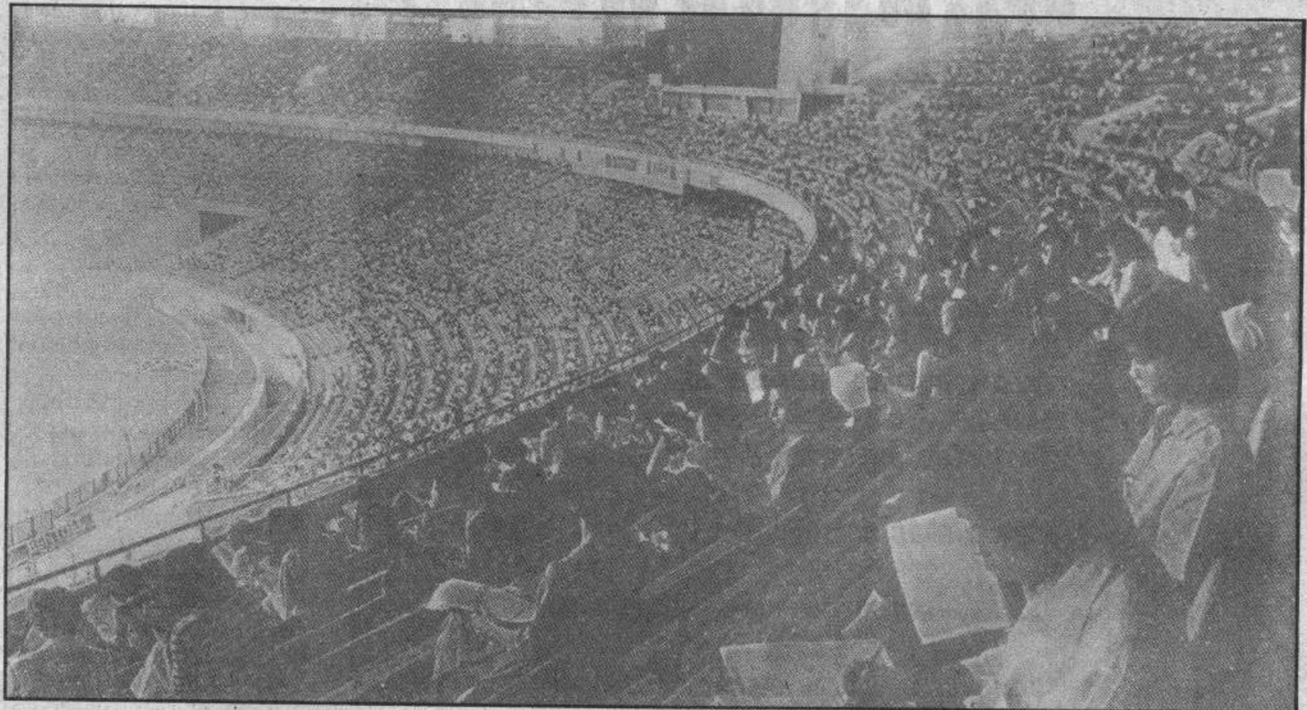
(tidak mudah dihilangkan). Reaksi manusia terhadapnya merupakan suatu usaha beradaptasi terhadap perubahan. Sedangkan Anxietas menurut Kolb dalam buku **Modern Clinical Psychiatry** adalah rasa khawatir yang dimanifestasikan dalam bentuk gangguan fisik maupun mental, yang dapat terjadi jika seseorang terlampau cemas dalam mengantisipasi masa depannya dan terus-menerus mengenang masa lampaunya.

Dalam keadaan normal, hal ini terjadi terhadap seseorang dalam situasi tertentu, yang biasanya gejalanya tampak dari gangguan kesehatan yang timbul. Entah itu gangguan saluran pencernaan (gastro-intestinal), konstriksi saluran pernafasan, kardiovaskuler, metabolisme ataupun sistem hormonal. Misalnya, karena terlalu merasa tidak menguasai bahan ujian (di sini ujian diibaratkan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masa depan), seorang mahasiswa mendadak sakit-sakitan pada saat musim ujian tiba. Dalam situasi demikianlah biasanya nilai ujiannya memang menjadi turun. Namun bukan karena tidak bisa dikuasainya materi ujian; seperti yang ditakutkan, tetapi karena ketakutannya itu justru membuat kondisi fisiknya turun sehingga ia tidak bisa belajar dengan baik. Contoh lain yang umum adalah timbulnya sakit maag atau asma secara tiba-tiba pada seseorang,tanpa infeksi dari kuman-kuman organik. Dalam hal ini pacuan syaraf parasimpatis efferent yang memacu sekresi lendir; yang dibawa melalui cabang-cabang nervus vagus, sampai ke organ-organ dalam seprti lambung pun berlebihan, demikian juga dengan produksi lendir saluran napas,gangguan inilah yang dikenal sebagai sakit mag dan sakit asma bronkhial. (Penyakit- penyakit ini memang tidak hanya disebabakan oleh anxietas saja, keduanya hanya merupakan contoh penampakan gejala gangguan kesehatan dari anxietas). Jika yang terpacu adalah saraf sympatis, maka fenomena yang tampak pada seseorang dengan anxietas tinggi adalah berdebar-debarnya jantung, keluarnya keringat dingin pada telapak tangan dan kaki, Reaksi ini disebut reaksi siaga yang ditandai dengan vasokonstriksi umum, takikardi, vasodilatasi otot-otot skelet. Penyempitan pembuluh darah pada kulit dan otot skelet menimbulkan gangguan metabolisme setempat sehingga terasa dingin atau disebut berkeringat dingin.

Makmuri Muchlas dalam Jurnal Kedokteran dan Farmasi MEDIKA (Mei, 1994) menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara stress anxietas dengan obesitas atau kegemukan. Orang dapat saja menjadi gemuk (nafsu makan bertambah) akibat stress dan anxietas, dan bisa juga sebaliknya: menderita anxietas karena kelebihan berat badan. Dalam hal ini wanita lebih sering mengalaminya.

Penampakan gejala anxietas memang bisa bermacam-macam. Jika hal itu timbul pada seseorang yang sedang menghadapi masalah yang nyata, hal tersebut masih dikategorikan normal. Tetapi jika anxietas timbul tanpa sebab yang jelas, maka hal itu dikategorikan anxietas neurosis. Contohnya jika seseorang yang sehat tanpa penyakit tertentu, tanpa sebab yang jelas tiba-tiba merasa berdebar-debar, atau timbuk tremor pada tungkai atau tangan, sesak napas yang sebelumnya belum pernah diderita, pusing yang sangat seperti kepala mau pecah, berkali-kali merasa tidak enak pada lambung, atau dapat juga berkeringat dingin setiap hari. Anxietas neurosis ini bisa jadi merupakan perkembangan yang merugikan bagi kesehatan seseorang. Biasanya hal ini disebabkan karena masalah yang sedang dihadapi terlalu berat, terlalu lama ketegangan batin berlangsung, atau bisa jadi karena ia tidak bisa "berkompromi" dengan

REPRO - KOMPAS



Suasana ujian Masuk Perguruan Tinggi

Kecenderungan menambah jumlah penderita Anxietas masa depan?

"hatinya" untuk menerima kenyataan yang dihadapinya. Untuk saat ini faktor keturunan memang dimungkinkan, namun bukanlah faktor dominan dan persentasinya sangatlah kecil.

Faktor resiko anxietas neurosis adalah orang-orang yang bekerja dalam "lingkungan stress tinggi. Misalnya saja dalam dunia bisnis, ikatan kedinasan, jurnalis, siswa yang dihadapkan pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi dan sebagainya, dimana tuntutan kerja terhadap waktu dan prestasi adalah sangat tinggi. Namun, biasanya orang-orang telah terjun dalam dunia tersebut dan berhasil untuk kurun waktu yang lama adalah orang-orang yang sudah "terseleksi oleh alam", artinya sudah terbukti bahwa ia "tahan banting" akan tuntutan lingkungan, maka mereka biasanya justru terbebas dari anxietas. Jadi yang menderita anxietas itu adalah orang-orang yang tidak lolos seleksi alam tersebut. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mampu cepat beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi, atau justru sebaliknya, bereaksi terlalu berlebihan terhadap sesuatu yang baru terjadi, sehingga menimbulkan kecemasan yang sangat akan masa depan.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang paling bisa untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hidup di gurun ia bisa, hidup di kutub pun ia bisa. Konsep inilah yang sebaiknya dimengerti pada penderita anxietas. Memang jika pada mulanya ia hidup di "gurun" kemudian mendadak harus pindah ke "kutub" maka penyesuaian yang harus ia lakukan adalah luar biasa sulit, bahkan kedengarannya mustahil. Tetapi bukankah manusia juga yang dikaruniai akal oleh Penciptanya? Jika di "kutub" atau lingkungan yang baru itu ia bisa menciptakan mantel bulu yang hangat atau pemans ruangan yang canggih, maka kesulitan untuk hidup di lingkungan yang baru dapat sedikit dikurangi. Malah yang terjadi adalah kemampuan untuk mengembangkan pemikirannya dari pengalaman yang baru saja ia peroleh. Tentu saja hal itu tidak mudah, bahkan butuh waktu yang lama.

Pengobatan untuk penderita anxietas memang didasarkan pada stimulus yang timbul. Misalnya jika keluhannya adalah sakit lambung, maka pengobatan yang pertama dilakukan adalah menyembuhkan sakit lambungnya lebih dahulu. Demikian juga jika keluhannya adalah sakit kepala, berdebar-debar dan sebagainya. Namun jika sakit yang sama sering kali muncul tanpa sebab yang jelas, atau selalu muncul pada waktu-waktu tertentu (misalnya sering sakit pada saat ujian) maka dalam hal ini perlu diwaspadai adanya anxietas neurosis. Masalahnya, penderita anxietas sendiri biasanya tidak akan mengakui kecemasan yang sedang ia rasakan. "Saya ini sakit perut, kok dibilang cemas." Atau, "Saya ini sering pusing-pusing, kok malah disuruh melapangkan pikiran" dan sebagainya. Hal itu akan bertambah jelas pada seseorang yang dalam hidupnya selalu di bawah lindungan ornag lain, atau justru sebaliknya, yaitu orang selalu mampu menyelesaikan setiap beban yang ada di pundaknya. Kedua karakter tersebut mempunyai kecemasan yang sama yaitu: takut gagal. Namun yang pertama adalah takut gagal jika tidak mendapat bantuan dari orang lain atau pelindungnya, sedangkan yang kedua merasa gagal jika harus meminta bantuan orang lain. Obat penenang dapat diberikan kepada penderita anxietas, tetapi dikhawatirkan efek samping yang timbul akan memperparah sakitnya, yaitu timbul ketergantungan obet. Dalam dunia medis, pemberian obat penenang sangat tidak dianjurkan, kecuali jika kondisi penderita memang benar-benar membutuhkannya. Jadi, untuk kasus anxietas dan berbagai kasus gangguan jiwa ringan, empati dari orang yang paling dekat dengan penderita adalah sangat mendukung kesembuhannya. Empati tidak sama dengan simpati. Dalam simpati orang berusaha mengerti perasaan orang lain, sedangkan untuk empati ditambah pula kemampuan untuk mendengarkan dan ikut merasakannya.

Olah raga, oleh sebagian pakar kesehatan dipandang mampu mengurangi anxietas. Sebab, dengan olah raga yang teratur metabolisme tubuh akan menjadi lancar sehingga energi untuk cemas tersebut bisa disalurkan menjadi tenaga untuk olah raga yang akhirnya akan berguna bagi tubuh. Dengan olah raga, kebutuhan akan makanan tentunya meningkat, hal ini justru mengurangi terjadinya sakit maag. Atau keadaan tubuh yang lelah sehabis olah fisik, akan memudahkan ia beristirahat atau tidur, dan hal ini akan sangat berguna bagi penderita anxietas dengan penampakan gejala susah tidur.

Banyak tes psikologi membuktikan bahwa orang-orang sukses adalah orang-orang yang mempunyai rasa cemas tinggi, daya stress tinggi, serta banyak menghadapi konflik. Tetapi mengapa mereka tidak menderita anxietas? Sebab mereka dapat menerimanya dan melaluinya serta menyelesaikanya dengan baik, sekaligus mempersiapkan diri untuk yang akan datang. *Well, the show must go on, right?* Ya, meskipun rasa cemas, stress dan konflik mereka tinggi, namun ambang stress mereka tinggi pula. Maksudnya, kalau orang biasa dikenai sebuah stress (tekanan lingkungan) langsung anxietas, maka untuk orang-orang sukses tersebut baru bisa anxietas kalau sudah menerima seratus stress misalnya. Sebenarnya ketakutan terhadap "apa yang akan terjadi" atau anxietas ini sudah sejak dahulu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Justru kecemasan itu adalah bagian dari keberhasilan. Salah seorang ulama pernah mengatakan bahwa manusia selalu dihadapkan pada dua fenomena masa datang. Yaitu berhasil atau tidak berhasil. Justru karena kemungkinan sama kuat itulah maka seharusnya manusia menempati titik motivasi berusaha paling tinggi. Sebab jika ia tahu kemungkinan usahanya pasti berhasil, maka secara teoritis grafik motivasinya akan menurun. Untuk apa ia berusaha kalau nanti pasti berhasil. Demikian pula jika ia tahu bahwa kemungkinan usahanya itu pasti berhasil, maka grafik motivasinya akan lebih turun. Lain halnya jika ia selalu dihadapkan pada dua kemungkinan yaitu berhasil atau tidak, maka ia akan sampai pada posisi titik motivasi untuk berusaha semaksimal mungkin. □

Mora Claramita
mahasiswi Fak. Kedokteran UGM
(dari berbagai sumber)

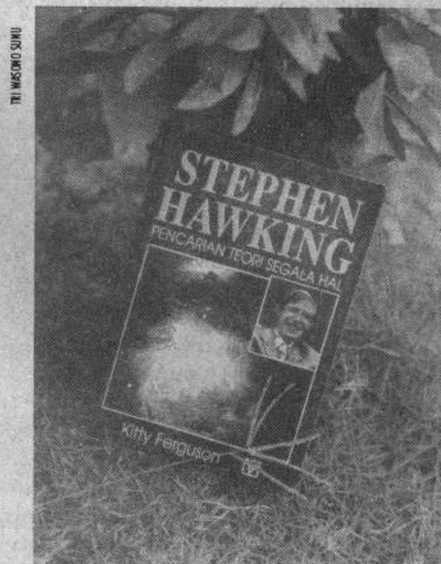
Judul Buku :
STEPHEN HAWKING;
PENCARIAN TEORI SEGALA HAL
Penulis :
Kitty Ferguson
Penerjemah :
A. Hadyana Pudjaatmaka
Penerbit :
PT Pustaka Utama Grafiti,
Jakarta, 1995
Tebal :
252 + x hal.

Alam Semesta dalam Teori Penciptaan

BARANGKALI kita belum pernah menjumpai sekelompok mahasiswa Fisika melakukan aksi di Kampus Bulaksumur dengan membawa keranda bertuliskan *Physics has done*, seperti di Wisconsin University, Medison Amerika Serikat. Bukan karena isu berakhirnya pencarian teori super terpadu belum merambah Indonesia, tetapi karena memang gagasan itu belum terwujud secara sempurna. Itulah yang dapat disimpulkan dari buku ini. Setidaknya obsesi ilmuwan Fisika untuk mewujudkan teori yang dapat memecahkan segala persoalan semesta raya ini masih disebutnya sebagai calon (halaman 16), calon teori tentang segala hal.

Kecenderungan ilmu-ilmu adalah mencari teori untuk memecahkan dan menjelaskan suatu fenomena. Seperti halnya Sosiologi mencari teori tentang kemasyarakatan, maka Fisika adalah teori yang bertugas menelusuri fenomena alam semesta (universe) ini. Selama ini masing-masing teori hanya bisa menjelaskan satu atau dua fenomena saja. Misalnya saja teori mekanika yang digulirkan Sir Issac Newton hanya dapat menerangkan kelakuan benda dalam skala makro. Tetapi bagaimana untuk menjelaskan pergerakan elektron atau bahkan Quark?. Tidak terbatas pada itu saja, bagaimana apabila gaya-gaya elektromagnetik, gravitasi, elektro lemah dan kuat bisa dijelaskan dengan satu teori.

Gabung-menggabung gaya pun meruyak diberbagai laboratorium. Gaya nuklir lemah dan gaya elektromagnetik bisa digabung pada temperatur dan kerapatan yang sangat tinggi karena pada dasarnya kedua gaya itu mempunyai sifat yang sama pada kondisi fisik tertentu. Ilmuwan kini percaya bahwa gaya nuklir lemah, gaya nulir kuat, gaya elektromagnetik dan gaya gravitasi adalah empat kakas dasar yang mengatur alam semesta. Maka dicarilah format bagaimana menggabungkan keempat gaya itu. Melalui percobaan, Abdus Salam menyimpulkan bahwa keempat gaya dapat digabungkan bila diciptakan kondisi fisik seperti alam semesta berusia 10 pangkat minus 35 detik.



TRI WASONO SUNU

Satu hal yang ingin ditekankan dalam buku ini adalah teori tidak hanya yang menyangkut alam fisik semesta. Tetapi juga ingin dicari teori yang mampu menangani bagaimana kelakuan populasi makhluk hidup yang sangat dinamis, perilaku nilai bursa saham atau fenomena sosial lain dari manusia sebagai fenomena sekunder alam semesta bisa dicakup semuanya dalam calon teori ini.

Satu hal mengenai gagasan-gagasan Stephen Hawking adalah bahwa meskipun ia kini menjadi fisikawan teori tak tertandingi di jaman ini, tetapi bukan berarti ia satu-satunya. Terlalu naif untuk menganggung-agungkan Stephen sendirian. Kita masih boleh menyebut Subrahmanyan Candrasekhar yang terkenal dengan *limit Candrasekharnya.* Kemudian Abdus Salam yang bersama Steven Winberg, Sheldon L. Glashow telah berhasil memadukan gaya nuklir lemah dan gaya elektromagnetik. Artinya kesempurnaan kecendekiawanan Hawking juga didukung oleh ilmuwan lain.

Satu hal yang tidak dapat dihindari, bahwa dengan mencari teori yang mampu menjelaskan bergabungnya keempat kakas dasar alam semesta, bukankah itu berarti mencoba memahami pemikiran Tuhan ketika menciptakan alam semesta? Dan apakah itu bukan suatu hal yang mustahil bagi suatu makhluk? Itulah yang ditakutkan Einstein ketika itu. Ia berdiri ngeri diluar arena, menatap perdebatan sengit diskusi para ahli agama. Ini berarti pula bahwa dengan berhasil memformulasikan teori itu diharapkan bisa menjelaskan segala fenomena yang ada di alam semesta.

Tetapi seperti diungkapkan oleh Hawking, teori hanya seperangkat

aturan dan persamaan matematika. Apa yang memberi jiwa kepada persamaan-persamaan itu dan membuat suatu jagad raya untuk dijelaskan oleh persamaan itu?. "Seandainya saya tahu jawaban itu, maka saya akan tahu segala hal yang penting, maka kita akan tahu pikiran Tuhan. Tetapi saya tidak begitu optimis untuk dapat mengetahui mengapa jagad raya ini ada". (hal.216)

Lalu bagaimana jika seseorang benar-benar telah menemukan Teori Segala Hal itu? Hawking pun menjawab; setelah itu, jika mempelajari fisika akan seperti mendaki gunung setelah Mount Everest ditaklukkan. Jika itu berhasil pun baru sebuah awal, ia tak akan menjawab mengapa jagad raya ada.

Buku ini terbit di Indonesia menyusul dua terjemahan karya Stephen Hawking sebelumnya; Riwayat Sang Kala dan Lubang Hitam. Tampaknya pemikiran-pemikiran tentang kosmologi sains, khususnya Fisika teori semakin mendapat tempat di masyarakat Indonesia, termasuk awam, inikah tanda-tanda semakin meningkatnya intelektualitas bangsa? Kalau hal demikan benar maka ada baiknya pemikiran serupa milik Abdus Salam atau Candrasekhar juga diterjemahkan. Setidaknya menggugah kesadaran bahwa bangsa Asia seperti kedua tokoh terakhir ini sebenarnya sejajar dalam pemikiran dengan bangsa Eropa. Tetapi apakah pencarian itu sendiri akan berhasil? Kita tunggu saja.

Lais Abid
Fak. Biologi UGM

Politik Perbanditan

MALAM semakin mencekam dan angin yang menebar membuat suasana kian hening, sunyi dan sepi. Lentingan irama jangkrik memberi warna jiwa masyarakat desa yang sarat akan keluguan, kejujuran, kepolosan sekaligus ketakutan akan kekejaman, penindasan kala itu. Namun semuanya pecah dan porak-poranda oleh sebuah peristiwa di malam 9 April 1956 yang lalu, ketika Entong Gendut mengancam membunuh asisten wedana Batavia.

Fenomena di atas adalah sejarah yang sering digoreskan dan terdengar oleh kita. Bahkan saat ini pun deretan nama maling, bandit, jagal, perampok, garong bukanlah hal yang baru, melainkan sering terdengar. Keangkeran dan kegarangan melekat dalam kepala manakala kita mendengar serta membayangkan eksistensi mereka. Membunuh, memeras, memberontak, adalah sebutan yang tidak dapat dipisahkan darinya.

Kisah sarat kelam kehidupan para bandit bukanlah penggalan pristiwa yang harus dikuburkan begitu saja. Ia adalah cermin yang memantulkan bayangan sejarah yang layak ditelusuri akar kemunculannya. Karena cerita para bandit, maling atau perampok bukanlah milik masa lalu, namun juga masa kini. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita perlu membuka kembali lembaran kehidupan para bandit tempo dulu.

Buku ini merupakan bentangan ide-ide yang ditulis oleh Suhartono mengenai sejarah perbanditan yang ada di pedesaan Jawa antara tahun 1850-1942. Sebuah setting latar belakang perbanditan muncul ketika *Culture Stellsel* yang dikembangkan kolonial Belanda terhadap bangsa Indonesia.

Sejak berlakunya sistem tanam paksa yang kemudian disusul oleh sistem eksploitasi lain yaitu sistem liberal (1870-1900) dan sistem etis (1900-1942), eksploitasi agraris makin intensif dan petani menderita kemiskinan serta kelaparan. Tanam paksa untuk kopi tebu, tembakau, dan tanaman perdagangan lain dipraktekkan di seluruh Jawa. Di Vorstenlanden meskipun tidak berlaku sistem tanam paksa tetapi di daerah itu sudah berlaku sistem penyewaan tanah untuk perkebunan swasta yang dulu prakteknya menyerupai tanam paksa (hal.2-3).

Kondisi yang demikian telah menjadikan para petani terdesak total, bahkan hanya degradasi ekonomi, namun pada setiap lembaga yang mau melawan kolonial. Dalam penindasan ekonomi mungkin para petani bisa bertahan pada batas-batas tertentu, namun kesulitan ekonomi tersebut telah dikombinasi dengan peneroran psikologis sehingga kelaparan, kemiskinan dan kematian merupakan fenomena yang kerap kali terjadi, serta menjadi rutinitas dalam goresan sejarah saat itu.

Keadaan ini akhirnya melahirkan keputusan berani yang tidak bisa ditawar dan memang hanya ada sikap serta pilihan yaitu lawan!. Maka resistensi, pembunuhan, perampokan, pembakaran tumbuh subur seolah jamur yang tumbuh di musim penghujan. Dan ini menjadi trend baru ketika semua kran keadilan, kebijaksanaan telah

Judul Buku : Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa. Studi Historis 1850 - 1942
Penulis : Suhartono
Penerbit : Aditya Media, Yogyakarta, 1995
Tebal : 180 + xii

TRI WASONO SUNU



berganti menjadi eksploitasi serta penjajahan.

Sederetan nama-nama Sahak, Canot, Ija, Sakam dan Kamarudin merupakan aktor-aktor besar dalam sejarah perbanditan yang terjadi di Banten-Batavia pada paruh ke dua abad XIX. Perampokan dan pembunuhan bagi mereka adalah 'wajib' dikerjakan untuk melawan pengaruh kolonial. Hingga pemerintah kolonial jungkir balik untuk menangkapnya dan membendung keganasan mereka.

Intervensi kolonial ini tidak menjdikan para bandit menjdi jera, bahkan membuat mereka semakin berani untuk meningkatkan kualitas resistensinya. Nama-nama Entong Tolo dan Entong Gendut menambah deretan 'Robin Hood' bagi masyarakat Batavia untuk memporakporandakan dan menghancurkan eksploitasi kolonial, meskipun akhirnya mereka berdua diasingkan ke luar Jawa.

Perbanditan di Banten-Batavia seakan senyawa yang tidak dapat dilepas dari pembakaran, pencurian, resistensi yang berada di Yogyakarta dan Surakarta. Nama D.C.L. Blomnestein, Ngabari Ogodimejo (Klaten) merupakan dua dari sejumlah nama yang menjadi korban keganasan para pencuri dan kecu.

Pemberontakan yang muncul di Jawa Barat dan Jawa Tengah ternyata tidak 'seganas' dengan yang terjadi pada daerah Pasuruan serta Probolinggo (Jawa Timur). Ini terlihat dari narapidana yang ada ternyata sejumlah wanita sebagai aktor bahkan pemeran utama. Pencurian hewan, pembakaran kebun tebu bagi para bandit Pasuruan-Probolinggo merupakan strategi mematahkan ekspansi eksploitasi kolonial.

Membaca lebih jauh buku ini, perbanditan merupakan cara, politik bagi masyarakat petani yang tertindas, terinjak-injak haknya, kecewa dan tidak puas. Pada suatu keadaan yang telah dikondisikan oleh penjajah. Bagi mereka resistensi merupakan 'senjatanya kaum buruh' untuk memporakporandakan ketimpangan dalam mencari sedikit rasa keadilan yang merupakan haknya. Dan inilah politik paling ampuh untuk meredam sebuah rezim kedloliman.

Mendalami sejarah perbanditan dalam buku ini mungkin ada sejumlah benang merah yang dapat ditariknya. Bahwa istilah bandit merupakan istilah yang dikeluarkan oleh para penguasa manakala ada sekelompok masyarakat yang menggoyahkan dan mengganggu kekuasaannya. Itu berarti bandit selalu ada pada setiap rentangan sejarah sebuah pemerintahan. Bahkan saat sekarangpun bandit-bandit telah ada di Indonesia, yaitu orang-orang kritis terhadap sustu kebijaksanaan timpang, korup, manipulasi yang selama ini terjadi. Mereka demonstran, penghujat kepincangan penguasa adalah 'Robin Hood' bagi rakyat yang tertindas. Agustus 1995, muncul Kasus perusakan Pabrik Gula oleh massa di Jenggawah, Jawa Timur, adakah bandit di sana?

Khoirul Rosyadi
Mahasiswa fakultas Filsafat UGM

KISAH demokrasi modern dimulai dari sebuah komunitas kecil bangsa Yunani, tepatnya kota Athena. Di kota inilah terdapat sebuah sistem pemerintahan yang diberi nama demokratia. Kurang lebih berarti pemerintahan oleh rakyat. Kemudian demokrasi berkembang sangat pesat, bahkan saat ini telah menjadi sebuah kekuatan universal sebagai cita-cita politik, harapan dan sebuah ideologi.

Perkembangan demokrasi yang begitu pesat ini, memang sungguh mengherankan, sebab bagaimanapun juga masyarakat tradisional sebelumnya telah mempunyai kerangka pikiran yang membenarkan kekuasaan elit. Berangkat dari kenyataan ini maka dapat dikatakan bahwa etos demokrasi modern baru dapat menjadi kuat sesudah struktur-struktur masyarakat tradisional mulai roboh. Lebih jauh penulis mengatakan bahwa pengakuan terhadap demokrasi bukanlah karena demokrasi merupakan satu-satunya pemerintahan legitim an sich, melainkan karena terjadi perubahan dalam pandangan dunia, yang tidak yakin lagi akan kekuasaan mutlak.

Kemudian Franz membawa kita pada pokok pembicaraan tentang demokrasi di Indonesia. Diskursus tentang demokrasi di Indonesia dibagi menjadi tiga jaman; jaman sebelum dan menjelang proklamasi, jaman menjelang dan sesudah gagalnya demokrasi parlementer, dan diskursus kontemporer.

Diskursus demokrasi menjelang proklamasi banyak diwarnai perdebatan diantara para founding fathers, terutama antara Supomo dan Hatta. Supomo terutama menolak seluruhnya demokrasi barat, sedangkan Hatta tidak menolak demokrasi barat. Pemikiran tentang perlu tidaknya hak-hak dasar demokrasi diberi jaminan dalam undang- undang dasar, juga dipertanyakan antara Hatta yang didukung Moh. Yamin di satu pihak dengan Supomo dan Sukarno di pihak lain. Namun akhirnya para founding fathers itu mau kompromi, ini artinya walaupun terdapat perbedaan pendapat yang tajam, mereka dipersatukan oleh keyakinan yang lebih mendalam yaitu bahwa Republik Indonesia harus berdasarkan kedaulatan rakyat. Ini artinya para founding fathers tersebut mengakui bahwa rakyatlah yang berdaulat di Indonesia.

Yang paling menarik dari diskursus demokrasi di Indonesia tentu saja diskursus demokrasi

Judul Buku :

Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis

Penulis :

Frans Magnis Suseno, SJ

Tebal :

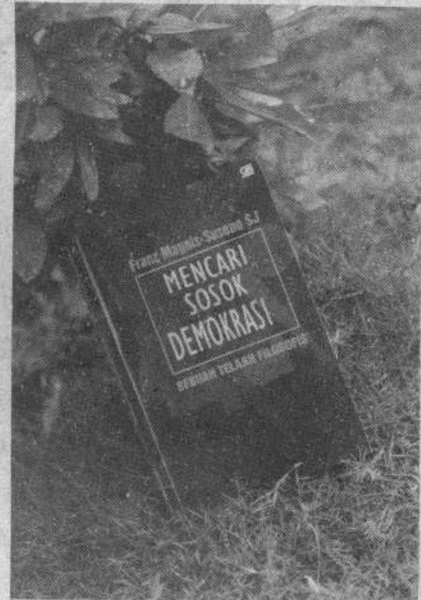
133 + xiii halaman

Pencarian yang Tak Kunjung Usai

kontemporer. Terdapat dua sisi yang berseberangan tentang demokrasi di Indonesia saat ini; yaitu ada ada yang menulis demokrasi Pancasila dengan tanda seru dan di sisi ada yang menulis demokrasi Pancasila dengan tanda tanya. Yang cenderung ke tanda seru pada hakekatnya membenarkan ciri demokratis sistem politik sekarang. Mereka pada hakekatnya berpendapat bahwa pola kehidupan politik sekarang pada prinsipnya merealisasikan cita-cita demokrasi dalam bentuk yang sesuai dengan kepribadian dan kondisi sosiokultural bangsa Indonesia. Mereka menunjuk pada ciri-ciri khas budaya bangsa Indonesia seperti kekeluargaan dan gotong- royong. Mereka juga menggarisbawahi bahwa demokrasi Indonesia harus melalui musyawarah dan mufakat; bahwa pembangunan bisa berhasil jika Indonesia mempunyai kepemimpinan nasional yang kuat. salah satu argumen penting dan khas selama pemerintahan orde baru adalah bahwa pembangunan akan berhasil jika keadaan aman dan stabilitas nasional mantap. Sedangkan sistem demokrasi seperti barat, hanya mengakibatkan anarkhisme.

Mereka yang mempertanyakan makna 'demokrasi Pancasila' cenderung menyatakan bahwa Indonesia sudah dapat, dan oleh karena itu harus mewujudkan sistem kekuasaan negara demokratis dalam arti sepenuh-penuhnya. Mereka menuntut jaminan efektif terhadap kebebasan menyatakan pendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan informasi, kebebasan berkumpul, peningkatan kadar perwakilan dalam MPR, pengefektifan fungsi legislatif dan kontrol DPR. Penghapusan larangan kegiatan politik di tingkat desa dan masyarakat luas, hak unjuk rasa, pemilu yang benar-benar bersih, realisasi negara hukum, jaminan terhadap hak- hak asasi manusia serta peninjauan kembali dwi fungsi ABRI. Lebih tegas lagi mereka mengatakan bahwa pemerintahan yang tidak dikontrol ketat secara demokratis tentu menjadi korup.

Dengan melihat kenyataan di atas agaknya Franz ingin membawa kita pada sebuah pertanyaan mendasar: Apakah "demokrasi Pancasila" saat ini sudah merupakan demokrasi yang benar-benar demokratis? Dalam buku ini Penulis tidak menilai kadar kehidupan demokrasi Indonesia. Penulis juga tidak membahas demokrasi Pancasila secara khusus. Tetapi melalui buku ini Franz memberikan gambaran tentang masalah-masalah sekitar demokrasi di Indonesia. Ada lima masalah yang sering muncul dan bersifat kontroversial yaitu; kedudukan pemerintah yang amat kuat, interpretasi pasal 28 UUD 1945, pembatasan pers, pembatasan kebebasan berserikat, berasosiasi dan membentuk partai baru, serta dominasi ABRI. Kemudian pembaca diajak membandingkan dengan ciri-ciri dasar demokrasi yang juga terdapat dalam buku ini.



TKI WASONO SUNU

Sekali lagi, membaca buku ini kita tidak akan mendapatkan penilaian yang tegas terhadap sosok demokrasi Pancasila, namun buku ini memberikan masukan bagi perumusan pertanyaan seputar diskursus tentang demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan judul buku ini, demokrasi memang merupakan masalah umum yang banyak dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun begitu selayaknya kita sependapat dengan Franz, bahwa untuk mewujudkan demokrasi Indonesia kita tidak perlu memulai dari titik nol artinya betapapun lemahnya institusi-institusi demokratis di Indonesia dan betapapun otoriter kehidupan politiknya, namun secara hakiki unsur-unsur demokratis itu sudah ada. Dan artinya lagi kehidupan demokrasi harus diwujudkan di Indonesia karena kedaulatan rakyat itu adalah tertinggi.

Agung Widiatmoko

BALI

CERMIN PARIWISATA NASIONAL YANG RETAK

Belahan kedua abad XXI ini ditandai oleh fenomena menarik berupa meningkatnya besaran dan intensitas mobilitas geografis manusia yang berupa pariwisata. Suatu peningkatan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupanya fenomena tersebut adalah implikasi dari kemajuan di bidang teknologi, ekonomi, politik, sosial kesehatan dan lain sebagainya yang memunculkan apa yang disebut "dunia global".

PeningkataN kesejahteraan dan pendapatan sebagian besar umat manusia telah mendorong mereka untuk mencari pemuasan kebutuhan-kebutuhan setelah kebutuhan mendasar terpenuhi (beyond biological needs) *yang antara lain berupa pengalaman hidup di luar ruang spasial dan ruang sosio-kultural mereka. Upaya-upaya pemenuhan kebutuhan tadi telah mendorong timbulnya industri pariwisata, suatu industri yang amat kompleks yang meliputi antara lain beberapa segmen usaha wisata seperti wisata budaya, wisata ekonomi, agro-wisata, wisata pedesaan, wisata religi, wisata rekreasi, wisata bahari, wisata MICE dan lain-lain.*

Indonesia mempunyai potensi yang amat besar untuk mengembangkan industri pariwisata dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki. Bagi pemerintah Indonesia --yang konon menitik beratkan pembangunan ekonomi, maka industri ini akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Merujuk ramalan seorang futurolog John Naisbitt yang mengatakan bahwa akan terjadi pergeseran peranan dari Barat ke Timur maka cukuplah untuk membuat "pemerintah" Indonesia semakin yakin dalam menekuni industri yang satu ini dan optimis akan "prospek ekonomisnya". Ada tiga alasan "yang sempat" ia kemukakan yaitu bahwa negara-negara Asia yang sebagian besar adalah negara bekas jajahan saat ini sedang giat-giatnya membangun setelah mendapatkan kemerdekaannya. Alasan kedua adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan adanya liberalisasi dan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi ia ajukan sebagai alasan ketiga.

Kiranya ramalan "Sang futurolog" tersebut di atas ada benarnya, paling tidak kecenderungan pariwisata di Asia adalah logis. Karena logika pariwisata adalah bahwa sebagian besar wisatawan selalu berasal dari daerah yang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi dari daerah lain --pada tingkat lokal, nasional dan internasional. Hal ini terbukti ketika diketahui bahwa pengeluaran terbesar adalah orang Amerika, Jerman Barat, Inggris, Jepang, Prancis dan Belanda. Kembali menambah keoptimisan negara-negara Asia akan semakin "membengkaknya" kue pariwisata ketika didapatkan angka pertumbuhan pariwisata di Asia-Pasifik pada tahun 1993 mencapai 6,4 %, sedang laju pertumbuhan pariwisata dunia hanya 3,8%.

Indonesia sendiri nampaknya sudah semakin populer sebagai tujuan wisata dalam konteks global; posisi Indonesia naik dari peringkat 26 pada tahun 1985 ke peringkat 22 pada tahun 1993, bisa mengungguli Jepang, Australia, Korsel dan Taiwan. Dalam konteks Asia-Pasifik-pun begitu pula; posisinya naik dari peringkat 11 ke peringkat 7, mengalahkan antara lain Hawaii. Jumlah perolehan devisa dalam US$ telah membesar dari 0,44% penghasilan industri pariwisata dunia menjadi 1,22% (hampir tiga kali lipat).

Melihat data Biro Statistik Pusat akan tampak bahwa pada tahun 1985 industri pariwisata menduduki posisi ke-6 sebagai penghasil devisa yang bernilai US$ 525 juta, di bawah migas, kayu, karet, tekstil dan kopi. Posisinya naik pada peringkat ke-4 pada tahun 1993 senilai US$ 3,35 milyar, berada di bawah migas, tekstil dan kayu.

"Suatu ketika" dalam salah sebuah pidatonya, Presiden Soeharto menyampaikan "harapannya" akan industri pariwisata Indonesia bahwa dalam periode Pelita VII nanti (1999-2004) bisa dicapai sasaran sebagai penghasil devisa nomor satu (sekitar US$ 8,9 milyar) dengan jumlah wisman antara 6 - 6,5 juta. Nampaknya pemerintah begitu antusias untuk "mengkatrol" industri ini sebagai penghasil devisa nomor satu. Angka yang tidak mustahil untuk dicapai melihat *demand* yang



Bisnis wisata
Akan mengundang lebih banyak turis lagi

terus bertambah dan tentunya perhitungan sumber daya dan infrastruktur yang telah dan akan terus dibangun untuk memenuhi tuntutan target tersebut di atas.

Dari kacamata ekonomi kelihatan bahwa industri pariwisata begitu mudah diabstraksikan dalam angka-angka. Target-target dicanangkan dan roda-roda ekonomi dipacu untuk segera sampai pada angka-angka. Sementara di pihak lain; aspek budaya dan lingkungan (*environment*), seolah "teranaktirikan". Pencapaian target ekonomi sering menyebabkan *over-exploitation* terhadap sumber-sumber wisata yang dapat menimbulkan dampak negatif pada bidang sosial, budaya, lingkungan dan lain sebagainya. Biaya sosio-kultural dan biaya lingkungan dari exploitasi berlebihan dan berwawasan jangka pendek dapat mengakibatkan deteroisasi pengalaman wisata yang berakibat detrimental pada arus wisata, yang justru akhirnya secara ekonomis merugikan. Mekanisme *market pricing* dan proses perencanaan pariwisata yang berorientasi ekonomi tidak selalu mengintegrasikan biaya sosio-kultural dan biaya lingkungan.

Tentunya tidak bisa kita menutup mata dari apa yang terjadi di Bali --propinsi yang terkenal dengan pariwisata budaya sebagai penghasil devisa tertinggi. Masyarakat Bali resah karena problema sosial yang sedang dialaminya begitu dilematis dan kompleks. Bali bisa dikatakan sebagai barometer pariwisata nasional (yang pada pelita IV mampu menggaet 1.313.767 wisatawan mancanegara dari 4,5 juta wisatawan yang datang ke Indonesia atau 29% dari total wisatawan yang datang ke Indonesia) seyogyanyalah jika Bali dijadikan "cermin" perencanaan pembangunan yang dalam hal ini berupa industri pariwisata.

***

"*Sejak pulau Bali ditampilkan sebagai 'Pulau Dewata' buat bangsa Eropa pada permulaan abad, berkali-kali kebancuran budayanya telah diramalkan oleh pengamat yang skeptis, yang setiap kali pula telah salah tebak. Dan memang sampai kini tetap ditemukan pojok-pojok pulau Bali yang 'idilis', yang tidak berbeda banyak dengan Bali yang diabadikan oleb fotografer legendaris Krause pada permulaan abad ke-20. Bali selama ini tampaknya telah berbasil menghadapi perubahan- perubahan tanpa mengalami transformasi struktural.*

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa belakangan ini, dan terutama sejak masuknya modal pariwisata dalam jumlah yang besar, di Bali sedang terjadi perubahan dalam skope yang baru...", demikian tulis Jean Couteau (Bali di Persimpangan Jalan, Jilid 2; Juni 1995) seorang antropolog berkebangsaan Prancis yang telah sepuluh tahun lebih tinggal dan meneliti masyarakat Bali. Ia juga mengatakan bahwa telah terjadi transformasi struktural di Bali.



Panorama pantai Kuta
Serasa di pantai Hawaii

"Bali Pulau Dewata", "Bali Pulau Seribu Pura", "Bali Pulau Sorga" dan masih banyak lagi sebutan yang diberikan pada pulau Bali. Predikat-predikat yang semakin lestari untuk Bali sebagai "pulau pariwisata budaya".

Tidak dipungkiri bahwa pulau Bali mampu mengundang rasa ingin tahu jutaan wisatawan asing dan keinginan untuk mengunjunginya. Secara tidak langsung Bali telah mengangkat nama negara Indonesia ke tingkat Dunia karena daya tarik budaya dan keindahan alamnya. Sejak masa kolonial pulau Bali telah mulai menerima tamu-tamu asing. Hingga banyak dari mereka yang kemudian menuliskan kesan dan rasa kekaguman pada alam dan budaya Bali. Maka berdatangan wisatawan asing ke Bali dalam jumlah yang semakin banyak.

Mulailah pariwisata menunjukkan daya ubahnya pada masyarakat di sekitar pertengahan tahun 1970-an. Patung, lukisan yang semula hanya untuk dipersembahkan pada dewa akhirnya mulai dipasarkan. Kawasan Ubud mulai diperkenalkan, Sanur begitu juga, tidak ketinggalan Kuta yang semula adalah pantai yang sepi bersemak belukar. Syahdan dalam waktu yang singkat tidak dinyana-nyana Bali menanjak tinggi menjadi tujuan "pelancongan" yang terkenal di dunia.

Demikian, hingga akhirnya pada sekitar tahun 1980-an Bali dibuka lebar-lebar bagi investasi. Lebih-lebih setelah pemerintah membuka diri bagi investasi asing. Mulailah terjadi ketegangan-ketegangan yang lebih serius di masyarakat. Pembangunan infrastruktur untuk pariwisata secara besar-besaran; pembangunan hotel-hotel berbintang, dan berbagai sarana lain pendukung pariwisata untuk memenangkan persaingan dalam menggaet wisatawan Asia-Pasifik atau bahkan internasional.

Pada tahap seperti ini pariwisata budaya di Bali patut dipertanyakan ada dan tidaknya, paling tidak untuk waktu-waktu mendatang. Keraguan itu cukup beralasan ketika industri pariwisata itu menjadi sedemikian "kapitalistik" dan mampu menggusur budaya lokal bahkan "menggusur" rakyat dari tanah moyangnya. Sehingga benar-benar tidak lagi mencerminkan Bali sebagai tempat pariwisata budaya.

Kepedulian terhadap kondisi yang sedang dialami Bali datang dari berbagai kalangan. Laporan tentang keadaan kaos sosio-kultural bertubi-tubi dimuat diberbagai media-massa. "Teriakan-teriakan" tentang rusaknya budaya Bali yang religio-magis itu, tentang rusaknya lingkungan Bali, tentang masyarakat Bali yang semakin konsumtif, tentang upacara-upacara keagamaan yang "terjarah" kesakralannya oleh industri

pariwisata dan masih segudang lagi gugatan yang ditujukan pada "Bali".

Sebuah lagu yang berjudul "Kembalikan Baliku" karangan Guruh Soekarno Putra pun merupakan rangkaian dari kegelisahan yang dialami Bali. Juga seorang putra Bali, Putu Setia yang mantan wartawan Tempo *Almarhum* merasa terpanggil untuk *urun rembug* dan mengungkapkan gugatan-gugatannya terhadap nasib yang dialami Bali dalam sebuah buku "Menggugat Bali". Dan masih banyak lagi gugatan-gugatan serupa terhadap kondisi Bali. Hingga sebuah buku yang terbit pada Juni 1995 yang lalu berjudul "Bali di Persimpangan Jalan" yang merupakan sebuah bunga rampai itu menarik benang merah bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar di Bali, telah terjadi perubahan struktural di Pulau Dewata itu.

Bertanya-tanya kita dalam benak tentang adanya "gugatan-gugatan" yang mengalir deras terhadap kondisi Bali. Sudah seberapa parahkah "sakit sosio-kultural" yang diderita Bali? Siapakah yang bisa dipersalahkan atau siapakah yang harus bertanggung-jawab? Pembangunankah atau pariwisatakah atau siapa? Kalau transformasi adalah keniscayaan sosio-historis, apakah ia selalu terasa "sakit" dan diwarnai oleh kondisi dislokasi, disorientasi masyarakat ?

***

Kalau pertengahan tahun 1970-an orang mulai gelisah dengan terjadinya penjarahan kesakralan upacara-upacara adat-agama; drama tradisional yang sakral yang "dijajakan" di hotel-hotel, "ngaben" ditunggangi nilai advertensi pariwisata, dan kasus-kasus lain yang menimbulkan rasa kegelisahan budaya. Maka dengan semakin dibukanya Bali oleh pemerintah untuk modal-modal besar pada akhir tahun 1980-an terbuka pulalah masalah-masalah sosial baru yang lebih kompleks.

Mobilitas penduduk Bali semakin meningkat dengan urbanisasi yang semakin tinggi angka pertumbuhannya. Data pada tahun 1971 tentang penduduk kota berjumlah 208.047 dan penduduk desa berjumlah 1.912.044, yaitu 9% berbanding 91%. Jumlah ini meningkat pada tahun 1992 yaitu 558.769 jiwa untuk penduduk kota dan 2.177.321 jiwa untuk penduduk desa atau 20,5% berbanding dengan 89,5%.

Pertumbuhan ekonomi juga telah mempengaruhi jumlah migran masuk ke Bali. Pada tahun 1984 jumlah migrasi masuk ke Bali lebih rendah daripada migrasi keluar karena pengaruh transmigrasi. Antara tahun 1971 sampai tahun 1990 migran masuk berjumlah 114.900, dan 221.600 jumlah migran keluar. Namun antara tahun 1985 dan 1990 menunjukkan perbandingan antara migran masuk dan keluar lebih besar migran masuknya, yaitu 65.967 orang migran masuk dan 52.404 orang migran keluar.


ASHIP AH

Sebuah Upacara Ritual Kematian di Bali
Terjarah kesakralannya; jadi tontonan turis

Dari data-data demografis di atas dapatlah ditarik kesimpulan bahwa memang tengah terjadi perubahan yang serius di Bali. Seorang Guru Besar Psikiatri Fak. Kedokteran Unud Prof. Dr. Luh Ketut Suryani mencatat kenaikan tingkat kriminalitas di Bali telah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Predikat Bali sebagai "Pulau Sorga" jelas terancam. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa problema-problema masyarakat Bali mulai "tergelincir" pada isu SARA. Adanya gejala-gejala kristalisasi agama dan etnisitas yang secara sosial tidak sehat.

Bali bisa jadi menyimpan "api dalam sekam". Kegerahan-kegerahan sosial-budaya di sana harus segera mendapat perhatian yang serius dan bijaksana. Terjadinya beberapa gelombang demonstrasi dalam "kasus Tanah Lot" dan kasus-kasus lain --yang sebenarnya lebih merupakan persolan-persolan sosial-politik, adalah peringatan yang tidak kurang nyata. Kebijakan-kebijakan pembangunan oleh pemerintah kembali harus dipertanyakan. Kenapa pembangunan "menggusur tanah rakyat?"

Dan pariwisatalah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini. Ketika bungalow-bungalow kecil milik rakyat ditindih hotel-hotel berbintang milik "orang-orang Jakarta" atau bahkan orang asing. Puluhan ribu kamar hotel telah dibangun dan mengguncang landasan budaya agraris Bali.

Slogan pariwisata budaya yang lekat pada Bali-pun harus dipertanyakan ketika kita menilik bahwa sektor pertanian di Bali telah bergeser perannya pada PDRB, yaitu dari 55,24% pada tahun 1970 menjadi 34,67% pada tahun 1990. Sedang pariwisata menyumbang sebesar 40% pada tahun 1990.

Demikian, di Bali pariwisata budaya "ditunggangi" pemerintah Orde Baru demi pemenuhan sasaran ekonomi dan politiknya. Pariwisata menjadi alat pembangunan ekonomi. Sehingga dipasoknya Bali dengan modal besar dan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran untuk "pariwisata modern" membuat rakyat Bali "gagap". Di satu pihak, tanah menjadi komoditas dan budaya konsumtifpun marak, urbanisasi meningkat, hening ibadah di pura-pura terganggu, dsb. Sementara di lain pihak katup-katup politik masih tertutup rapat sehingga mengakibatkan letupan-letupan ketidakpuasan rakyat Bali yang sarat akan "kegerahan" sosial-politik dan kultural.

Masyarakat Bali rupanya belum siap untuk suatu perubahan yang lebih besar. Sedang pembangunan ekonomi yang mapan dan mantab tidak dapat hanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah jika tidak menghendaki adanya frustasi sosial dan ketidakpuasan masyarakat. □

Aship A.H.

Perbincangan
Tentang Bali yang Bergoncang



Memperbincangkan tentang perubahan yang sosial yang mendasar di Bali menjadi menarik dan sangat perlu . . Kriminalitas, kekerasan dan berbagai gejala perubahan yang lain dari hari ke hari menunjukkan angka semakin tinggi tingkatannya membuat banyak orang tersentak dan bertanya-tanya, benarkah Si Pulau Dewata telah berubah dan mengapa perubahan meski mengarah ke "sana"? Apakah modernitas adalah satu-satunya muara perubahan? Tidak bisakah modernisasi terjadi tanpa menumbangkan "candi-candi kemanusiaan" yang telah berdiri berabad-abad yang lampau? Kini perubahan yang terjadi di Bali telah memaksa kita bertanya tentang predikat "ke-Pariwisata-Budayaan" Bali yang telah disandangnya sekian abad lamanya.

Berikut **Aship Agus Hasani** dari **BALAIRUNG** menemui 5 orang pengamat Bali dan akademisi yang adalah diantara mereka yang peduli terhadap permasalahan Bali. Mereka adalah **Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus, Prof. Dr. Luh Ketut Suryani, Ir. I Wayan Gelebet, Dr. Jean Couteau,** dan **Drs. Putu Suasta.**

Apa pendapat anda tentang pariwisata di Bali dan perkembangannya saat ini?

(I G.Ngurah Bagus). Secara ideal pariwisata adalah untuk Bali dan bukan sebaliknya. Tapi dengan masuknya modal besar oleh para investor yang membeli sekian luas tanah di Bali menimbulkan keresahan-keresahan sosial. Pariwisata sebagai jalan keluar menjadi diragukan karena ancaman-ancaman yang akan membawa kehancuran. Kalau dalam masyarakat agraris tanah masih dipakai untuk bercocok tanam di mana masyarakat masih terikat dalam kebersamaan . . . Tapi akhir tahun 80-an masuk modal besar sebagai proses globalisasi. Kalau tanah sudah di beli (dengan kekuasaan) akhirnya etnisitas budaya dikalahkan. Hal ini bisa membawa masyarakat dalam keadaan disorientasi, dislokasi masyarakat setempat. Sejak tahun 1993 masyarakat Bali mulai menginjak era industri awal di mana orang sudah mulai beralih ke sektor non-agraris juga hasil pertanian Bali sudah berkurang. Keadaan inilah yang saya takutkan jika pembangunan bersifat pragmatis.

(Putu Swasta). Ketakutan orang di sini 'kan bahwa Bali hanya akan menjadi obyek saja dari percepatan industri pariwisata. Dan memang sudah terjadi dalam keglamouran dunia pariwisata misalnya, dengan adanya investasi Bali dijadikan seperti "gadis muda yang telanjang" dan semua orang menginginkanya. Banyak sekali investor Jakarta yang datang ke Bali tidak memperhitungkan peta Bali, mereka hanya membangun hotel-hotel tanpa memperhitungkan lingkungan. Di daerah Ubud, Kuta, Nusa Dua 'kan sudah habis pantainya. Daerah laut diblokir tanpa memperhitungkan *"social space"*, ini menjadi masalah serius di masyarakat tapi diredam di permukaan seolah-olah tidak ada apa-apa. Masa orang mau pergi ke laut harus dijaga, yang bener saja ini namanya kan kolonialisme dari imperialisme baru oleh industri pariwisata.

Pilihan Bali pada industri pariwisata membawa segala konskuensinya kepada masyarakat Bali. Industri jenis lain juga mempunyai daya ubah pada masyarakat yang lain dari industri pariwisata. Kenapa masyarakat Bali tidak diberi kesempatan memilih jenis industri yang lain itu?

(I W.Gelebet). Masalahnya memang alam Bali tidak cocok untuk dikembangkan industri berat. Bahan baku untuk industri berat tidak tersedia di sini. Kalau bahan baku kita datangkan dari luar makan biaya.

Bagaimana halnya dengan "asas pemerataan"...

(Putu Swasta). Wah, agak susah nih... Ya, paling tidak terjadi penyerapan tenaga kerja. Pariwisata memang banyak menyerap tenaga kerja lokal. Tapi tenaga kerja profesional selalu datang dari 'luar'. Mungkin pemerataan tidak terjadi secara langsung.

(L. K. Suryani). Kalau dilihat dari pemerataan memang sebagian besar menikmati adanya pariwisata. Tapi sekarang kebanyakan bisnis wisata mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan penduduk lokal. Mengapa bukan buruh lokal yang di pekerjakan. Alasannya buruh lokal itu malas karena kebanyakan ritual, upacara. Kalau ini alasannya apakah tidak bisa dibina supaya mereka memenuhi syarat.

Usaha-usaha untuk pemberdayaan penduduk lokal?

(I W. Gelebet). Dari berbagai instansi. Program-program sektoral; pendidikannya diarahkan ke pasar kerja. Kursus-kursus ketrampilan dan program-program lain yang mendukung pariwisata.

Ada suatu masalah di sini dengan tenaga kerja yang sering tidak bisa mengikuti jam kerja karena jadwal upacara adat misalnya ?

(I W.Gelebet). Itu alasan klasik. Kelemahan (masyarakat Bali) yang terlalu dibesar-besarkan. Itu alasan mereka agar bisa menggusur peran serta masyarakat di daerah.

Bali menjadikan budayanya sebagai komoditas dalam pariwisata budayanya...

(Jean Couteau). Kalau agama, adat, upacara dijadikan komoditas mau tidak mau terjadi proses ketercerabutan, keterasingan yang tidak terelakkan.

(L. K. Suryani). Silahkan melihat Bali, tapi Bali jangan dijual; dalam arti apa yang kami punya biarkanlah tumbuh wajar. Pura misalnya, jangan menjadi tontonan. Sekarang pura dilihat seperti monumen-monumen saja, kalau ada upacara ditonton, "ceprat-cepret" difoto. Bagi kami upacara itu bukan untuk ditonton.

(Jean Couteau). Agama dan budaya dijadikan komoditas di Bali. Perubahan demografi etnis dahsyat dengan urbanisasi. Masuknya komponen etnis non Bali. Proses pengambilan keputusan ekonomi yang dari Bali pindah ke Jakarta. Tanah yang merupakan landasan utama bagi desa adat, di mana-mana dijadikan komoditas; diperjualbelikan. Semua itu merupakan goncangan yang maha dahsyat. Tidak berarti bahwa kita harus pesimis. Kalau saya merasa bahwa idealnya pembangunan hotel-hotel dikurangi, distop, untuk memberi kesempatan pada masyarakat bali mencerna perubahan-perubahan yang ada. Untuk bisa menerima tetangga-tetangga dari luar Bali. Untuk mendidik menejer-menejer lokal supaya pimpinan-pimpinan hotel juga banyak yang dari masyarakat lokal. Kalau kita bisa memperlamban laju industri pariwisata maka evolusi sosiologis bisa berlangsung lebih sehat, lebih mudah.

Ada yang mengatakan bahwa Bali masih relatif terjaga di tengah derasnya arus komersialisme industri pariwisata?

(Jean Couteau). ... mereka bilang Bali tidak berubah tetapi struktur penduduk sudah lain, distribusi tanah lain . Masalah tanah adalah masalah besar, tanah yang tadinya dikuasai oleh desa adat, misalnya tanah kering di desa-desa


ISTIMEWA

Demonstrasi Anti Pembangunan BNR-Tanah Lot
bak "air setetes yg membuat tumpah air dalm gelas"

mulai dijadikan tanah milik (pribadi), yang sesungguhnya bertentangan dengan konsep komunal tradisi Bali. Artinya ikatan tradisional makin renggang, walaupun bisa diwujudkan kembali dalam bentuk yang baru.

Di sini (Bali) ada evolusi mentalitas, perubahan sosiologis, perubahan ekonomi, ... juga yang mengkhawatirkan ialah kecenderungan "kristalisasi agama"...

Apa komentar anda menanggapi kasus di Tanah Lot?

(Jean Couteau).... yang terjadi di BNR dalam peribahasa prancis adalah "setetes air yang membuat tumpah air di gelas". Masalahnya sebenarnya dari dulu sudah ada namun baru muncul dalam kasus ini. Selain juga karena Tanah Lot merupakan suatu pura yang mempunyai fungsi simbolik besar baik di mata orang asing maupun orang Bali. Dan jangan lupa bahwa Tanah Lot merupakan satu pura yang sudah dijadikan komoditas selama puluhan tahun. Dijual dalam bentuk postcard, baru-baru ini ada iklan Toyota di TV dimana ada Tanah Lot di belakang dan Toyota di depan. Disini ada suatu desakralisasi pura. Masalah yang dari dulu sebenarnya telah ada ini dimunculkan kembali antara lain oleh mahasiswa-mahasiswa Bali dan luar Bali. Artinya itu merupakan suatu gejala dari intelektual muda Bali yang bosan melihat agamanya dijadikan komoditi. Maka resikonya kalau lari ke masalah identitas. Kalau itu terjadi sangat berbahaya ... (terutama dalam proses kristalisasi).

Terjadinya kristalisasi agama dan pengentalan identitas etnis yang bisa berakibat negatif yang bisa menyulut masalah-masalah yang berbau SARA. Dan masalah-masalah ini (etnis,kristalisasi agama) harus diselesaikan secara sosial. Misalnya kepala desa Sanur yang baru tahu ada 500 penduduk liar dari Jawa. Kalau masalah ini diselesaikan secara etnis gawat. Kalau ditindak karena keJawaannya. Tapi jika diselesaikan secara sosial akan berjalan baik dan normal.

Bagaimana dengan AMDAL? Apakah sudah diindahkan?

(Jean Couteau). ... Pasti ada tekanan birokratis. Karena secara struktural Amdal tersebut terlalu tidak independen.

(I G.Ngurah Bagus). Kalau saya "melihat dari luar", ada terjadi manipulasi pada Amdal ini.

Lalu apa sebenarnya yang terjadi di balik penyelewengan-penyelewengan ini? Kontrol dari pihak pemerintah di mana?

(I G.Ngurah Bagus). Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan ini pasti terjadi "sesuatu" antara pemerintah dengan pihak investor. Pemerintah sering memenangkan "kepentingan nasional" tanpa memperhatikan kepentingan lokal. .. ya kenyataannya masyarakat sering dikalahkan. *Law forcement*- nya ini yang tidak nampak. Nah kalau terjadi "kolusi" 'kan jadi bertambah berat lagi kekalahan masyarakat ini.

(I W.Gelebet). ... Ada segudang kasus di Bali. Masyarakatnya tidak bisa berbuat apa-apa selain mengiyakan, karena program nasional.

(Jean Couteau) Kalau keputusan diambil di pusat sana dan tidak menguntungkan umat Hindu di Bali maka jadinya seakan-akan

provokatif. Di sini kesalahan struktural dan prosedural yang mendasar. Ini sebenarnya masalah politik.

Bagaimana dengan identitas Bali?

(Jean Couteau). Identitas bali Harus ada tapi jangan dijadikan fokus sehari-hari mereka. Seperti agama Bali ada termasuk warisan Bali tetapi jangan ada obsesi sosial disekitar agama. Sama dengan Islam atau Kristen. Jangan kita tergoda oleh eksklusifitas dan eksklusivisme kelompok. Kita harus bersifat inklusiv, unsur luar harus kita terima. Jangan jadikan agama, etnis sebagai benteng-benteng (sosial).

Dengan menerima perubahan-perubahan budaya maka berarti juga bentuk pariwisata budaya juga akan bergeser.

(Jean Couteau). Ya, akan bergeser. Bentuk budaya Bali akan berubah. Bagaimanapun akan berubah. *Nation building,* tadi saya bicara masalah yang kontradiktif; resiko adanya kristalisasi agama. Tapi di lain pihak ada ruang budaya nasional yang sedang berkembang di Denpasar. Artinya suatu ruang budaya dan ruang ekonomi yang integratif. Dan mungkin gejala itu lebih kuat daripada gejala kristalisasi etnis. Jadi kedua fenomena tersebut berjalan bersama-sama. Karena kenyataan memang kompleks.

(L.K.Suryani). Kalau saya tetap menganut pendapat bahwa budaya itu selalu berubah. Tetapi jangan sampai perubahan itu menghilangkan identitas kita. Sebab tanpa identitas kita tidak lagi tahu siapa diri kita. Berubah dalam arti mengikuti perkembangan tetapi kita tetap punya identitas.

Adakah kemungkinan untuk bergeser ke bentuk pariwisata seks dan sekitarnya?

(Jean Couteau). Ada. Memang sementara *image* beberapa wisatawan asing yang beranggapan bahwa di sini ... ada satu fenomena menarik bahwa para homoseks Eropa memanfaatkan budaya Bali untuk leluasa menyentuh lelaki. Ya ada semacam salah kaprah budaya dengan akibat seksual ....

(L.K.Suryani). Ya saya lihat juga mereka ada yang mempromosikannya (seks wanita-red), saya lihat sendiri videonya. Kenapa sampai hati mereka, tetapi sebenarnya kalau kami lihat tidak ada hal yang spesifik. Karena wanita Bali tidak seperti itu tentang sex apalagi dengan orang asing. Ada segelintir, tetapi masyarakat tidak akan menerima karena pengaruh keluarga (banjar) apalagi dengan asing, tetapi kalau sesama keluarga masih mudah.

Wisata seks di Bali?

(Jean Couteau). Ya, memang tidak terelakkan namun bukan yang utama. Tidak seperti di Thailand misalnya seks dijadikan cara untuk mengakumulasi modal pertama pada taraf awal. Artinya di Thailand yang di sebut kaum menengah menjadikan seks wanita Thailand menjadi modal utama. Lebih parah daripada menjadikan budaya sebagai dasar akumulasi modal.

. Bagaimana dengan Kuta?

(Jean Couteau). Ya, saya dengar dijalan-jalan sepanjang Kuta sudah ada cewek-cewek yang ditawarkan. Tapi bukan merupakan fenomena yang menyeluruh, masih terbatas.

Juga ada semacam hipokrisi dalam pariwisata budaya; slogan-slogan pariwisata budaya yang di balik semua itu sebenarnya adalah kepentingan ekonomi saja...

(Putu Swasta). Jelas! Kepentingan ekonomilah yang paling utama. Dulu kepentingan kebudayaan dipertemukan dengan ekonomi. Orang merasa nyaman, enak memperkenalkan budaya yang tidak dijual secara massal.

Lalu bagaimana masa depan pariwisata budaya, di Bali khususnya?

(Putu Swasta). Tidak seperti yang diidealkan. Sekarang lebih ditekankan pada *mass production* seperti yang terjadi di mana-mana; di Chiangmai, di Pataya dan sebagainya. Turis hanya tinggal di sana selama 2-3 hari saja.

Dalam konsep pariwisata budaya 'kan rasionya dilihat; turis datang ke desa misalnya saja, tinggal di sana dan mempelajari kebudayaan masyarakat setempat. Jadi mereka juga waktu tinggalnya lama. Jadi sangat kontradiktif sekali dengan *mass tourism* yang sedang digalakkan sekarang. Kalau dulu cukup dengan bungalow-bungalow kecil, *guest house* di rumah-rumah penduduk sehingga tamu bisa membaur dengan budaya dan masyarakat setempat.

Apakah kemasan mass production-nya pariwisata ini sudah tak terelakkan lagi?

(Putu Swasta). Ya, tidak terelakkan lagi, dan kemudian tidak terelakkan untuk membangun infrastruktur pariwisata yang sebesar-besarnya untuk dipasarkan dan harus bersaing di "pasar bebas". Bali "dijual" di New York, di London, di Tokyo, di Eropa melalui *travel agent* yang canggih.

Kalau begitu pariwisata budaya dalam kenyataanya tidak ada atau hanya sedikit sekali. Ia hanya slogan yang dijadikan alat legitimasi ...

(Putu Swasta). Benar. Pariwisata budaya hanya bungkus saja dengan simbol-simbol yang dipakai selama ini. Bentuknya "begini" isinya berbeda ... yang dijual sudah beda. Mungkin Bali di masa datang akan menjadi semacam kantong... mereka sudah jenuh datang ke Bali yang sudah hampir sama saja dengan Singapura. Bali akan jadi tempat transit wisatawan untuk misalnya, datang ke Lombok, Flores, Maluku dsb. Infrastruktur di Bali lebih siap. Kalau Singapura merupakan transit untuk Asia, maka Bali akan jadi transit daerah tujuan wisata yang lain di Indonesia. Bali akan jadi "terminal" saja. ▢

Aship AH.

ASHIP AGUS HASANI



Tenganan, Desa Adat Baliaga (Bali Asli)
Di Bali, Agama dan Budaya dijadikan komoditas

Peter Arnett: Kebenaran itu Ideologi Baru

WARTAWAN andalan CNN (*Cable News Network*) dalam Perang Teluk, Peter Arnett, akhir Agustus lalu bertandang ke Yogyakarta. Ini kali kedua dia *menyatroni* Indonesia dalam suasana dan rejim politik yang berbeda. Dulu jaman Orde Lama, katanya, suasana plural yang demokratis lebih terasa. Meskipun akhirnya, setelah dua tahun tinggal di Indonesia sebagai wartawan asing yang meliput konfrontasi "Ganyang Malaysia", Peter Arnett diusir oleh Soebandrio karena dianggap "tidak lagi bertindak sebagai kawan Indonesia".

Kedatangannya ke Yogyakarta (16/8) merupakan bagian persiapan dari rencana CNN untuk meliput *International Conference on Culture and Tourisme* (ICCT) yang berlangsung 22 s.d 25 Agustus 1995. Atas pemberitahuan dan fasilitas dari Panitia ICCT pula, tiga wartawan **BALAIRUNG, Frans, Hatta,** dan **Bimo,** berhasil mengerubutinya di ruang VIP lobby Bandara Adisutjipto. Berikut silakan simak,

Anda dikenal sebagai wartawan spesialisasi perang. Tapi sekarang anda datang ke Indonesia berkaitan dengan ICCT yang membahas budaya dan turisme. Mengapa anda tertarik pada persoalan budaya? Atau ada kaitan antara budaya dan perang?

Mengapa saya tertarik pada budaya? Oo, sebagai wartawan saya tentu tertarik pada semua hal yang memang menarik perhatian umat manusia. Soal budaya dan perang tentu sangat erat berkaitan. Kita semua tahu tentang apa yang terjadi di Bosnia misalnya. Kultur di Bosnia sangat beragam, religinya juga berbeda-beda. Perbedaan kultur, khususnya yang menyentuh persoalan religi sangat sensitif untuk menyulut perang. Aneh bukan? Religi mestinya berfungsi untuk membuat orang jadi arif dan bijak, tapi di Bosnia, perbedaan religi membuat orang saling bantai, sementara di luarnya menguat solidaritas yang sektarian dan fundamentalis.

Saya datang kemari, tertarik dengan Indonesia yang kulturnya begitu beragam. Demikian juga Indonesia dihidupi oleh religi yang berbeda macam. Bagaimana anda bisa menjaga semua ini ? Padahal di tempat-tempat lain perbedaan agama menjadi picu peledak konflik sosial. Bukan berarti di sini tidak menjadi soal, saya yakin. Tapi yang menarik bagi saya tentu adalah bagaimana toleransi sosialnya, apakah karena kesadaran atau karena represi untuk toleransi? Saya juga ingin melacaknya dari sejarah. Saya saksikan Borobudur dan Prambanan. Negeri anda memang indah. Saya datang ke sini untuk mencermati Indonesia yang cantik.

Secara teknis, saya ke sini karena kontrak CNN dengan salah satu stasiun televisi di sini untuk keperluan wawancara. Seiring itu ada acara yang sangat menarik di Yogyakarta (ICCT, red), saya diminta untuk melihat persiapannya.

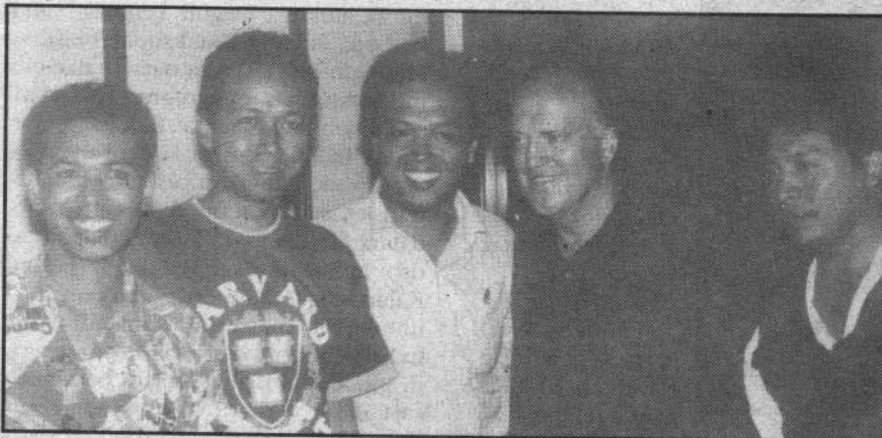
Anda pernah bertugas di Indonesia saat ramai-ramainya konflik dengan Malaysia, bagaimana kisah dan kesan anda terhadap Indonesia di jaman Orde Lama dibanding di jaman Orde Baru?

Ya, kira-kira tiga puluh tahun lalu saya tinggal di Jakarta selama dua tahun sebagai reporter politik. Saya sempat berkeliling Indonesia bersamaan dengan acara Soekarno yang pidatonya sungguh membuat rakyat bersemangat dan rela kepanasan berkumpul di lapangan-lapangan kota. Saya juga dekat dengan Soebandrio di mana kami sering berdiskusi tentang situasi politik negeri ini. Saat itu saya sudah bersahabat karib dengan Alex Alatas (Ali Alatas, red) yang masih menjadi *staff junior* Departemen Luar Negeri waktu itu. Dan kemarin (15/8) saya sangat senang sekali bisa berbincang-bincang dengan dia yang kini sudah menjadi Menteri Luar Negeri. Kami juga membicarakan Indonesia dahulu dan sekarang. Tampaknya, kini Indonesia semakin sejahtera dan damai. Sungguh sangat berbeda dengan tiga puluh tahun yang lalu.

Setelah munculnya pola pemberitaan CNN, kita melihat bahwa konsep berita kini telah berubah. Dahulu, orang mengenal berita sebagai sesuatu yang telah terjadi, tetapi kini orang mengenal berita sebagai sesuatu yang sedang terjadi. Apa sebenarnya yang menjadi visi CNN dan bagaimana prediksi anda di masa depan berkaitan dengan kemajuan tehnologi informasi saat ini?

Saya pikir CNN bergerak dengan visi yang baik. Kita diajak untuk melihat apa yang terjadi dan bukan apa yang tersaji. Kami dari CNN sesedikit mungkin memberikan interpretasi, anda sendiri dipersilakan membentuk opini di kepala

HATTA/PPO



"Saya selalu prihatin dengan kondisi pers di Indonesia"

masing-masing ketika melihat sesuatu sedang terjadi, kamera kami tidak sempat melakukan editing dan sensor. Di masa depan, dunia akan menjadi lebih plural. Mata dan pikiran kita ada di mana-mana menatap beberapa televisi di depan kita, hanya dengan menggeser-geser sedikit derajat putar leher, anda bisa menyaksikan apa yang sedang berlangsung di Irak, di Meksiko, di Rusia, dan di lain-lain tempat. Kita memiliki kesadaran global dalam satu ruang dan waktu.

Di Indonesia, masyarakat secara terbuka akan mendapatkan berita-berita yang sulit disensor lagi. Berita soal krisis atau ketidaksepakatan di kalangan elit politik, masalah korupsi, dan lain sebagainya tentu akan sangat menarik bagi masyarakat. Dan saya pikir, bagaimanapun setiap berita harus menarik, kita mencari yang paling menarik untuk langsung disiarkan. Di masa depan setiap stasiun televisi termasuk di Indonesia dituntut bersaing kelihaian meliput peristiwa-peristiwa yang menarik bagi masyarakat.

Bagaimana kemudian suatu stasiun TV bisa independen? Bukankah pilihan peristiwa dan bagaimana editing liputan tersebut akan mencerminkan kepentingan atau kekuatan di balik stasiun TV atau media lain yang melansirnya?

Itu bisa terjadi. Tapi bila yang anda pertanyakan adalah CNN, saya akan jawab bahwa CNN itu independen. Ide yang menyemangati CNN sederhana saja. Kami pergi keliling dunia. Kami meliput berita tidak dari satu pihak pada saat yang bersamaan. Nyaris semua pihak yang terlibat dalam proses peristiwa kami datangi. Anda bisa mendengar langsung pidato Bush saat perang Teluk dan sesudah itu anda bisa mendengar jawabannya secara langsung pula dari Presiden Saddam Hussein dari tempat yang sangat jauh berbeda, keduanya tanpa ada proses editing apapun. Sehingga kami berada di titik netral pada saat krisis. Ini penting untuk menghindari bias informasi, dan yang lebih berbahaya lagi, bias ideologi. CNN sangat menghindari bias ideologi. Supaya, anda sepenuhnya bisa percaya pada CNN.

Apakah itu tidak berarti CNN membangun ideologi baru?

Ideologi CNN (Arnett diam sebentar)...adalah KEBENARAN (para pendengarnya tertawa). Dan kebenaran adalah ideologi baru setelah semua ideologi kini mati dan usang. Ideologi kebenaran tidak akan pernah mati, apalagi bagi kalangan pers (Arnett tertawa).

Lalu bagaimana pendapat anda mengenai pers Indonesia, khususnya setelah pembredelan media Detik, Tempo, dan Editor?

Kami selalu prihatin dengan kondisi pers di Indonesia. Bukan hanya sekarang, tapi setahu saya pada tahun 1960-an Presiden Soekarno pernah sampai menahan seorang jurnalis, Mochtar Lubis, yang begitu tenar pada waktu itu. Pemerintah Amerika Serikat sampai mengeluarkan kecaman pedas. Begitupun ketika pemerintah anda membredel tiga media nasional. Pemerintah anda rupanya menjadi kian represif.

Tapi di sisi lain, kita melihat diperbolehkannya tumbuh televisi-televisi swasta. Demikian pula perkembangan televisi dunia yang masuk ke Indonesia, CNN salah satunya. Bagaimanapun positif negatif kehidupan pers Indonesia layak disimak sebagai proses belajar dan pendidikan yang panjang dari sebuah negeri. Wartawan pun harus belajar bagaimana menghadapi sistem dan kultur politik elit penguasa. Saya lihat kondisi di sini tak berbeda jauh dengan kondisi di negara-negara berkembang yang lain di mana pemerintahannya begitu enggan dengan adanya pers yang bebas dan independen. Tapi bagaimanapun , saya pikir anda sekalian tak bisa menghindari gelombang kebebasan pers. Ini bukan persoalan politik pers, tetapi teknologi pers. Tentunya setiap pemerintahan pasti memikirkan hal ini.

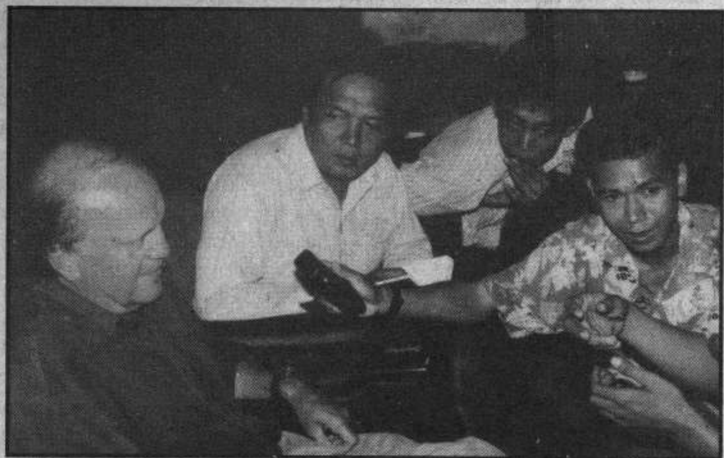
Bagaimana dengan pemerintahan Indonesia saat ini?

Yang mencolok dari pemerintah anda saat ini adalah pembangunan ekonomi yang sukses dibanding kalangan negara-negara berkembang yang lain. Kita saksikan banyak negeri di Afrika yang merdeka dari penjajahan kolonial, juga Yugoslavia yang heterogen seperti Indonesia, justru mengalami kemerosotan ekonomi dan perpecahan. Indonesia saat ini sedang merealisasikan kesejahteraan ekonomi, menjaga persatuan bangsa, dan juga diplomasi yang dihargai di kalangan negara selatan ataupun dunia ketiga. Anda selayaknya bangga dengan tanah air Indonesia ini.

Sebagai wartawan yang menjunjung kebenaran, apa pendapat anda mengenai Timor-Timur?

(Peter Arnet diam sejenak)...Timor Timur tampak jelas merupakan krisis yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia kekinian. Saya pikir pemerintah Indonesia sudah saatnya menyadari bahwa apa yang terjadi di lapangan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Saluran *superhighway* seperti internet, indonet, dan juga satelit yang direkam video membuat kita bisa menyaksikan fakta peristiwa-peristiwa yang begitu represif seperti yang terjadi di Bosnia dan juga Timor-Timur. Saya merasa, sebagai bangsa yang besar, Indonesia bisa menyelesaikan masalah ini dengan benar.

Bimo Nugroho



HATTA(PPC)

"Pemerintah anda rupanya menjadi kian represif..."

Mohammed Arkoun:

"Saya Berharap Islam Tidak Dipolitisir"

MENJELANG tahun 2000 nampaknya Indonesia bersikukuh bahwa pariwisata tetap menjadi salah satu sektor ekonomi yang tetap dikembangkan. Tetapi akan dibawa kemana seharusnya pariwisata Indonesia? Mohammed Arkoun, adalah seorang pemikir masalah humaniora kelahiran Aljazair, yang kemudian menetap di Perancis, setelah ia menjadi ilmuwan di Universitas Sorbonne. Penulis buku; **Nalar Modern dan Nalar Islami** ini telah tiga kali ini datang di Yogyakarta. Berkaitan dengan penyelenggaraan *International Conference on Cultural Tourism* 1995 di Yogyakarta di mana Arkoun menjadi salah satu pembicara **Aship Agus H.** dari **BALAIRUNG** sempat berbincang-bincang melalui serangkaian wawancara, dalam mobil yang membawanya dari tempat seminar 23 Agustus 1995 yang lalu menuju hotel. Dengan bahasa Inggris yang fasih ia banyak menyoroti permasalahan Indonesia dewasa ini.

Bagaimana masa depan pariwisata budaya Indonesia dilihat dari sudut pandang ekonomi?

Pariwisata budaya di Indonesia akan terus berkembang maju. Sebab Indonesia mempunyai banyak tempat-tempat yang indah, menarik. Indonesia terbuka, penduduknya ramah dan ini banyak disukai oleh wisatawan.


TRI WASONO SUNU

Islam akan menjadi agama humanisme

Prospek budaya?

Akan lain masalah. Secara ekonomis prospeknya cerah, Indonesia bisa mendapatkan banyak kelimpahan ekonomi dari pariwisata. Indonesia sudah mempunyai banyak sumber daya, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mampu me-*manage* sisi ekonominya. Indonesia mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan negara-negara lain.

Pluralitas etnis, budaya dan agama di Indonesia dalam menghadapi kecenderungan pariwisata skala besar ini?

Masyarakat Indonesia perlu lebih banyak mempelajari budayanya supaya mereka menyadari betapa bernilainya budaya ini. Masing-masing kelompok masyarakat ataupun etnik harus mempelajari semua budaya dari kelompok/suku lain. Sehingga mereka mampu menjelaskan pada tamu yang datang ke sini tentang kebudayaan daerahnya. Jika anda tidak mengetahui betapa penting dan bernilai kebudayaan anda sendiri maka anda tidak bisa menjelaskan pada orang asing tentang kebudayaan anda yang berharga. Masyarakat Indonesia harus memulai mempelajari kebudayaannya sendiri secara ilmiah (*scientificly*), secara antropologis. Indonesia adalah negara yang sangat "kaya" dalam hal kebudayaan, bahasa, adat-istiadat, agama, kepercayaan, arsitektur dan dalam banyak hal. Tetapi semuanya tetap belum tergali oleh orang Indonesia sendiri. Jadi ini *point* yang sangat penting; orang Indonesia seharusnya lebih giat lagi dalam menggali kebudayaannya sendiri, kekayaannya sendiri. Dan untuk pariwisata anda harus mengusahakan pengadaan buku tentang kebudayaan Indonesia. Sehingga orang bisa membaca kebudayaan Indonesia lalu anda akan bisa mengundang lebih banyak lagi wisatawan, dan lebih-lebih lagi mengundang wisatawan yang tertarik pada kebudayaan Indonesia. Jadi inilah kuncinya, yaitu bagaimana mengembangkan kebudayaan yang ada disini.

Langkah strategis apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal ini?

Indonesia mempunyai menteri Pariwisata (Menparpostel-red), ini bagus. Dan harus ada kerja sama yang baik dengan menteri Pendidikan (Mendikbud-red). Keduanya mempunyai tanggung jawab dalam hal ini. Menteri pariwisata saja tidak cukup, akan tetapi menteri pariwisata harus selalu bekerja sama dengan menteri pendidikan. Karena hal ini juga merupakan masalah pendidikan bagi masyarakat di sini.

Bagaimana dengan dampak negatif dari "mass tourism" dalam kaitannya dengan industri pariwisata di Indonesia?

Impact negatif itu tergantung pada orang Indonesia sendiri dan juga pada wisatawan. Jika orang Indonesia siap dan terlatih tidak hanya dalam manajemen hotel tetapi juga bagaimana berbicara dan berkomunikasi dengan wisatawan maka impact negatif itu bisa dihindari. Sebagai contoh mereka menunjukkan bahwa mereka sadar dan tahu akan kekayaan budaya negaranya sehingga para wisatawan "menghormati" kebudayaan Indonesia. Sebab mereka akan merasa bahwa masyarakat Indonesia sendiri telah "mendalami" kebudayaannya sendiri, dan menyadari akan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan untuk ini diperlukan pendidikan yang memadai bagi masyarakat Indonesia yang akan berhadapan dengan wisatawan yang datang. Tetapi jika orang Indonesia curiga maka wisatawan akan melihat bahwa anda curiga sehingga mereka akan mendapatkan kesan yang negatif dan mereka tidak akan respek terhadap kebudayaan yang mereka dapati. ... Seperti yang terjadi di beberapa negara di Afrika.

Tetapi kenyataannya hanya sedikit wisatawan yang benar-benar berkunjung dengan motif kunjungan budaya.

Tergantung pada anda sendiri dalam menonjolkan sesuatu dari sini. Jika ingin menonjolkan kebudayaan, maka harus diupayakan untuk mempresentasikan kebudayaan

Indonesia dalam *well written books* sehingga orang bisa membacanya dengan jelas. Sediakan buku dalam bahasa Perancis, Jerman, Inggris, Itali. ... jika hanya tersedia buku dalam bahasa Inggris, ... maka hanya sedikit orang yang tahu tentang banyak tempat yang dimiliki Indonesia. Karena hal itu tidak dipresentasikan, tidak diketahui. Dan jika hanya diserahkan pada *tool operator* untuk membawa mereka (wisatawan) ke sini dan mengembalikannya setelah dua minggu tinggal maka ini bukanlah pariwisata yang baik. Pariwisata harus didasarkan pada pendidikan, pendidikan bagi orang Indonesia yang akan menerima kedatangan wisatawan dan juga pendidikan bagi wisatawan yang datang ke Indonesia. Dan semestinya pemerintah Indonesia dapat melakukan kesepakatan misalnya, dengan semua pemerintah negara-negara di Eropa untuk memberikan "pengajaran" tentang kebudayaan Indonesia bagi warga mereka yang akan berwisata ke Indonesia. Mereka dibekali pengetahuan yang memadai tentang Indonesia di negara mereka sendiri dan mempersiapkan segalanya. Hal ini juga yang seharusnya dikembangkan oleh pihak pemerintah.

Bagaimana dengan identitas lokal dalam pluralitas di Indonesia ini?

Ya, ini adalah juga sebuah masalah pendidikan. Harus diajarkan sejarah di sekolah-sekolah; sejarah tentang semua kebudayaan (yang ada di Indonesia terutama). Dan harus diberikan kemungkinan dan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari bahasa (daerah) mereka sendiri di sekolah. Jadi tidak hanya diajarkan satu bahasa. Sehingga bahasa daerah tidak mati. Maka bahasa daerah harus diajarkan di sekolah. Mereka akan bangga terhadap bahasanya. Mereka akan terangkat karena diperhatikannya perhatian pada "bahasa lokal" dan kebudayaan mereka. Kebudayaan dan bahasa (daerah/lokal) ini akan berkembang sehingga menjadi basis yang kuat untuk pariwisata yang lebih baik. Hal ini sangat penting sekali.

Agama dalam pluralitasnya di Indonesia?

Ya, ini persoalan penting sekali dan bisa bergeser menjadi bahaya. Dalam hal ini harus diajarkan sejarah agama-agama. Perbandingan sejarah agama-agama; ini sebuah disiplin. Di Eropa ada institut yang mengajarkan sejarah agama-agama. Tidaklah cukup diajarkan hanya tentang Islam bagi pemeluk Islam, hanya Kristen bagi pemeluk Kristen, hanya Katolik bagi pemeluk Katolik, hanya agama Budha bagi pemeluk Budha atau hanya agama Hindu bagi pemeluk Hindu dan lain sebaginya. .... maka tidak ada yang mau memahami yang lain. Jadi harus diajarkan hal ini di sekolah-sekolah. Harus diajarkan sejarah agama- agama. Saya seorang sejarawan, saya mengajar sejarah. Itulah sebabnya saya dapat membandingkan antara Islam dengan *Christianity*, dengan Yahudi, dengan Budhisme dan dengan yang lain-lainnya. Dari perbandingan tersebut saya melihat "elemen-elemen yang sama". Kalau mengetahui demikian maka para pemeluk agama akan terbuka satu sama lainnya. Hal ini teramat sangat penting. Indonesia adalah negara yang sangat menarik. Sebagai seorang muslim saya katakan hal tersebut. Sebab Islam di Indonesia adalah Islam yang toleran, bukan Islam yang mendominasi yang lain atau menolak unsur lain. Anda tahu, Islam lebih keras di Timur Tengah karena peristiwa-peristiwa peperangan yang terjadi di sana. Sehingga Islam di politisir. Di sini, di Indonesia saya berharap Islam tidak akan dipolitisir. Islam akan menghasilkan agama humanisme, agama yang terbuka pada kebudayaan. Sebab Islam pada abad X di Baghdad, di Cordova, di Cairo, di Teheran, di Shiras, di Isfahan dan di berbagai kota dulu terdapat "Islam Humanisme". Karena orang Islam waktu itu mempelajari filsafat Yunani pada saat yang sama mereka juga mempelajari Al Qur'an. Mereka mendiskusikan Christianity dan Yahudi. Di India mereka terbuka pada kebudayaan. Di Indonesia muslim terbuka pada kebudayaan. Sehingga mereka berkembang dan terbuka terhadap kebudayaan. Hal tersebut membawa pada pertukaran antar budaya dan sekarang sayang sekali kita (muslim-red) tidak melakukan hal ini. Walau kita sekarang berada di akhir abad XX. Adalah tidak layak/tidak normal bahwa orang-orang di abad X melakukan hal yang lebih baik dari kita sekarang. Hal ini harus kita sadari untuk meneruskan perilaku yang humanis, ... humanisme dari Islam. (Lalu harapan saya) Kristen akan melakukan hal yang sama. Dan Indonesia bisa menjadi "contoh model" bagi toleransi beragama. Akan sangat dahsyat sekali. Anda bisa bayangkan itu? Kami tidak memiliki toleransi seperti ini (seperti di Indonesia), di Perancis, di Jerman kami masih berjuang untuk toleransi agama. Misalnya orang Jerman masih berjuang dalam meletakkan "Salib" di sekolah-sekolah. Beberapa dari mereka menginginkan "Salib" di sekolah-sekolah sedang beberapa yang lain tidak menginginkannya. Ini membuahkan konflik. Atau di Perancis, mereka mengatakan pada wanita muslim untuk tidak memakai jilbab dan cadar. Hal itu dilarang. Jadi anda tahu agama adalah sumber konflik bagi kami. Dan saya berharap bahwa Indonesia bisa menjadi teladan dalam hal toleransi agama, saya berharap dari hati saya !!! ...bahwa Indonesia memberikan contoh dalam toleransi beragama bagi umat manusia dan khususnya bagi semua umat muslim. Ini pesan saya yang sangat penting.

Ada kekhawatiran bahwa pariwisata akan menjadi ajang kolonialisme baru?

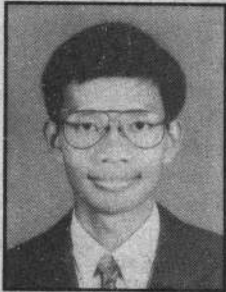
Hal ini tergantung pada anda sendiri. Pariwisata memang bisa menjadi amat sangat kejam dan keras, yaitu dengan merusak kebudayaan, identitas, kepribadian dan peradaban. Anda (bisa) menilai/menganalisa/menghakimi melalui "pertukaran" (budaya). Anda harus belajar dari mereka dan mereka belajar dari anda.

Aship Agus Hasani


TRI WASONO SUNU

Arkoun: harus diajarkan sejarah agama-agama

Perencanaan Fisik Kampus di Indonesia dan Tinjauan Wawasan Lingkungan


ISTIMEWA

Adi Utomo Hatmoko
pengajar dan peneliti di Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik-UGM, Staf Ahli pada** Yogyakarta Urban Development Project(YUDP).* ***Ikut dalam tim perencanaan review masterplan kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta, prarancangan Kampus Universitas Wangsa Manggala (kompetisi) dan prarancangan Gedung PUSPIC UGM.

PEMBANGUNAN *kampus perguruan tinggi terus berjalan seiring dengan meningkatnya tuntutan akan pendidikan tinggi dan wadah kegiatannya dalam masyarakat. Berbagai kampus ini memiliki karakteristik masing-masing. Dalam tulisan ini pertama-tama akan coba dikupas perencanaan (fisik) kampus di Indonesia, yang jika dikaitkan dengan konteks tertentu, seharusnya akan menunjukkan suatu sikap menghargai lingkungannya. Kritik atas wawasan lingkungan akan menjadi penutup tulisan ini.*

1. Perencanaan Kampus dan Permasalahannya

Perencanaan adalah suatu usaha untuk mempersiapkan kondisi masa mendatang agar lebih baik dari masa lalu dan saat ini, atau mempersiapkan langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah saat ini maupun masalah yang diperkirakan akan muncul dimasa mendatang. Perencanaan Kampus Perguruan Tinggi mencakup 3 hal yaitu:

a. Kebijakan Dasar Perguruan Tinggi

Setiap Perguruan Tinggi mempunyai dasar, acuan, cita-cita yang telah tersusun sejak lahir. Hal ini merupakan arah/cita-cita seluruh *Civitas Academica* yang diperjuangkan terus menerus setiap waktu. Kebijakan dasar ini sewajarnya terungkap didalam kegiatan sehari-hari (belajar-mengajar) dan pada ujud fisiknya.

b. Perencanaan Akademik

Perencanaan akademik merupakan terjemahan dari kebijakan dasar yang sudah ada. Mulai dari arah pendidikan, kurikulum, silabus, staf pengajar, mahasiswa, karyawan, sistem pendidikan dan lain sebagainya. Pada setiap waktu harus disesuaikan tantangan zaman, tanpa bergeser dari kebijakan dasar.

c. Perencanaan Fisik

Wadah segala kegiatan *civitas academica* didalam kampus perlu disusun secara cermat di dalam perencanaan fisik. Mulai dari hubungan terhadap kota, hubungan terhadap lingkungan, *zoning* kegiatan, penataan *landscape*, jaringan sirkulasi, *site engineering* dan sebagainya. Perencanaan fisik ini mencakup kaidah dasar arsitektur yaitu memenuhi kriteria "guna" dan " citra".

Kegiatan Perencanaan Kampus Perguruan Tinggi di Indonesia oleh Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mulai digalakan pada tahun tujuh puluhan. Kegiatan tersebut semakin ditingkatkan pada awal delapan puluhan, ditandai dengan keluarnya buku Petunjuk Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kampus.

Perencanaan Kampus di Indonesia merupakan "sesuatu" yang baru, sehingga dapat dikatakan pada tahap belajar. Meskipun seluruh perguruan tinggi negeri telah mempunyai buku RIP, namun masih cukup banyak masalah yang ditemui dalam penyusunan RIP, dan tidak mengherankan ada beberapa kelemahan pada hasil akhirnya. Beberapa masalah dan kelemahan yang ada adalah sebagai berikut:

Pertama, permasalahan yang dihadapi pada penyusunan rencana akademik antara lain :

a. Data-data mahasiswa beberapa tahun ternyata tidak lengkap (lama belajar, *drop out*, jumlah lulusan/tahun, jumlah lulusan/angkatan dan sebagainya).

b. Keterbatasan staf ahli guna membuka bidang baru. Pada hal bidang tersebut harus dikembangkan.

c. Cara untuk membatasi bidang-bidang yang telah jenuh dan mengembangkan bidang baru.

d. Sulit untuk mencari tenaga pengajar yang mempunyai dedikasi dan kwalitas yang tinggi.

Kedua, permasalahan penyusunan fisik yang dialami oleh Perguruan Tinggi antara lain :

a. Tanah yang terbatas, terutama yang berada di tengah/ di dalam kota.

b. Bangunan yang sudah ada kemungkinan kurang memenuhi syarat akan tetapi tidak bisa dibongkar.

c. Pencapaian/aksesibilitas untuk kampus pada daerah baru.

d. Fasilitas yang khusus misalnya laboratorium bidang tertentu, sulit mendapatkan konsultan yang cukup ahli.

2. Konteks Kampus Perguruan Tinggi

Konteks adalah segala sesuatu yang ikut mempengaruhi suatu objek tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa faktor yang merupakan konteks kampus, faktor-faktor tersebut adalah:

a. Lokasi Kampus, berdasar lokasinya, kampus dapat terletak pada:1) Pusat kota 2) Area kota yang telah berkembang 3) Pinggiran kota 4) Daerah baru yang belum berkembang

b. Skala Kampus,berdasar skalanya, kampus dapat merupakan: 1) Kampus skala "besar" 2) Kampus skala "menengah" 3) Kampus skala "kecil"

c. Macam Intervensi Fisik Kampus, berdasar macam intervensinya, kegiatan perencanaan fisik dapat merupakan:

1) Perencanaan kampus yang sama sekali baru 2) Perencanaan bagian tertentu pada kampus yang sudah ada (*infill*) 3) Penggantian bagian tertentu pada kampus yang sudah ada 4)Pemindahan kampus ke lokasi yang baru

d. Spesifikasi Kampus,berdasar jenis kampus itu sendiri, juga dapat dibedakan antara:

1) Umum 2) Khusus. Secara fisik, selayaknya akan terbentuk tampilan yang berbeda-beda pada setiap konteks di atas.

3. Kampus Perguruan Tinggi yang Berwawasan Lingkungan

Konsep "wawasan lingkungan" pada dasarnya adalah suatu konsep yang secara intrinsik telah tercakup dalam perencanaan dan perancangan pada umumnya. Perencanaan kampus yang baik akan sudah memasukkan unsur "wawasan lingkungan" di dalamnya, bersama-sama dengan tuntutan-tuntutan normatif lainnya, seperti kesesuaian dengan program dalam pengejawantahan Rencana Akademik, aspek fungsional dan manusiawi, keterawatan, dan sebagainya.

Di sisi lain, konsep "Wawasan Lingkungan" tersebut harus diterapkan secara cermat, dengan melihat konteks yang ada. Apakah kampus tersebut merupakan kampus di pusat kota atau di pinggiran kota, apakah kampus kecil atau kampus yang mencakup areal yang luas. Karena setiap setiap konteks akan memiliki permasalahan sendiri , maka konsep-konsep normatif sebaiknya diterapkan dengan melihat kondisi setempat. Oleh karena itu, perencanaan kampus juga perlu dilakukan secara kasuistik, dengan melihat permasalahan apa yang dominan pada kasus tersebut.

a. Wawasan Lingkungan Non-Fisik

1) Pemecahan masalah hubungan antara kampus dengan masyarakat, misalnya dengan penempatan fasilitas-fasilitas sosial yang dapat dimanfaatkan masyarakat (misal: auditorium, masjid, kantorpos, koperasi, fasilitas olahraga, dsb.) pada tepian kampus yang berbatasan dengan "luar kampus". Hal ini secara konseptual kadangkala dilukiskan dengan "*social spine*" disamping "*academic spine*". Perlu kita lihat di sekitar kita: sudahkah berbagai fasilitas itu ikut dimanfaatkan masyarakat? Bebaskah masyarakat memasuki kampus dan ikut memperoleh imbas dari aktivitas kampus? Ataupun misalnya kemungkinan masuknya sektor informal ke dalam kampus.

2) Pemecahan masalah citra kampus (*image* kampus bagi masyarakat). Apakah kampus itu bercitra merakyat, *low-profile*, terbuka, atau sebaliknya. Cukup banyak kita lihat kampus yang dibangun "semewah-mewahnya", tanpa melihat relevansinya dengan lingkungan (sosial-budaya) setempat. Ataupun citra kampus dalam kaitannya dengan lingkungan fisik (kampus dalam kota, kampus di luar kota, kampus di pegunungan, dsb.).

Citra lain yang juga kerap keliru dalam perencanaan fisik adalah tidak ditempatkannya perpustakaan sebagai *landmark* dan bangunan kampus yang paling utama. Mungkin hal ini terkait dengan kurangnya budaya membaca di masyarakat kita. Bukankah seharusnya perpustakaan merupakan inti kampus?

3) Antarhubungan antara berbagai zona dan berbagai pusat yang erat. Misalnya dengan menyatakan hubungan antar-fakultas, atau dengan fasilitas bersama, yang memungkinkan zona yang ada tidak mengkotak-kotakkan kampus dalam bidang ilmu yang terpisah-pisah. Laboratorium atau ruang kuliah, misalnya, sesungguhnya dapat digunakan bersama dengan pengaturan temporal yang cukup baik.

b. Wawasan Lingkungan Fisik

1) **Pemecahan masalah iklim**. Hal ini dapat dilakukan pada lingkup kawasan (penggunaan elemen air atau vegetasi) atau bangunan (penggunaan sunshading, teritis lebar, selasar-selasar), dan dapat terkait dengan masalah energi (penghawaan alami, pencahayaan alami). Cukup banyak bangunan kampus yang tidak memperhatikan masalah ini.

Bangunan-bangunan di UGM sendiri, misalnya, saya rasa terlalu terpatok pada atap limasan yang dibagi dua bagian (mungkin dengan maksud untuk menyerupai Gedung Pusat). Namun pembagian dua itu kurang mempertimbangkan bahwa hujan tidak selalu datang secara vertikal, namun mungkin mempentuk sudut tertentu karena angin. Hal ini menyebabkan cukup banyak bangunan (dan justru yang baru) tempias dan menimbulkan kerusakan yang cukup berarti.

2) **Pemecahan masalah kontur dan kemiringan lahan**. Misalnya dengan tidak membangun pada area yang kritis. Dengan memanfaatkan kontur yang ada, dan tidak harus dengan *cut and fill*, dan sebagainya. Suatu kampus tidak seharusnya mengubah lahan produktif atau lahan lindung menjadi bangunan begitu saja, meski hal ini dapat kita lihat di Yogyakarta.

3) **Pemecahan masalah air dan resapan air**. Misalnya dengan penggunaan resapan air. Konservasi sumberdaya air. Pemakaian *con-block* pada jalur-jalur sirkulasi, dan bukannya aspal, dan sebagainya. Hal ini juga terkait dengan butir berikut.

4) **Pemecahan masalah vegetasi dan penghijauan**. Misalnya dengan penghijauan sekitar kampus. Penggunaan vegetasi sesuai fungsinya (peneduh, pengarah, dsb.). Suatu kampus yang hijau dan teduh akan memungkinkan aktivitas di luar ruangan (yang sesungguhnya merupakan budaya asli Indonesia) yang optimal.

5) **Pemecahan masalah ruang terbuka**. Misalnya dengan mencadangkan area-area terbuka yang hidup (dan bukannya ruang terbuka yang merupakan "ruang sisa"). Pada kasus-kasus perkotaan, bangunan berlantai banyak akan memberi peluang menciptakan ruang terbuka, dengan meluangkan ruang yang dicadangkan untuk bangunan bagi ruang terbuka, jika bangunan tersebut "ditumpukkan" pada bangunan di dekatnya.

6) **Pemecahan masalah sirkulasi dan tataletak.** Misalnya dengan pemberian fasilitas pejalan kaki dan sepeda. Penciptaan area-area "manusia" yang tidak terganggu sirkulasi kendaraan bermotor. .

7) **Pemecahan masalah operasi dan perawatan** *(operation and maintenance)*. Misalnya dengan menciptakan rancangan yang mudah dan murah operasi serta perawatannya. Hal ini juga merupakan titiklemah kita. Hidran merupakan contoh yang paling sederhana, dapat dipastikan sistem hidran dimanapun di Indonesia tidak berjalan baik saat kebakaran terjadi. Di sisi lain hal ini juga terkait dengan kebersihan dan perawatan rutin. Cukup banyak bangunan yang tidak dirancang dengan adanya tempat-tempat untuk membersihkan atau untuk perawatan. □

Polling Litbang BALAIRUNG tentang

ORIENTASI POLITIK MAHASISWA: Sikap Apolitis dan Pragmatisme Menggila



Anthony Dio Martin,
** bersama tim Litbang Majalah* BALAIRUNG *(Eriyanto, IM. Agus Dwiatmika, Bimo Nugroho Sekundatmo, Indriaswati DS)*

MEMANG *harus jujur diakui, mahasiswa sekarang adalah mahasiswa yang telah dibutakan dari pelbagai persoalan politik. Sebagian dari mereka dikondisikan untuk makin merasa tidak bermakna (meaningless) dan fobia untuk terlibat dalam kancah politik nasional. Sebagian lagi tidak punya greget untuk memikirkan kehidupan politik. Bahkan, yang tampak menggejala di kalangan mahasiswa sekarang adalah makin suburnya sikap sinis dan antipati terhadap gejala hal yang berbau politik.*

Adam Schwarz, dalam bukunya **A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s** (1994) melukiskan parahnya kondisi mahasiswa dan universitas di Indonesia dengan kata-kata, *By most accounts, classroom life is boring and uninspiring and student apathy is common.*.(h.236).

Potret semacam ini akan lebih konkrit terekam jika kita mencermati berbagai fenomena kelesuan mahasiswa yang tampak sekarang *(Kompas, 25/5/95).* Melemahnya peran gerakan mahasiswa dalam meng-*counter* berbagai kebijakan yang dalam

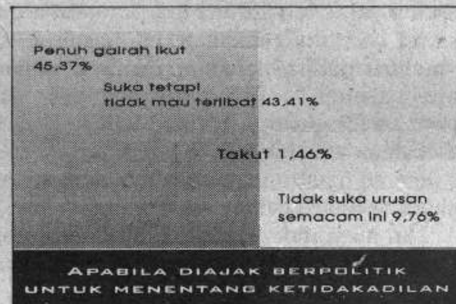
Berminat dan mau terlibat	31,22%
Biasa-biasa saja	16,10%
Tidak mau terlibat	2,44%
Tidak mau tahu	0,49%
Berminat, tapi hanya untuk sekedar tahu	49,75%

SIKAP TERHADAP MASALAH SOSIAL POLITIK

prakteknya lebih menyengsarakan rakyat. Impotensi yang melanda lembaga kemahasiswaan untuk turut memberikan andil dalam berbagai problematika sosial kemasyarakatan. Ditambah lagi, rendahnya animo mahasiswa sekarang untuk turut terjun dalam berbagai agenda demokratisasi masyarakat. Kesemuanya adalah potret buram wajah orientasi sosial politik mahasiswa kita saat ini.

Dalam berbagai kesempatan, tesis di atas tampak nyata pula dalam demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan di sekitar jalan-jalan utama kampus akhir-akhir ini. Secara riil, hanya segelintir mahasiswa yang *concern* dengan aktivitas semacam ini. Sementara, sekelompok mahasiswa – yang wajahnya itu-itu saja– berteriak serak lewat corong *megaphone* menentang berbagai penindasan dan ketidakadilan, mahasiswa lain justru acuh tak acuh.

Begitu juga dengan acara seminar atau diskusi bertema sosial politik yang penting, hanya sedikit yang bersedia menghadirkan diri. Dan yang lebih buruk lagi, dalam berbagai isu-isu lokal penting yang ditentang dan di*counter* oleh sekelompok aktivis yang kritis, justru resistensinya



muncul dari kelompok mahasiswa sendiri yang merasa tak punya kepentingan.

Berbagai realita ini, lantas jadi fokus yang makin menarik apabila kita cermati hasil analisis polling **Orientasi Politik Mahasiswa** yang dibagikan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan Majalah **BALAIRUNG** kepada 205 responden dari kalangan mahasiswa yang tersebar di kota Yogyakarta, Semarang dan Surakarta. Menariknya, beberapa polling mahasiswa yang pernah dimuat Harian KOMPAS tahun 1991 (14/6/91) maupun penelitian majalah TEMPO yang bertema **Golput di Kalangan Anak Muda** (TEMPO,30/5/92) justru harus ditinjau kembali dengan adanya data-data baru hasil polling yang dilakukan secara *purposive sampling* oleh tim Litbang **BALAIRUNG** ini. Hasil yang ditunjukkan dari angka-angka ini, cukup menjadi bahan refleksi yang berharga buat kita semua terutama menyangkut kondisi kekinian mahasiswa kita.

Minat Politik Mahasiswa Merosot

Pertama-tama, hasil polling menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang berminat pada persoalan sosial politik serta mau terlibat ternyata hanya sekitar 31,22% saja. Kebanyakan minat mahasiswa yang ditemui terhadap persoalan sosial

politik hanya sampai pada taraf kognisi, hanya untuk sekedar tahu saja (lihat tabel). Dengan demikian, kiranya tidak mengherankan jika dalam berbagai momen aktivitas sosial politik yang diselenggarakan baik oleh intern kampus maupun di luar kampus, hanya segelintir mahasiswa yang terlihat aktif mengambil peran. Dan kalaupun ada persoalan-persoalan ketidakadilan, mahasiswa yang menyatakan bergairah untuk terlibat, jumlahnya sangat minim (lihat tabel). Kebanyakan dari mereka tidak ingin terlibat, takut (*political phobia*) atau pun tidak suka dengan urusan politik.

Boleh jadi, agenda sosial politik memang tidak lagi terlalu menarik di mata mahasiswa sekarang, tergeser oleh hal-hal yang lain, khususnya menyangkut beban kurikulum yang harus dikejar. Mereka senantiasa menerima indoktrinasi untuk selekasnya memasuki *teknostruktur*, dicekoki dengan budaya Indeks Prestasi 4,00, cepat-cepat lulus dan mencari kerja. Mahasiswa sekarang, akhirnya –mau tak mau-- memang digiring untuk menjadi intelektual yang makin praktis, egosentris dan pragmatis.

Realitas ini jelas-jelas akan merupakan lampu merah bagi produk pendidikan tinggi kita. Hal ini juga sejalan dengan

PENDAPAT TENTANG GERAKAN MAHASISWA YANG MEMPERJUANGKAN HAK ASASI RAKYAT MELALUI DEMO-DEMO DI JALAN	
Tidak ada gunanya	18,54%
Hanya memboroskan waktu saja	15,12%
Belum saatnya	21,46%
Perlu digiatkan	44,88%

pemikiran Arbi Sanit yang dituangkannya dalam buku **Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa** (1989). Dikatakan dalam buku tersebut, bahaya dari mahasiswa yang tidak peka politik jika kelak berhasil memasuki posisi kekuasaan dan profesi adalah bahwa mereka akan kurang dapat diandalkan untuk mengelola dan merancang pertumbuhan politik dan masyarakat ke arah yang idealis, tanpa mengesampingkan kenyataan yang ada. Yang paling ditakutkan memang sikap pragmatis-praktis yang dikondisikan saat ini --serta yang ditunjukkan oleh data polling-- akan melahirkan sarjana-sarjana yang makin serakah, tidak mempunyai komitmen dan etika intelektualitas serta makin tidak peduli dengan situasi sosialnya.

Gerakan Mahasiswa Kian Terpuruk

Gerakan mahasiswa adalah bentuk nyata aktivitas mahasiswa dalam berbagai agenda sosial politik lokal dan nasional. Dan sepanjang sejarah kemahasiswaan, gerakan mahasiswa adalah bentuk keterlibatan mahasiswa yang dianggap paling banyak memberikan kontribusi bagi perubahan iklim politik nasional. Meskipun sering diguncang oleh berbagai bentuk rekayasa dan kooptasi, mereka senantiasa konsisten dalam menyuarakan isu-isu kerakyatan, keadilan serta keberpihakan nyata kepada yang tertindas akibat ulah oknum-oknum yang kerap mengatasnamakan 'pembangunan'.

Namun, dengan melihat hasil polling **BALAIRUNG**, gerakan mahasiswa saat ini ternyata makin kehilangan pamornya.

PENDAPAT TENTANG KEKUATAN MAHASISWA DALAM PERCATURAN POLITIK NASIONAL SEKARANG



Kuat, jika diberdayakan 65,85%

Lemah, walau diberdayakan 34,15%

Meskipun cukup banyak responden yang percaya bahwa mahasiswa sebenarnya memiliki *bergaining position* yang kuat dalam agenda demokratisasi masyarakat (65,85%), namun sebagian besar tidak lagi menganggap bahwa gerakan mahasiswa bisa efektif (lihat tabel).

Dengan berbagai kendala dan sebab yang dapat di*elaborasi* lebih mendalam, gerakan mahasiswa kekinian memang makin kehilangan peminat dan pengikutnya. Dalam artian, apresiasi mahasiswa terhadap gerakan mahasiswa memang makin merosot, entah karena tidak berminat ataupun alergi.

Lagipula gerakan mahasiswa sekarang ini memang tumbuh dalam kondisi yang payah dan serba terjepit. Di satu sisi mereka makin tidak populer lagi di kalangan mahasiswa yang menjadi basis mereka. Di sisi lain mereka harus berhadapan secara *diametral* dengan pihak penguasa yang acapkali menempatkan diri sebagai *patron* rakyat yang anti dialog dan anti kritik. Dan repotnya lagi, gerakan mahasiswa sekarang membawa pula sebuah beban historis panjang dari para pendahulu-pendahulunya yang sudah terlanjur besar, sebuah romantisme dari sejarah pergerakan mahasiswa.

Banyak, Mahasiswa Tidak Peduli Aspirasi Politiknya

Bentuk pertanyaan riil bagi mahasiswa sekarang menyangkut orientasi politiknya –jika mereka memang tidak lagi bersimpati dengan model gerakan mahasiswa-- adalah bagaimana mahasiswa sekarang menyampaikan aspirasi politiknya. Data polling menunjukkan bahwa sebagian menyalurkan lewat organisasi-organisasi independen di kampus

Tidak efektif 40,00%

Sangat efektif 31,22%

Tidak tahu 28,78%

EFEKTIVITAS BENTUK-BENTUK GERAKAN MAHASISWA UNTUK MENEGAKKAN DEMOKRASI DI INDONESIA

CARA MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK



Lewat organisasi independen di kampus	26,34%
Lewat organisasi sosial politik di luar kampus	20,98%
Hanya lewat pemilu saja	32,20%
Tidak peduli soal ini	20,48%

(26,34%), lewat organisai sosial politik di luar kampus (20,98%) tetapi yang terbesar mengatakan hanya menyalurkan aspirasi politik saat pemilu saja (32,20%). Sisanya lagi mengatakan tidak peduli sama sekali soal penyaluran aspirasi politiknya (20,48%). Yang terakhir ini menunjukkan kelompok responden yang tidak mau tahu-menahu soal aspirasi politiknya. Repotnya, kuantitas mereka yang apatis ini cukup banyak, mencapai 20,48%.

Memang, sejak NKK/BKK, kuantitas mahasiswa yang terjun dalam dunia politik makin merosot tajam. Sejak rekayasa depolitisasi kampus yang dahsyat itu terjadi, mahasiswa selalu diajarkan untuk memiliki image negatif tentang politik. Akibatnya term politik selalu dikaitkan dengan perilaku intrik-intrik, perebutan kekuasaan dan perilaku saling menjatuhkan. Kenyataan mengenaskan semacam inilah yang tertangkap dan lantas di-counter habis-habisan oleh beberapa pakar sosial politik Indonesia saat ini, misalnya saja oleh Mohtar Mas'oed dalam bukunya **Negara, Kapital dan Demokrasi** (hal. 104). Politik yang mestinya dimaknai sebagai usaha menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan, justru ditinggalkan dan sebagai gantinya yang menjadi trend di kalangan mahasiswa sekarang adalah pola *life style* yang berkesan hedonis, *snob* dan seringkali arogan dalam pergaulan sosial.

Dengan demikian, tidak mengherankan jika *role expectant* yang dinanti-nantikan masyarakat terhadap mahasiswa sekarang, makin jauh dari harapan. Tidak perlu diherankan, jika diskusi politik akhirnya kalah pamor dengan pagelaran jazz atau peragaan busana. Dan aktivitas- aktivitas yang digandrungi saat ini kebanyakan adalah kelompok aktivitas seni, oleh raga atau hobby yang tidak menyentuh akar-akar persoalan sosial kemasyarakatan.



Demonstrasi mahasiswa era 90-an
Pragmatis atau semakin peduli terhadap permasalahan sekitar?

Golput Justru Makin Dipuja

Sebagai point terakhir, meskipun sebenarnya gaung pemilu 1997 masih belum keras terdengar, tim Litbang **BALAIRUNG** menganggap cukup penting pula untuk mendapatkan data soal mahasiswa yang bersedia menyalurkan aspirasi politiknya melalui pemilihan umum, entah dengan mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), atau Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ternyata, hasilnya cukup mengejutkan yakni sebanyak 33,17% menyatakan tidak mau dan tidak akan menyalurkan aspirasi politiknya dalam pemilu mendatang.

Angka ini menunjukkan, perwujudan kongkrit dari hak demokrasi Pancasila ini, ternyata memang makin tidak diminati dari tahun ke tahun oleh mahasiswa kita. Jika pada tahun 1992, Majalah TEMPO –melalui pollingnya– melaporkan ada 16,4% dari kaum muda terpelajar yang tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 1992, maka angka itu kelihatannya akan makin membengkak dengan jumlah peminat Golput (Golongan Putih) di kalangan mahasiswa yang kian bertambah banyak.

Jika dianalisa lebih jauh, angka Golput ini merupakan akibat simultan dari kelompok mahasiswa yang merasa *hopeless* dengan partai politik kita saat ini --yang hanya sekedar berjanji-janji menjelang pemilu tetapi tidak berbuat banyak untuk menciptakan perubahan-- dengan kelompok mahasiswa yang benar-benar tidak mau peduli soal pemilu.

Ya 66,83%

Tidak 33,17%

MAU DAN AKAN MENYALURKAN ASPIRASI POLITIK MELALUI PARPOL (PPP, GOLKAR ATAU PDI) DALAM PEMILU MENDATANG

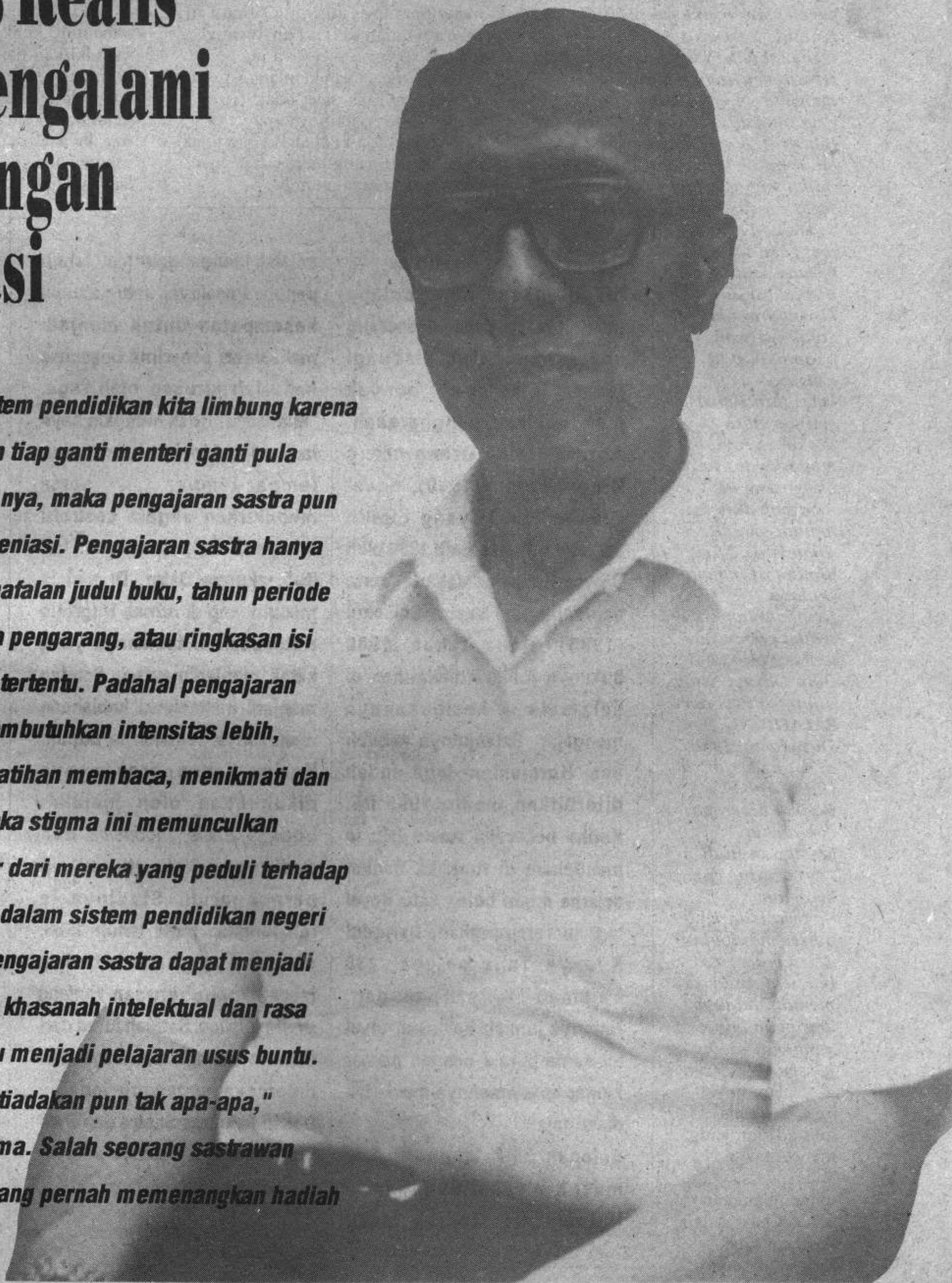
Meskipun demikian, dari hasil *interview* dengan beberapa responden yang menyatakan dirinya Golput, semuanya menjawab tidak akan menggunakan hak pilihnya karena memang tidak pantas percaya lagi dengan partai politik yang ada. Mungkin yang ini memang pantas menjadi renungan bagi ketiga partai politik yang akan bertarung di pemilu 1997 mendatang.

Sebagai penutup, meskipun angka Golput yang makin membengkak tersebut dapat diabaikan dan *status quo* penguasa negeri ini pun tidak akan banyak terpengaruhi oleh angka ini, namun sesungguhnya kekuatan mahasiswa pada dasarnya tidak akan diabaikan begitu saja. Dengan meminjam apa yang pernah diucapkan oleh Seymour Martin Lipset, *Sangatlah keliru setiap usaha untuk menganalisa masa depan politik dalam negeri maupun luar negeri, apabila mahasiswa diabaikan.*

Masalahnya sekarang, dengan melihat komitmen sosial mahasiswa yang kian hari kian merosot, patut untuk dipertanyakan lagi apakah mahasiswa kita sekarang masih merupakan kekuatan sosial yang "patut diperhitungkan". Dan kalaupun anasir-anasir perubahan sosial seperti organisasi, pemimpin dan momentum itu ada, layak ditanyakan pula apakah mahasiswa akan mampu melakukan gebrakan untuk membuat suatu perubahan radikal dalam atmosfer perpolitikan kita yang kian hari kian suram. □

Budi Darma

Penulis Realis Kita Mengalami Kekeringan Inspirasi



KETIKA *sistem pendidikan kita limbung karena kebiasaan tiap ganti menteri ganti pula kurikulumnya, maka pengajaran sastra pun ikut teralieniasi. Pengajaran sastra hanya berupa kumpulan hafalan judul buku, tahun periode sastra, nama-nama pengarang, atau ringkasan isi cerita karya sastra tertentu. Padahal pengajaran sastra idealnya membutuhkan intensitas lebih, melalui sejumlah latihan membaca, menikmati dan mengomentari. Maka stigma ini memunculkan beberapa komentar dari mereka yang peduli terhadap pengajaran sastra dalam sistem pendidikan negeri ini. "Seharusnya pengajaran sastra dapat menjadi sumber pengayaan khasanah intelektual dan rasa batiniah siswa, lalu menjadi pelajaran usus buntu. Kendati penting, ditiadakan pun tak apa-apa," komentar Budi Darma. Salah seorang sastrawan sekaligus novelis yang pernah memenangkan hadiah sastra ASEAN.*

***BAPAK** berpenampilan kalem dan sederhana ini dikaruniai 3 anak dari perkawinannya dengan Sitaresmi, SH. Ia mengaku bahwa pernikahan membuatnya hidup lebih teratur. "Istri saya banyak memperhatikan keperluan saya, seperti menyimpan koran-koran, menyimpan buku-buku, atau catatan-catatan saya," begitu tuturnya. Karena perhatian yang besar inilah kemudian Budi Darma mulai tergugah lagi untuk menulis secara serius. Sebelum itu, ia mengaku tak pernah serius menjalani dunia kepengarangan. Sajaknya yang pertamapun ia tulis secara kebetulan ketika suatu saat ia diajak ke rumah teman ayahnya. Iseng-iseng ia mengetik dan jadilah sebuah sajak yang lalu dimuat di majalah Budaya. Demikianlah sedikit gambaran tentang pribadi Budi Darma, yang dijumpai Reporter **BALAIRUNG** Dirmawan Hatta, di ruang kerjanya IKIP Surabaya. Berikut beberapa cakrawala pemikiran Budi Darma yang cukup beragam:*

Selain dari "obyek manipulasi" dari kekuatan di luar diri Anda saat menulis, adakah dorongan lain yang bisa Anda jelaskan?

Dalam novel saya Ny. Talis, ada satu adegan yang menceritakan Ny. Talis menembangkan sebuah lagu dalam keadaan tidak sadar. Ini terjadi ketika anak gadisnya yang sakit gagal disembuhkan baik oleh dokter maupun dukun. Dan saat Ny. Talis *nembang* itulah si anak gadisnya bangkit, kemudian menari, mengiringi lagu itu; yang kemudian menjadi tarian sakral Banyuwangi, tempat *setting* novel saya itu berlangsung. Demikianlah, seperti halnya Ny. Talis, saya tidak menyadari sepenuhnya apa yang saya tulis. Ada kekuatan yang tidak saya ketahui yang menguasai saya pada waktu saya menulis.

Adakah pengalaman kemanusiaan tertentu yang mendorong Anda tampak pesimistis memandang manusia dalam karya-karya yang Anda tulis?

Pada hakekatnya saya selalu tersentuh ketika menyaksikan dan memikirkan hal-hal yang sifatnya berulang-ulang tetapi sangat hakiki dalam kehidupan manusia. Tentang kelahiran, kematian dan penderitaan, misalnya. Penangkapan indera saya mengenai siklus kehidupan yang sifatnya hakiki selalu menyentuh hati nurani saya. Oleh karena itu saya selalu menulis tema-tema yang kurang lebih sama. Di samping itu, dulu saya dibesarkan dalam suasana perang dan karenanya saya dekat dengan kematian. Saya juga banyak menyaksikan penderitaan. Pengalaman-pengalaman itu mengendap sebagai kenangan yang pada akhirnya mengalir dengan sendirinya tanpa dapat saya kontrol saat saya menulis.

Secara dominan Anda digerakkan oleh inspirasi. Bagaimana Anda memandang situasi chaos dalam sebuah karya yang ditulis oleh pengarang yang mengandalkan inspirasi?

Memang pada mulanya seorang pengarang amat tergantung pada inspirasi. Tetapi sesudah itu, akan amat tergantung pada masing-masing orang itu. Pada kesukaannya, pada kondisinya, pada prasyarat yang dia miliki. Sangat individual sekali. Namun bagi saya pribadi, apabila saya mendapat inspirasi, kemudian inspirasi itu mengendap, seperti misalnya pada

Beberapa bukunya menunjukkan betapa intensitasnya sebagai seorang sastrawan patut diacungi jempol karena banyak mendapatkan penghargaan. Antara lain Orang-orang Bloomington (1980), novel Olenka (1983) yang dipilih sebagai novel terbaik 1984 oleh Dewan Kesenian Jakarta, serta beberapa esai sastra Solilokui (1983). Pada tahun 1988 bukunya Rafilus diterbitkan di sela-sela kesibukannya mengajar. Selanjutnya sebuah esai Harmonium juga sudah diterbitkan medio 1995 ini. Ketika beberapa waktu lalu ia mendekam di Amerika Serikat selama enam bulan satu novel lagi ia rampungkan, berjudul Nyonya Talis setebal 233 halaman tulisan tangan. Uniknya jumlah halaman novel ini sama persis dengan nomor kamar apartemennya meski tak disengaja.

Selepas SMA tahun 1955 ia masuk Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada setelah menganggur satu tahun penuh. Pasalnya, satu-satunya kesempatan untuk menjadi mahasiswa penerima beasiswa hanyalah jurusan olah raga. "Mati saya. Tidak mungkin saya lari-lari, meloncat-loncat dan lempar-lempar serta memikirkan segala sesuatu mengenai lari, loncat dan lari itu", akunya datar. Di sini ia menumpang di rumah Nugroho Notosusanto, temannya yang kelak menjadimenteri. Setelah menjadi mahasiswa kebiasaan menulisnya semakin ia pupuk. Karier kepengarangannya dikukuhkan oleh majalah budaya *Basis, Indonesia* dan *Cerita* yang kala itu cukup berpengaruh. Studinya ia rampungkan pada tahun 1963, pada saat yang sama ia berhak meraih penghargaan *Bintang Bhakti Wisuda*. Setelah lulus dari UGM ia menuju Surabaya dan dipercayamemegang jabatan Dekan Fakultas Sastra dan Seni IKIP Surabaya, usianya saat itu baru 26 tahun.

waktu bertahun-tahun sebelum saya menulis *Rafilus* misalnya, saya sudah mendapat inspirasi yang kemudian menjadi kalimat pertama yaitu: Rafilus telah mati dua kali. Kemarin dia mati, hari ini tanpa pernah hidup kembali, ia mati lagi. Kemudian nama Olenka misalnya itu sudah mengejar-ngejar saya sejak dulu, sejak saya masih di SMP. Inilah inspirasi. Kemudian inspirasi ini dapat berkembang dengan sendirinya apabila saya mendapat kesempatan yang amat baik untuk menyelesaikan tulisan itu. Dan kesempatan itu datangnya dengan sendirinya tanpa dapat saya perhitungkan. Namun, apabila kemudian kesempatan untuk menulis ini datang, dan saya terbebani oleh tugas-tugas lain, saya tidak bisa menulis kecuali menulis esai. Maka bisa dikatakan, hampir semua tulisan saya khususnya novel, itu saya tulis di luar negeri. Mengapa demikian, sebab ketika saya ada di luar negeri, saya tidak banyak terganggu oleh apapun juga. Tidak ada tugas-tugas, tidak ada telepon, sehingga begitu keadaaan yang baik untuk menulis datang, saya bisa menulis terus tanpa terinterupsi oleh apapun juga. Seperti misalnya *Olenka* itu selesai dalam waktu tiga minggu. *Ny. Talis* itu selesai dalam waktu delapan minggu. *Ny. Talis* itu sudah saya selesaikan di Amerika selama enam bulan. Pada waktu itu Umar Khayam sedang menulis *Para Priyayi*.

Chaos yang Anda sebut tadi mungkin terjadi pada pengarang lain. Sebab di dalam dunia penciptaan ada sekian persen inspirasi dan sekian persen perspirasi. Ini berarti bahwasanya inspirasi saja tidak cukup, harus disertai kerja keras supaya ia menjadi karya yang utuh. Sebab bila tak utuh, karya itu menjadi chaos.

Anda pernah menyebutkan bahwa kita adalah warga kelas tiga yang terbatas cuma sebagai pengagum.....

Seperti negara-negara berkembang lain, kita terlalu lama dijajah. Dan oleh karenanya, landasan estetika, konsep pemikiran kita sebetulnya berdasar pada kerangka berpikir Barat. Seperti yang terjadi pada seni primitif Afrika yang semula dianggap rendah. Namun setelah diangkat oleh orang-orang Barat khususnya ketika Picasso memasukkan unsur-unsur seni primitif dalam lukisannya, kita ikut menganggap bahwa seni primitif Afrika itu baik. Ini menunjukkan bahwa standarisasi estetika kita telah dikondisikan oleh jalan pikiran Barat. Jadi kita ini hanya pengagum.

Sikap berkiblat ke Barat ini ada hubungannya dengan Polemik Kebudayaan yang lalu "dimenangkan" oleh Sutan Takdir Alisyahbana?

Ya, itu terjadi sebagai pengendapan dari penjajahan yang begitu lama. Jadi pengendapan dari kenyataan bahwa kita ini dikondisi oleh pemikiran-pemikiran Barat. Sanusi Pane mengatakan kita harus menengok ke Timur atau ke diri kita sendiri. Tapi diri kita sendiri ya sulit. Landasan kebudayaan mana yang sebenarnya "diri kita" itu?

Dalam disertasi Anda, Anda juga bicara tentang moral, seperti dalam karya-karya fiksi Anda. Kenapa?

Ya, karena obsesi atau pertanyaan-pertanyaan selalu mengejar- ngejar diri saya, yaitu mengapa seseorang harus menderita, mati dan seterusnya. Di samping itu, saya merasa bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ketakwaan dan ketawakalan kita merupakan bagian dari konsekwensi hidup. Itu merupakan gambaran dari kepasrahan manusia, disamping mestinya juga manusia berusaha. Jadi moral merupakan gabungan antara takdir kita sebagai manusia yang bertakwa dan bertawakal dan usaha kita untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak bagi orang-orang di sekitar. Dalam hubungannya dengan kepenulisan atau kepengarangan, apabila dalam suatu karya sastra moralnya terlalu ditonjolkan, sehingga pembaca merasa digurui, karya sastra ini pada umumnya kurang baik. Moral yang baik itu adalah moral yang dimasukkan kesana sini dalam karya sastra yang tidak menggurui pembacanya. Jadi moral itu hadir di sana sini tanpa secara langsung dirasakan oleh pembaca. Sehingga dengan demikian pembaca bisa merasakannya sendiri bisa merenungkannya sendiri seperti misalnya dalam novel *Ny. Talis* ini moralnya juga sangat tebal. Apabila kita membaca novel ini dan merenung dan renungan itu ternyata merupakan pancingan agar kita lebih mempertebal kewajiban moral kita.



. . . standarisasi estetika kita telah dikondisikan oleh jalan pikiran barat

Tapi cerpen-cerpen Anda sendiri justru penuh dengan tokoh-tokoh yang bermoral buruk?

Moral dalam sastra bukan sesuatu yang lurus, langsung akan tetapi bisa zig zag bahkan terbalik. Selalu ada sesuatu pesan di balik tokoh-tokoh yang bermoral buruk. Kalau Anda perhatikan cerita-cerita saya, semuanya mencerminkan ketakwaan dan ketawakalan meskipun dengan cara yang tidak jelas.

Beberapa penyair yang kita punya memulai perjalanan

Budi Darma dilahirkan di Rembang Jawa Tengah, 25 April 1937, anak keempat pasangan Darmowidagdo-SrieKunmaryati. Pendidikannya dari Sekolah Dasar sampai SMA ia habiskan di banyak tempat. Kebetulan ayahnya karyawan Kantor Pos yang pola kerjanya menuntut ia harus pindah-pindah tempat. Semasa SMP ia paling getol mengunjungi perpustakaan tidak jauh dari Kantor Pos tempat ayahnya bekerja. Disitulah ia menemukan kumpulan cerpen Rusia terjemahan Inggris. Dengan kemampuan bahasa Inggrisnya yang terbatas ia membabat habis seluruh isi cerpen itu. Diantara deretan panjang kumpulan cerpen itu, ada satu cerita yang menempel kuat di otaknya. Sayang ia lupa siapa penulis cerita tersebut. "Saya sering teringat kembali cerpen ini, bahkan saya merasa sering terharu mengingat kembali nasib Olga Semyovnovna pelaku utama cerita itu", akunya.

kepenyairannya dari Yogya. Yogya juga berpengaruh bagi Anda?

Memang ada kota-kota tertentu yang memberikan suasana teduh, sehingga suasana teduh ini dapat menjadikan seseorang bergairah untuk menulis. Dahulu ketika Subagyo Sastrowardoyo masih muda dia pernah mengatakan bahwa suasana di sini (Yogya, Red) sangat menyenangkan saya merasa krasan di sini. Saya merasa Jogja sebagai rumah saya karena itu saya bisa menulis dengan tenang. Jadi memang ada kota-kota tertentu yang menyebabkan pengarang bermunculan di kota-kota itu. Kita melihat misalnya di Indonesia di Jakarta. Di Rusia di St. Petersburg, banyak pengarang-pengarang yang tinggal dan menulis di sana antara lain Dostoyevski. Juga Yogya.

Kalau kita bicara tentang Jakarta, di samping Jakarta sendiri memberi rangsangan untuk menulis, Jakarta juga sangat dekat dengan fasilitas. Di sana juga ada penerbitan-penerbitan yang terkemuka.' Dulu hanya ada satu penerbit terkemuka yaitu Balai Pustaka. Jakarta memberikan fasilitas kehidupan intelektual dan sosial, oleh sebab itu Rendra, Sapadi Joko Damono, Arifin C Noer tinggal di Jakarta. Mereka ingin mencari fasilitas intelektual dan lalu lintas pemikiran intelektual yang menyebabkan mereka bisa menulis.

Yogya sendiri secara harfiah tidak banyak memberi pengaruh pada saya untuk menulis. Namun Yogya memang meninggalkan bekas-bekas yang cukup dalam, dalam artian kehidupan intelektual. Di sana saya bertemu dengan Subagyo Sastrowardoyo, dengan Rendra, dengan Sapardi Joko Damono, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang pemikir yang semuanya memberikan masukan yang bermanfaat, meskipun tidak pada saat itu juga.

Anda menganggap bahwa karya-karya yang surealisis itu melarikan diri..

Apabila kita berbicara mengenai sastra surealistis, drama surealistis atau sastra abstrak, absurd dan sebagainya, itu dapat kita kaitkan dengan seni lukis. Ada lukisan yang gamblang, jelas diikuti, ada lukisan yang ruwet, oret-oretan. Demikian juga karya sastra. Kita bisa mengambil contoh kongkrit, yaitu almarhum Affandi. Almarhum Affandi dikenal sebagai seorang pelukis abstrak. Dia dikenal sebagai pelukis ekspresionisme. Lukisannya banyak oret-oretnya, obyeknya tidak jelas, anatomi obyeknya juga kabur. Namun seorang yang dapat melihat senirupa dalam arti yang sesungguhnya bisa melihat lukisan Affandi memang benar-benar berbobot. Demikian juga apabila kita membaca karya sastra yang absurd. Pembaca yang baik dapat merasakan bahwa sebuah karya sastra memang berbobot, bahwa karya sastra memang memberikan wawasan. Namun ada --kalau kita berhadapan dengan karya seni rupa--si pelukisnya melarikan diri. Dia tidak bisa menguasai anatomi obyek dengan baik maka dia lari ke arah lukisan yang semrawut. Hal yang sama berlaku juga untuk karya sastra. Jadi pembaca yang baik tidak bisa ditipu.

Anda pernah mengatakan bahwa kualitas seni kita menurun. Ada hubungannya dengan sikap represif penguasa?

Sebenarnya kita bisa melihat bahwa suasana represif itu bisa menimbulkan kreativitas yang tinggi. Angkatan Pujangga Baru besar dalam tekanan Jepang. Di Amerika Latin, keadaan ekonomi dan politik buruk, tapi toh karya-karya yang bagus tetap lahir dari sana. Sebaliknya, pada saat kita tidak mendapat tekanan apapun, pada saat Indonesia makmur, kreativitas malah menurun. Kita melihat korelasi antara kemakmuran yang meningkat dan kreativitas yang menurun, serta represi dan kreativitas yang meningkat. Musuh kita jelas, yaitu diri kita sendiri. Dan juga masyarakat sekitar. Seperti Umar Khayam, misalnya. Ia terlalu banyak disibukkan oleh urusan-urusan diluar kemampuannya. Sehingga ia tak dapat mencurahkan dengan baik kapasitasnya sebagai pengarang. Kadang-kadang masyarakat meminta perhatian terlalu banyak...

Ada pendapat bahwa tak ada karya-karya serius di Indonesia saat ini. Anda melihat hubungannya dengan pragmatisme yang berkembang di masyarakat?

Mengutip Eka Budianta, bahwa ada kemunduran generasi sastra. Pada tahun 50-an, Ajip Rosidi, NH Dini dan Rendra menulis karya sastra nasional, menyadap permasalahan nasional untuk publik nasional. Tahun 70-an, muncul Ashadi Siregar. Ia pengarang pop, dunianya dunia kampus. Tahun 80-an, dunianya menyempit. Yaitu dunia OSIS, SMP, SMA dalam Lupus karya Hilman. Memang di tahun 70-an seluruh dunia dilanda gelombang kebudayaan pop, dimana penampilan lebih penting daripada esensi. Fungsi sosial tersingkir oleh penampakan. Maka bacaan yang berbobot tergeser oleh bacaan ringan. Perkembangan jaman mengharuskan kita untuk bersikap pragmatis, karena itu, dalam menulispun, banyak orang besikap sama.

Anda menemukan bentuk-bentuk pengucapan baru dalam karya sastra di Indonesia sehubungan dengan globalisasi dan maraknya gelombang pop?

Pada tahun 1970-1971 ia memperdalam studinya di Universitas Hawaii dan menggenggam gelar doktor dengan disertasinya *Characters and Moral Judgement in Jane Austin's Novel*. Kemudian atas beasiswa Fullbright Budi Darma bertolak ke Amerika, belajar di Universitas Indiana, Bloomington dan meraih gelar *Master of Arts* dalam *Creative Writing* pada tahun 1976. Di sini pulalah ia beroleh jawaban siapa nama pengarang kumpulan cerpen yang pada masa kecilnya selalu mendera benaknya. Buku itu secara tak sengaja ia temukan di toko buku loak *Caveat Empton* di Bloomington, ternyata penulisnya adalah Anton Chekhov, berjudul *The Darling*. Maka tuntas sudah teka-teki nama pengarang buku tersebut yang lama mengganggu tidurnya. Lalu ia pulang ke tanah air beberapa saat dan bertolak lagi ke Amerika di universitas yang sama untuk menyelesaikan Ph.D. pada tahun 1980.
Apa yang diucapkan Budi Darma ketika dikukuhkan sebagai guru besar Sastra di IKIP Surabaya? Di bawah judul *Kisah Sebuah Odise* ia menegaskan; jika disimak secara realistik maka kehidupan ilmuwan dan seniman sebenarnya mempunyai titik temu persamaan. Mereka suka menyimak gejala alam, sosial, perilaku manusia dan sebagainya.

Ada. Karya-karya Yudhistira Anm. Massardi, *Arjuna Mencari Cinta* misalnya. Ia merubah sesuatu yang sudah punya pakem menjadi pop. Atau Seno Gumira Ajidarma. Ia menulis cerpen-cerpen yang tidak jelas pijakannya. Seolah-olah semuanya itu dari antah berantah. Saya melihatnya sebagai usaha untuk mengatasi stagnasi dalam dunia pemikiran di dunia sastra akibat adanya imbas kebudayaan pop.

Ngomong-ngomong tentang dunia absurd, Umar Kayam pernah mengatakan bahwa landasan struktur filsafat sastra absurd di Indonesia itu tidak ada...

Saya setuju. Tapi secara tersirat ada. Kehidupan absurd itu adalah kehidupan yang tidak menentu, mubazir dan sia-sia. Di sini, kita bisa melihat landasan filosofisnya. Di sisi lain, kita tak terlepas dari kondisi absurd. Semua negara berkembang dalam keadaan tak menentu. Keadaan yang harus dihadapkan pada *dadakan-dadakan* yang begitu sering membuat hidup kita menjadi absurd. Karena itu sastra absurd juga berlaku di Indonesia. Tapi sekarang kita tidak memerlukan sastra absurd lagi. Karena keadaan kita sudah jauh lebih teratur. Bagaimanapun, unsur absurd itu selalu ada. Kita tidak bisa membebaskan diri darinya.

Anda menganggap bahwa perjuangan terhadap hakikat sastra di atas perjuangan terhadap nilai-nilai yang mau disampaikan melalui sastra?

Sastra sebagai sastra itu tidak betul. Tapi kita bisa melihatnya melalui berbagai sudut. Pada saat seorang pengarang itu menulis karyanya, sebenarnya ia melepaskan diri dari masyarakatnya. Semua yang tertuang merupakan refleksi pemikiran. Dan pemikiran tidak mungkin berhenti pada dunia sastra. Jadi seorang pengarang menulis untuk sastra, untuk dirinya sendiri. Tapi begitu ia selesai, karyanya itu tidak semata-mata untuk sastra, tapi juga untuk kehidupan yang lebih luas dari sastra.

Apakah sastra punya pengaruh yang efektif dalam kehidupan di luar dirinya?

Tidak. Jangkauan sastra tidak nampak jelas, tidak kongkrit atau eksplisit. Sastra adalah sesuatu untuk membangkitkan pertanyaan. Dan kita tahu, para pemikir tidak berkubang di dunia praktis atau dunia aksi. Orang-orang yang membacanya tidak mengejawantahkannya secara langsung dalam masyarakat. Sastra menjadi perenungan yang mengendap, yang kemudian akan muncul dalam bentuk yang lain. Freud, misalnya. Ia banyak menyadap karya-karya Dostoyevski. Atau Gustave Jung. Karya-karya Herman Melville mendorong Jung melahirkan teori-teori archetipha dalam psikologi. Jadi sastra berpengaruh bukan dalam dunia praksis. Sastra untuk sastra itu betul dalam konteks sastra, tapi sesudah itu untuk dunia pemikiran yang lain.

Bila intelektualisme dalam kepengarangan itu berkaitan dengan "yang belum ada"; bagaimana dengan sastra sebagai gambaran masyarakat di jamannya?

Ya. Tapi karya sastra yang baik tidak menggambarkan realitas dalam arti harfiah. Charles Dickens tidak mengkopi masyarakatnya, sebab Oliver Twist di akhir cerita ternyata menjadi "seseorang". Itulah aspirasinya. Sebab pada umumnya di Inggris saat itu banyak anak-anak tidak menjadi apa-apa. Charles Dickens sekaligus juga menggambarkan perjuangan kelas menengah dengan karyanya itu. Jadi ia tidak semata mata mengkopi masyarakatnya.

Di Indonesia kita juga punya penulis-penulis realis. Mereka adalah Angkatan Kisah. Tapi mereka adalah penulis-penulis biografis. Mereka mengangkat realita dalam hidupnya lebih kurang secara harafiah. Mereka kurang menempa kemampuan mereka menulis dengan imajinasi, intelektualisme, pengamatan, penghayatan dan bacaan sehingga mereka cepat mengalami kekeringan inspirasi.

Penulis-penulis realis tulen seperti Dickens, Flaubert atau Dostoyevski selalu menggali. Dan mereka kaya akan imajinasi dan aspirasi. □

Dirmawan Hatta, Kusbiantoro E

Tari Bedoyo Semang:
Simbol, Mitos dan Nilai Sakral

Suatu pagi di tahun 1913, . . .

Sembilan penari wanita berjalan jongkok, perlahan memasuki pendopo keraton. Tubuh mereka dibungkus kain batik yang membentuk pola dodot (kain yang dililitkan sebatas dada dan ditarik kebelakang) dan selembar selendang menjuntai di masing-masing pundak mereka.

SATU persatu para penari kemudian mengangkat tangan, menyembah kepada Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono VII, yang duduk di kursi beludru. Lalu, dengan tenang sinuwun menganggukkan kepala. Dikiri kanan, para kerabat keraton duduk sempurna. Bau wewangian dupa menyapu ruangan pendopo itu. Perlahan gending pembuka mengalun lembut disusul suara pesinden (pelantun lagu) mendendangkan gending Bedoyo. Kesembilan penari itu kemudian bergerak bersama mengikuti irama gending. Tubuh mereka begitu pas menyusupi nada-nada, menerobos nuansa sakral. Sesekali kain batik yang menjuntai di lantai dan membentuk ekor -- menari-nari diayun kaki-kaki lentik itu. Di saat lain selendang hijau di pundak mereka diayun lembut berbarengan dengan dentuman gong.

Semua yang hadir di pendopo keraton itu larut dalam suasana sakral. Seolah dihipnotis oleh kekuatan lain. Dan waktu pun terus merangkak, dan para penari pun masih terus menari. Sebuah tarian sakral yang merupakan kebanggaan keraton Ngayojakarta Hadiningrat tengah digelar. Itulah tari Bedoyo Semang.

Ketika pesinden mulai menyusupi bait-bait akhir dan bunyi gamelan semakin melambat, pertanda tari akan segera dipungkasi. Total waktu telah berjalan 3,5 jam. Saat berikutnya , satu persatu para penari mundur teratur-sebelumnya dengan sikap hormat mereka menyembah kepada sinuwun. Kemudian mereka berjalan jongkok menuju bibir pendopo dan menghilang ke belakang. Hadirin masih terpaku meski para penari telah menghilang.

Maka sejak saat itulah tari Bedoyo Semang menghilang dari dunia tari klasik Jawa. Dan sampai tahun yang ke 95 ini ia seolah tak pernah diusik.

Runutan sejarah

Tari Bedoyo Semang adalah sebuah tari yang merekonstruksi kembali pertemuan antara Sri Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo dengan Ratu Laut Selatan. Pertemuan ini berlanjut menjadi jalinan asmara. Pertautan dua dunia. Di satu sisi Sri Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo adalah jelas-jelas manusia biasa sementara Nyai Roro Kidul adalah penguasa laut Selatan. Yang sekaligus dikenal sebagai ratu makhluk halus.

Selanjutnya cerita pun berkembang. Maka untuk merekam *love affair* dua penguasa itu oleh keraton Yogyakarta diformulasikan dalam sebuah tari, yakni tari Bedoyo Semang. Semang sendiri menurut KRT. Sasmito Dipuro seorang tokoh tari klasik Jawa berarti *samun* atau



Tari Bedoyo Ketawang di Kraton Surakarta
Tak semudah membalik tangan

samar-samar. Boleh jadi karena tari ini kental dengan nuansa mistis yang melingkupinya. Sejarah mencatat tari Bedoyo Semang terakhir kali digelar pada tahun 1913, yaitu pada masa Sinuwun Hamengkukbuwono VII, seperti yang diungkapkan KRT. Sasmito Dipura atau lebih dikenal Romo Sas ini. Praktis sejak saat itu hingga sekarang tak seorang seniman pun yang pernah melacak dimana gerangan tari ini berada. Namun, diakui sebetulnya sebagian catatan yang merekam tari ini masih ada, yaitu kabarnya di keraton Yogyakarta. Buku yang merangkum notasi dan gending tari Bedoyo Semang ini berjudul *Wredatama.*

Warisan budaya feodal yang dulu diterapkan oleh keraton saat ini samar-samar terasa. Di mata seniman Bagong Kusudiardjo hal itu bukanlah mengherankan, sebab mau tak mau hegemoni kekuasaan sebelum negeri ini(RI) lahir sudah dipraktekkan oleh keraton. Namun akan menjadi lain bila nilai -nilai feodal itu secara total diterapkan pada kondisi sekarang. Pendapat ini cukup beralasan sebab setelah negeri RI terbentuk praktis kekuasaan


A. RIYANTO

KRT. Sasmita Dipura
Mungkin mereka pusing !

keraton semakin surut. Diakui pula pada masa keraton masih menggenggam kekuasaan di masyarakat timbul keseganan untuk sedikit banyak mengusik produk budaya keraton yang berpola pengkelasan. Buntutnya bisa ditebak, keraton kian melambung sebagai menara gading. Walhasil sebagian warisan keraton baik dalam bentuk tarian, atau bentuk lainnya tinggal menjadi nama saja.

Menurut Wisnu Wardhana, seorang seniman tari yang pernah membintangi beberapa film laga ini mengatakan " Kendala yang juga cukup sulit adalah beratnya persyaratan yang harus dipenuhi. Ini jangan dikira enteng lho", tandasnya. Memang tari Bedoyo Semang mematok beberapa persyaratan yang tidak *enteng.* Yakni para penari diharuskan menjalani puasa 3 hari berturut-turut. Kemudian pada saat berikutnya ia juga tidak dalam kondisi datang bulan baik saat latihan sampai waktu pementasan. Sudah cukup? Ternyata belum. Tari ini mewajibkan para penarinya masih perawan, dan yang terakhir adalah kekuatan fisik dan mental yang prima. Sebab total durasi tari ini memakan waktu 3,5 jam. Pendek kata bila kondisi fisiknya lembek, bukan tidak mungkin hanya akan menemui kegagalan.

Hal senada juga diakui oleh Romo Dinu " Bukan saja penarinya, bahkan koreografernyapun harus menyiapkan sesajen seperlunya",

Di sini Bedoyo
Di sana Ketawang

BILA tari Bedoyo Semang di keraton Yogyakarta tinggal nama belaka lain halnya di Kasunanan Surakarta. Hanya saja labelnya sedikit berbeda, yakni tari Bedoyo Ketawang. Tari ini tetap berseting serupa dengan tari Bedoyo Semang; pertemuan dan *love story* antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Lebih jauh disebut *ketawang* (angkasa), karena gaung gending ini menggelegar sampai ke angkasa. Inilah titik awal sebutan tari ini. Sewaktu Panembahan Senopati meminta bantuan kepada Kanjeng Ratu Kidul, salah satu persyaratan yang musti diiyakan adalah ia sanggup menjadi suami ratu siluman ini. Negosiasipun lantas dilakukan dan kata sepakat berhasil didapat setelah Panembahan Senopati meluluskan permintaan Kanjeng Ratu Kidul. Sebelumnya, Panembahan Senopati sudah diwanti-wanti oleh Sunan Kalijogo untuk sedikit menjaga jarak dan ekstra hati-hati menyikapi pola pikir Kanjeng Ratu Kidul. Asumsinya, karena ia adalah penguasa dunia gaib yang dengan mudahnya bisa menyulap dirinya jadi cantik atau bahkan berburuk muka.

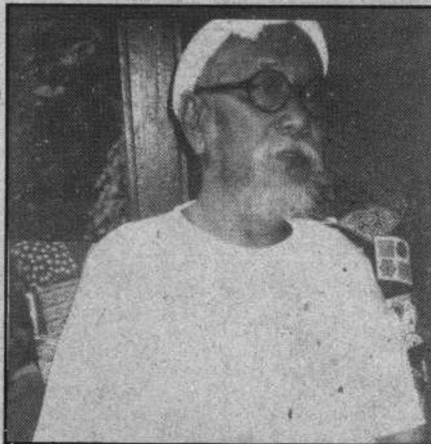
Usai perundingan Panembahan Senopati bermaksud pulang. Disinilah lantas timbul persoalan. Pasalnya Kanjeng Ratu Kidul tak merelakan ia ditinggalkan begitu saja. Panembahan Senopati lantas mencari jalan tengah, saat Ratu Kidul tertidur pulas kesempatan emas ini tak disia-siakan. Panembahan Senopati pergi dengan kecepatan kilat pulang ke keraton. Di saat Ratu Kidul terjaga dan tak mendapati Panembahan Senopati tak ada disisinya, ia menangis meraung-raung dan tangis ini sampai di kuping Panembahan Senopati yang sudah berada di keraton. Dengan sigap Panembahan Senopati kemudian memanggil abdi dalem atau ahli tari untuk merekamnya dalam bentuk tari. Inilah sejarah munculnya tari Bedoyo Ketawang.

Tari Bedoyo Ketawang diakui GRAy. Koes Moertiyah tak ada *serat piwulang* (buku penuntun) secara empirik. Sebab hal ini ditabukan untuk ditulis. Satu-satunya pewartaan tari ini hanya disandarkan pada pola regenerasi. Sejak awal generasi pertama sampai generasi sekarang pola ini telah terdeterminasi seperti ini. Jadi agak sukar untuk menelaah secara ilmiah seluk beluk tari ini. Tari Bedoyo Ketawang dibagi menjadi 3 tahap, pertama Romo Pakem mempresentasikan pertemuan Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, kedua Semang-semang yaitu saat-saat terjalinnya asmara dan ketiga Den Baguse menggambarkan kesediaan

kata pemilik sebuah padepokan tari di bilangan Kadipaten Lor ini. Belum lagi para *wiyogo* (pengiring gamelan) yang harus dilibatkan juga tidak sedikit, lanjutnya.

Menyoal bentuk budaya khususnya dunia tari mau tak mau selalu berkait dengan *atmosfir* yang melingkupinya. Tingkat aspirasi masyarakan atas kesenian itu tetap memegang peran yang cukup kuat. Yang pada gilirannya akan berimbas pada loyalitas dan intensitas seniman yang menggelutinya. Menurut Bagong Kusudiarjo, yang menjadi persoalan sekarang adalah siapa yang mampu melacak tari ini, katanya bertanya-tanya. Sebab masih menurutnya bisa tidaknya tari Bedoyo Semang digelar kembali bertumpu pada para seniman itu sendiri, tuturnya.

Memang selama ini Yogyakarta yang dijuluki sebagai kota budaya dan pelajar merasakan minimnya seniman yang *intens* menggali kesenian tari, khususnya tari produk keraton. Setidaknya kasus hilangnya tari Bedoyo Semang dari kancah tari di Yogyakarta adalah bukti yang tak perlu dibantah lagi.



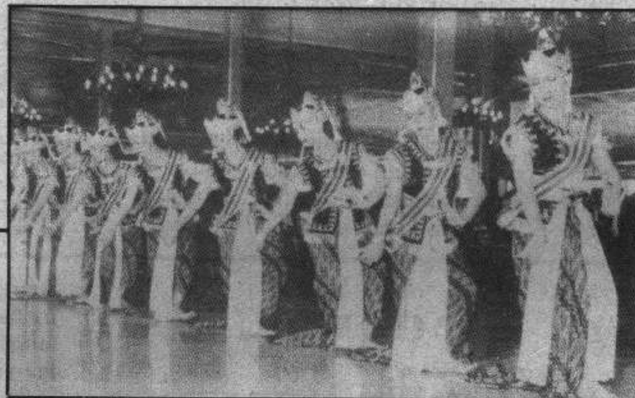
J. RIYANTO

Bagong Kusudiardjo
Saya malah bikin Bedoyo Gendheng...

Menyadari realita ini beberapa seniman yang merasa ikut bertanggungjawab atas kelestarian budaya mengambil langkah solusi. Maka mulailah bertaburan padepokan-padepokan tari, meski bidang garap mereka tidak beseragam. Namun toh upaya ini tak selamanya berhasil menjawab permasalahan. Ujung-ujungnya tari Bedoyo Semang luput dari perhatian sebagian seniman tersebut. Terhitung sejak tahun 1913 atau 83 tahun silam tarian yang dianggap paling sakral ini seolah terkubur dalam sumur tak berdasar. Dan lucunya dalam rentang waktu itu kabarnya hanya sebagian saja yang pernah melacak tari ini. Itupun atas permintaan keraton.

Dunia supranatural

Sebuah karya apapun bentuknya sebelum menjadi konsep yang kontekstual – selalu melewati proses yang sangat panjang. Apalagi kemudian karya itu berhak menyandang gelar besar, hebat ataupun super sakral. Pada saat dalam penggodogan karya



Repro: HORIZON

Tari Bedoyo Suryaningrat Kraton Mangkunegaran
Menggamit penari luar?

Kanjeng Ratu Kidul dimadu seberapapun banyaknya. Tari ini dibawakan oleh 9 penari dengan posisi endhel, batak, endhel weton, gulu, dhadha, buncit, apit ngajeng, apit wingking dan apit meneng.

Seperti ragam tari sakral lainnya, tari Bedoyo Ketawang juga mematok persyaratan yang tidak enteng. Latihan hanya dilakukan satu bulan sekali, yakni pada hari Selasa Kliwon. Sebelumnya para penari diwajibkan lelaku tertentu yaitu puasa selama 3 hari berturut, tidak dalam kondisi menstruasi, masih perawan dan yang terakhir adalah *kerik* (alis mata dibentuk). Itupun belum cukup, harus meminta ijin kepada Kanjeng Ratu Kidul dengan sesaji; di panggung, sanggar dan nyindring. Ketatnya persyaratan ini seringkali menambah *stigma* atas tari sakral, bukan saja dalam proses pra persiapan sampai penggelarannya, namun juga penggaliannya. Atas dasar ini maka Kasunanan Surakarta mulai memperlunaknya, sebab pola baku seperti itu untuk kondisi sekarang tak mudah dilaksanakan. Langkah pelunakan ini antara lain para penari tidak diharuskan menjalani puasa, tidak perawanpun oke, dalam kondisi menstruasipun boleh, hanya perlu ijin berupa sesaji *konyok* (bedak), rokok dan kembang telon yang dituangkan dalam piring. Sesaji ini disesuaikan dengan jumlah penari yang menstruasi.

Pada masa perpindahan hegemoni kekuasaan dari kerajaan ke RI, keraton Mataram mengalami penurunan kekuasaan. Imbas ini berpengaruh hebat atas eksistensi keraton berikut perangkat lunak lainnya. Untuk saat ini keadaan seperti itu terasa betul di Keraton Surakarta. Minimnya penari keraton (abdi dalem), tipisnya alokasi dana untuk menggaji mereka (penari) dan beberapa masalah lainnya yang cukup telak. Imbas minimnya penari yang dipunyai keraton cenderung mengurangi aktivitas budaya khususnya tari di keraton. Kadang pihak keraton harus menggamit penari luar untuk menggelar tari sakral macam Bedoyo Ketawang ini. Sebelumnya mereka secara resmi diangkat menjadi abdi dalem keraton meski tidak secara formal. Persepsi penari luar ini tentu tidak bisa disamakan begitu saja dengan persepsi mereka yang kebetulan orang dalam keraton (abdi dalem).

Dalam menggelar tari sakral mereka hanya dituntut bersih lahir dan batin, tak lebih. Agaknya keraton Surakarta enggan menerapkan pola feodal secara baku, ia sebaliknya membuka diri dansedikit mengikuti perubahan jaman. Inilah salah satu solusi keraton Surakarta menjaga sebagian produknya agar tak tersaruk-saruk dan akhirnya hilang jejaknya hanya karena beratnya persyarata yang mesti dipersiapkan.

Kusbi dan Prabowo

semacam itu membawa ciri dan karakter tertentu – yang tak bisa disamai oleh karya sebentuk yang lain. Ia lahir dalam suatu masa, suatu zaman, dan atmosfir tertentu. Selanjutnya ia akan berkembang dan melesat bersama rohnya.

Tari Bedoyo Semang dilihat dari aspek sejarahnya terasa amat kental dengan sentuhan mistis. Ini berdasar pengakuan Romo Sas saat dipercaya keraton Yogyakarta melacak tari Bedoyo Semang. "Saya sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Sudah ke Imogiri, pantai selatan tapi pada suatu saat tidak tahu masalahnya nggak jadi. Misalnya penabuhnya sakit. Atau kasetnya hilang, pokoknya jadi pusing", kenangnya datar. Masih menurut pendiri *padepokan Pamulangan Baksa Ngayojokarta* ini, kemungkinan seorang kareografer mengungkap tari Bedoyo Semang itu ada. Cuma ia tidak menjamin." Itu saya kira bisa saja. Tapi untuk melaksanakannya sulit. Pada umumnya tidak berani. Bahkan mahasiswa dari ISI (Institut Seni Indonesia-red) Yogyakarta, itu juga belum pernah ada yang berani", tuturnya panjang lebar.

Boleh jadi, kendala semacam itu secara tidak langsung kian memperpanjang deretan permasalahan dalam upaya pelacakan tari ini. Kendati jaman kini lebih bertumpu pada logika berpikir, namun toh alur-alur di luar logika itu masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Jawa.Kecenderungan ini oleh banyak kalangan diakui sebagai suatau bukti betapa keraton tetap menyimpan tabir mistis. Untuk dapat memasuki dunia" keraton", diperlukan bahasa terendiri yang jamaknya tak bertolak belakang dengan bahasa keraton itu sendiri. Analogi semacam ini belakangan berdampingan dengan nilai-nilai mitos, simbol dan sakralisme di masyarakat. Lantas kalau sudah begini bagaimana nasib tari Bedoyo Semang?

Sebagai satu aset budaya yang dimiliki keraton Yogyakarta, sudah sepatutnya keraton membuka pintu bagi siapa saja yang berminat merunut kembali. " Kalau saya nggak berani membedah tari ini tanpa seizin Sultan sendiri. Anda tahukan masyarakat kita masih berkembang kepercayaan macam itu?", kata Romo Sas ketika di temui **BALAIRUNG** di kediamannya. Ia mengganggap yang berhak menelusur kembali adalah pihak keraton. Tetapi bila suatu saat pihak keraton menawarkan ke pihak luar, sah-sah saja hal itu dilakukan. Pendapat senada juga diakui oleh Wisnu Wardhana, seniman tari yang membuka padepokan tari di rumahnya.

Apapun bentuknya soal ijin atau restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, adalah mutlak sebagai penguasa keraton Yogyakarta sekaligus pemilik langsung, Tari Bedoyo Semang ini menjadi kartu *truf*, sebab jamaknya sudah tak terhitung catatan kejadian-kejadian aneh pada saat akan merunut Tari Bedoyo Semang ini. Buntutnya kebanyakan selalu menemui kegagalan, kendati berbagai *ubo rampe* persyaratan yang ditentukan sudah tersaji.

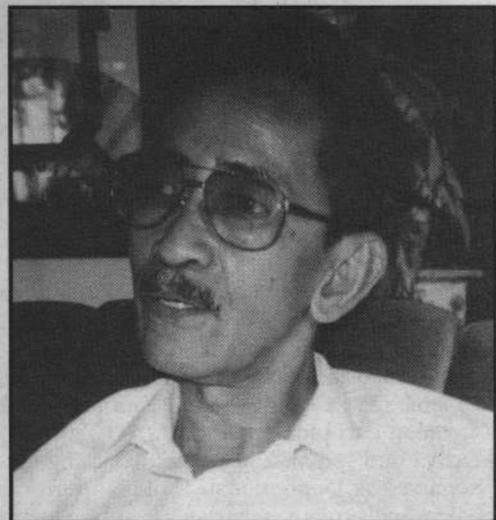
Namun di mata pemilik padepokan tari Bagong K –yang juga sama dengan namanya sendiri Bagong Kusudiardjo– soal ijin bukan menjadi soal. Menurutnya itu berlaku bagi seniman yang kebetulan menjadi *abdi dalem keraton*. Di luar itu, ia mengisyaratkan sah-sah saja seniman tersebut melacak tari ini. Asumsinya, dalam hidup bermasyarakat perlu sopan-santun, perlu *unggah-ungguh*, dan itu mutlak dijunjung tinggi, katanya panjang lebar. Ia bersandar pada pernyataan mendiang Sultan HB IX, yang kebetulan ia cukup dekat dengan beliau.

Sejarah mencatat, terhitung pada masa kepemimpinan Hamengkubuwono I sampai Hamengkubuwono VII keraton menutup diri. Kala itu produk kebudayaan keraton seperti tari, busana dan beberapa simbol keraton lainnya tidak boleh diusung keluar. Pendek kata, hanya bisa dinikmati oleh kerabat keraton dan *sentono- sentononya*. Kebijakasanaan ini berlangsung cukup lama dan menurun. Tetapi setelah tahta kerajaan pindah tangan, yaitu pada masa Hamengkubuwono VIII, pola kebijakasanaan itu dirombak, meskipun tidak semuanya. Artinya nilai-nilai lama yang kiranya masih relevan tetap dipertahankan. Sedangkan sisanya disusutkan atau disesuaikan dengan perubahan jaman. Salah satu kran keterbukaan itu antara lain, diperbolehkannya tarian sakral seperti *Lawung, Renggowati* dilempar kemasyarakat. Bukan itu saja, Hamengkubuwono VIII pun membuka sebuah organisasi yang bernaung dibawah keraton dengan nama *Krido Beksa Wiromo* pada tahun 1918. Tentu langkah ini atas restu dan ijin Hamengkubuwono VII sebagai pendahulunya. Lewat organisasi inilah keraton menarik beberapa seniman luar untuk bergabung dan mempelajari sebagian tari keraton.

Roda kekuasaanpun berjalan. Ketika tahta kerajaan digenggam oleh Hamengkubuwono IX langkah keterbukaan inipun tetap diambil. Yaitu diperbolehkannya busana kebesaran perkawinan putera-puteri keraton dieekor masyarakat awam. Juga penggunaan kain batik berpola *Barong* (biasa dipakai petinggi keraton) boleh dikenakan masyarakat luar. Praktek ini bisa ditemui pada acara *kethoprak* yang kerap digelar atau kesenian lain, tatkala seorang pemain *kethoprak* harus memerankan seorang raja. Namun toh langkah pembuka ini belum sempat menyentuh jejak tari Bedoyo Semang. Atau memang keraton belum sempat membedah dan melacak sebagian miliknya sendiri? 'Yang bisa menjawab itu Sultan sendiri (Hamengkubuwono IX Red), ungkap Romo Dinu menutup pembicaraan ▯

Kusbiantoro E.

TRI WASONO SUHU



RM Dinu Sastro
Koreografernya harus siap sesaji

PAK KANTO, REKTOR SERIBU DOKTOR



"AUDITORIUM itu kan sejak dulu sudah direncanakan, sejak Pak Sukadji itu. Pertama kalau wisuda selalu di muka Balairung, Gedung Pusat dengan tenda. Tiap hari masang tenda. Mahasiswa dan orang tua murid (mahasiswa- red) kan gerah itu. Lalu ide untuk membuat gedung permanen untuk wisuda yang makin lama makin kuat. Jadi anggapan mahasiswa bahwa auditorium lalu UGM dicap Usaha Gedung Mantenan itu sebetulnya untuk kepentingan mahasiswa kok malah dibalik. Itu kan jadinya gimana pikirannya itu," ungkap Prof. Dr. Sukanto Reksohadiprodjo, M.Com ketika ditemui **BALAIRUNG** diruang kerjanya. Lebih lanjut Rektor UGM yang terkenal disiplin sesuai dengan motto hidupnya ini menjelaskan bahwa auditorium itu dibangun untuk berbagai kegiatan baik seminar,konferensi internasional, maupun konser mahasiswa yang diprioritaskan untuk kepentingan mahasiswa. " Kalau dikatakan Usaha Gedung Mantenan itu kan hanya untuk menutup biaya. Apa bisa SPP dinaikkan, mau? Carikan uangnya dari mana. Jangan ngomong asal bunyi saja."

Bapak dua putra yang lahir di Semarang 4 Nopember 1940, menolak anggapan bahwa gencarnya pembangunan fisik di UGM akhir-akhir ini merupakan program utamanya selama menjabat rektor. Menurut Pak Kanto, gencarnya pembangunan fisik tersebut lebih merupakan upaya menindaklanjuti *master plan* yang sudah lama di tetapkan dan pembiayaannya berasal dari bantuan pemerintah dari DIP (Daftar Isian Proyek) yang disetujui bukan dari SPP, seperti pembangunan Stadion yang merupakan bantuan KONI. Selain itu UGM saat ini di bawah kepemimpinannya mencanangkan program 1000(seribu) doktor. " Sekarang ada 450-an doktor, yang di luar negeri 200-an sedang belajar, jadi sudah 650, tinggal menambah 350. Nanti beberapa fakultas dari teknik, kedokteran, lalu pertanian akan dapat bantuan dari Bank Dunia sama Bank Pembangunan Asia. Melalui itu kita kirim beberapa orang. Lama memang, empat sampai lima tahun. Kalau tidak dicanangkan sekarang kapan lagi, maka kita cari bantuan luar negeri untuk pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia), ya tho?." Ketika disinggung tentang pengadaan gedung perpustakaan yang seolah "terlupakan" Rektor UGM yang pernah menjabat Ketua BAPEPAM ini berkomentar,"Perpustakaan juga saya masukkan DIP. Tapi "diatas" menyatakan tidak untuk perpustakaan. Karena berdasarkan penelitian ternyata mahasiswa jarang masuk perpustakaan. Sekarang sudah ada niat bahwa mahasiswa akan masuk perpustakaan kalau bukunya baik.Oke saya bangunkan . Ada tiga perpustakaan pasca sarjana nanti, humaniora, kesehatan, perpustakaan agro-komplek, coba saya nanti lihat apakah perpustakaan diminati atau tidak."

Agus R.

Satrio : "Tolong Jangan Ganggu AJI"

SELAMA kurang-lebih 7 tahun Satrio Arismunandar menjadi wartawan "*KOMPAS*", tapi tiba-tiba ia kena "D.O.". Tepatnya ia mulai menjadi wartawan KOMPAS pada bulan Nopember 1988 (sebelumnya pernah di Harian "Pelita" selama 2 tahun) dan di"pamitkan" dari KOMPAS pada tanggal 30 Maret 1995. "Demi keselamatan KOMPAS", demikian tutur putra seorang pensiunan AURI ini waktu ditemui **BALAIRUNG** pada seminar "Seluk Beluk Pencarian dan Penyajian Berita di Media Cetak dan Media Elektronik" tanggal 8 Nopember 1995 yang lalu oleh surat kabar mahasiswa UGM "BULAKSUMUR".

Tentang undur diri-nya dari Harian terkemuka itu Satrio menjelaskan: "... waktu itu saya dan Yuda teman saya dipanggil Pak Jakob dalam pertemuan yang pribadi sifatnya; intinya Pak Jakob meminta kami berdua untuk mengundurkan diri dari KOMPAS. 'Demi kelangsungan hidup lembaga KOMPAS' begitu kata Pak Jakob. Alasannya ada tekanan dari pihak luar; dari PWI atau Deppen, pokoknya dari "pihak luar", begitulah yang dia katakan".

Kenapa kok Deppen atau PWI ataupun "pihak luar" yang dikatakan melakukan "tekanan", jawabnya karena Satrio yang Sarjana Teknik Elektro jebolan UI itu pengurus AJI (Aliansi Jurnalis Independen) atau tepatnya Sekjen-nya AJI, lho...kok?! Begini, kata Bang Satrio lagi: "*Pak Jakob ingin menyelamatkan KOMPAS, ya tidak berani dong melawan PWI, apalagi Deppen*".

Langkah yang diambil oleh Jakob Oetama ini sangat beralasan kalau kita ingat peristiwa pembredeilan tiga media sekaligus pada bulan Juni tahun lalu. Lantas apa hubungan tekan-menekan ini dengan AJI?

Menengok sejarah berdirinya organisasi AJI memang tidak bisa dilepaskan dari dikeluarkannya SK Menpen yang (sempat/tak sempat) menggemparkan dunia pers nasional bahkan internasional, yaitu SK No. 123, 124, dan 125 tahun 1994 tentang pencabutan SIUPP TEMPO, EDITOR dan DeTIK. Bayangkan berapa jumlah orang yang harus kehilangan pekerjaan, lebih lagi kehilangan hak-haknya yang asasi. Singkat cerita pada tanggal 7 Agustus 1994 lahirlah AJI melalui "Deklarasi Sirnagalih" yang ditandatangni oleh 57 wartawan dan kolumnis di Megamendung, Bogor. "Aji cuma ingin bisa menjadi organisasi yang bisa menyalurkan aspirasi para jurnalis. Kita tidak berniat mengganggu siapapun, jadi tolong jangan ganggu AJI. Kenapa ada tekanan-tekanan pada anggota AJI, misalnya tekanan (scr tidak langsung -red) pada saya hingga saya harus mundur dari KOMPAS, ada yang dimutasi ke luar daerah, juga ancaman bagi pihak yang mempekerjakan wartawan AJI akan dicabut rekomendasinya, larangan bagi

DARI FOTO MODEL KE JURNALIS

PERNAHKAH anda melihat seorang gadis cantik dengan T-Shirt dan jeans ketat, turun dari mobil Vitara, kemudian membagi-bagikan bunga kepada para demonstran? Itulah Ayu Utami, yang kala itu masih menjadi reporter majalah FORUM. Ayu bersama Kelompok Perempuan untuk Kebebasan Pers (KPKP) bergabung dengan demonstran yang lain menagih janji PWI di Kebon Sirih, Jakarta tahun silam.

Semua serba tak terduga bagi Ayu Utami, dara berdagu *aristokrat* yang berpenampilan macho ini. Sewaktu masih mahasiswi di Sastra Rusia UI, ia diajak temannya megikuti lomba sampul sebuah majalah wanita. Iseng-iseng ia coba, ternyata diterima. Jadilah ia seorang foto model. Lantas wajahnya kerap nongol di majalah yang kebanyakan dikonsumsi remaja putri dan wanita karier itu. Namun ia cuma betah beberapa saat." Habis *dimacem-macemin* dipotong, dikeriting, malah hancur- hancuran", kenangnya datar.

Bosan *dimacem-macemin* Ayu kemudian loncat ke MATRA, meski tidak disengaja karena banyak temannya yang sudah tergabung disitu. Awalnya ia menjadi reporter *stringer* (tidak tetap), toh dari situlah karier kewartawanannya dimulai. Tak cukup berpuas diri ia lantas terlibat di majalah FORUM Keadilan sebagai reporter setelah menggenggam sarjana dari UI.

Mengenai kondisi pers di Indonesia menurut mantan foto model ini sebenarnya masih terlalu banyak dikontrol oleh pemegang kekuasaan (pemerintah), akibatnya kadang merugikan pembaca, alhasil pembaca kurang mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.

Belum lagi adanya trend swa-sensor yang menggejala di hampir semua media massa, kian melengkapi *stigma* yang ada.

Ayu juga bergabung dalam oganisasi yang concern terhadap pers. Dimana organisasi ini ingin memperjuangkan jurnalisme yang independen dan profesional. Namun ia harus membayar mahal, karena ia musti digeser dari profesinya yang sudah menyatu dalam dirinya. "Sebetulnya menurut saya FORUM agak berlebih -lebihan memperlakukan saya.Karena kalau kita lihat di media lain seperti Bisnis Indonesia, itu enggak sampai terjadi pemindahan sepert itu",ungkapnya menyayangkan. Bagi Ayu penggeseran ini amat bertolak belakang dengan nuraninya.



ISTIMEWA

Berbicara mengenai hubungan wartawan dengan nara sumbernya, secara pribadi Ayu Utami berprinsip " Lebih baik kita (wartawan Red.) enggak usah ikut macem-macem organisasi. Karena bagaimanapun jarak wartawan dengan nara sumber harus dijaga betul", katanya mantap.

Kusbiantoro E.



TRI WASONO SUNU

media massa membuat laporan tentang AJI dan masih banyak lagi tekanan", jelas Sekjen AJI ini.

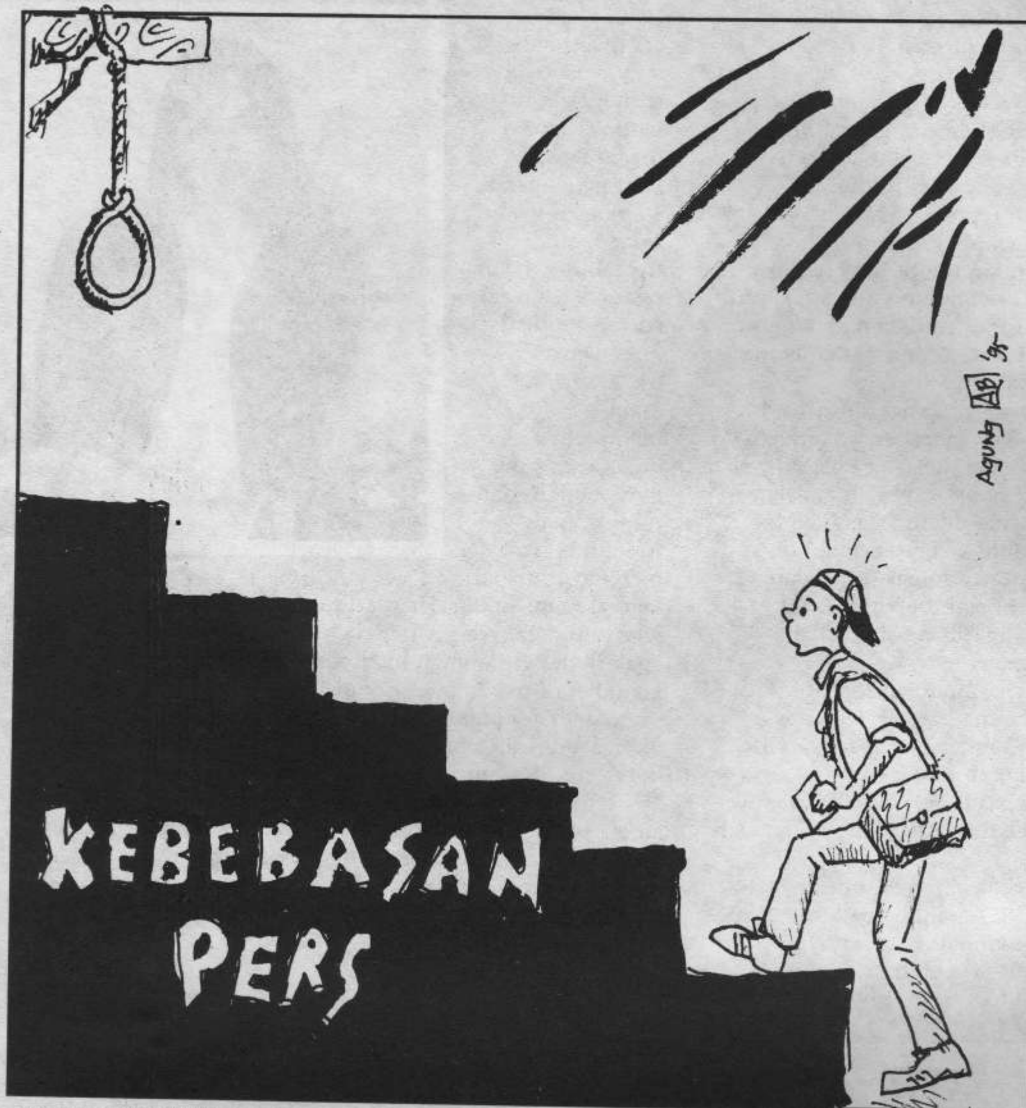
Tentang kelegalan organisasi AJI, Satrio menegaskan bahwa Aji sepenuhnya syah menurut UUD '45, yaitu tentang kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat. Katanya lebih lanjut, "Kalau ada PP atau peraturan yang lain yang mengatakan bahwa hanya PWI yang syah dan AJI tidak, berarti peraturan itu dari segi "jiwanya" bertentangan dengan UUD '45". Dan AJI bukan organisasi tandingan PWI, tapi organisasi alternatif PWI. Kita cuma menolak konsep 'wadah tunggal' ".

Ketika ditanya tentang bagaimana tanggapan kalangan internasional terhadap AJI, Satrio menjawab penuh optimis bahwa kalangan pers internasional bisa memahami eksistensi AJI di negeri ini. "Kita pernah mengadakan dialog antara wartawan AJI dan PWI di Paris yang dimoderatori orang dari IFJ (*International Federation of Journalist*) dan dari UNESCO". Dialog itu, menurutnya sangat menguntungkan AJI. Kini dunia tahu kenapa kerja sama AJI-PWI tidak bisa terjadi. "Kita bisa saja melakukan itu kalau atmosfirnya menunjang; kalau tidak ada penahanan wartawan, pemecatan, mutasi, tekanan ataupun intimidasi terhadap wartawan AJI", jelas Satrio mengutib apa yang dikemukakan pihak AJI pada dialog di Paris.

Entahlah, bagaimana nasib AJI nanti. Yang jelas setelah berkongres perdana di Yogyakarta secara diam-diam (sampai orang Yogya sendiri tidak banyak tahu) pada tanggal 7-8 Oktober 1995 barusan AJI akan memusatkan perhatian pada konsolidasi organisasi. Organisasi "alternatif" PWI ini akan segera memulai kerja-kerja konkret, seperti menata keanggotaan, merumuskan Kode Etik Jurnalistik, mengadakan Diklat Jurnalistik dan kerja-kerja lainnya supaya AJI bisa berfungsi sebagai organisasi alternatif bagi profesi kewartawanan yang betul-betul hidup, eksis dan bukan sekedar retorika.

Dan Sekjend AJI itu sekarang sedang menekuni aktivitas barunya, yaitu sebagai penulis lepas (juga pengamat Timur Tengah) dan mahasiswa "baru" pasca-sarjana Program Studi Pertahanan dan Keamanan Nasional UI.

Aship A.H



Setan Dan Kursi

Seorang teman dari Fisipol yang baru saja mendapat pencerahan sehabis jalan kaki dari Yogya-Parangtritis mengetahui bahwa ada tiga golongan setan di dunia ini.

Golongan pertama, yaitu setan yang akan terbakar jika dibacakan ayat Kursi.

Golongan kedua, yaitu setan yang akan lari tunggang-langgang jika dilempar dengan kursi.

Golongan ketiga, yaitu setan yang takut kehilangan kursi kekuasaannya yang sudah demikian lama ia duduki.

Kelik dari Abid dari Mamad

Akting

Pada sebuah acara shooting sinetron, seorang pemain amatir dipuji oleh sutradara. "Tak kusangka aktingmu bisa sebagus itu", kata sutradara bangga.

Tentu saja bintang amatir itu kaget dan berbesar hati. "Main mu bagus, betul-betul wajar, alami, lugas tanpa dibuat-buat", lanjut sutradara, tentunya yang lain, apalagi yang lebih senior merasa iri. Melihat gelagat itu, sang sutradara memberi penjelasan, "Betul, permainannya tampak wajar, tanpa dibuat-buat. Dia memang pas membawakan karakter orang bloon".

Narto

Mutu

Pada sebuah diskusi, seorang anak muda angkat jari, mendebat pendapat pembicara dengan argumentasi yang agak kacau dan sangat tendensius. Mendengar lontaran itu peserta yang lain bergumam, "Huh ngak bermutu".

Mendengar gumaman itu, sang pembicara sebelum memberikan jawaban berkomentar, "Kita harus menghargai pendapat orang lain. Bagi saya argumen penyanggah tadi cukup bermutu, walaupun mutunya rendah".

Narto

BMW

Seorang penyair yang selama ini dikenal sebagai pembela orang kecil, digugat oleh penggemarnya. Pasalnya, dia dinilai tidak konsisten karena membeli mobil BMW. Tetapi tatkala ditanyakan, penyair tersebut memberi alasan,"Jadi seniman memang susah hidup selalu tampak miskin. Kalau saya naik BMW itu jangan dilihat BMW nya. Saya sudah terbiasa merasakan penderitaan. Bahkan tidur di lantai pun rasanya nikmat,..."

"Apalagi di lantai mobil BMW", tukas seorang penggugat.

Sumpah Soto

Di Indonesia ternyata punya banyak sumpah. Setelah Sumpah Pemuda,. Sumpah Mahasiswa, kini pedagang soto tak mau kalah. Mereka ternyata juga punya sumpah, yakni "Sumpah Soto". Bunyinya sebagai berikut. *Kami Soto Madura, Soto Kudus, Soto Solo, Soto Yogya, Soto Sulung, Soto Lamongan, dan Soto Makassar, mengaku berbahasa satu, Soto Indonesia.*

Prabowo dikutip dari dalang ki Sujiwo Tejo.



JANGAN TAKUT BICARA POLITIK

SIAPA *BILANG*, PENGUSAHA TAK PERLU PAHAM MASALAH POLITIK?

Politik sudah merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Apalagi bagi pengusaha, pengaturan strategi masa depan usahanya sangat berkait erat dengan politik, dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, tak ada alasan untuk tabu bersentuhan dengan masalah politik.

Karena itu, Pembaca, kami hadir. TIRAS penyaji masalah politik, dengan kritis tanpa harus sinis.

Tunggu kami setiap Kamis.

MINGGUAN BERITA

TIRAS

TAJAM TANPA PRASANGKA